

SKRIPSI
PERAN UKURAN PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI HUBUNGAN
ANTARA STRATEGI PERPAJAKAN DAN MANAJEMEN LABA



Oleh :

WINDY ADITYA APRILIANAWATI
NPM : 2162201002

Diajukan untuk memenuhi salah satu
Syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
2025

SKRIPSI
PERAN UKURAN PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI HUBUNGAN
ANTARA STRATEGI PERPAJAKAN DAN MANAJEMEN LABA



Oleh :

WINDY ADITYA APRILIANAWATI
NPM : 2162201002

Diajukan untuk memenuhi salah satu
Syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
2025



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**BERITA ACARA
UJIAN SKRIPSI (KOMPREHENSIF)**

Panitia Ujian Skripsi (Komprehensif) Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Program Studi **Akuntansi**; telah melaksanakan Ujian Skripsi (Komprehensif) pada hari ini tanggal **07 Agustus 2025** bertempat di **Kampus Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
 4. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan tentang Status, Peringkat dan Hasil Akreditasi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Nomor : 146/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/VI/2022, Terakreditasi Baik Sekali
 5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan tentang Status, Peringkat dan Hasil Akreditasi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Nomor : 7742/SK/BAN-PT/AK-KP/S/X/2022, Terakreditasi Baik.
 6. Surat Keputusan Yayasan Pembina Pendidikan Mahakam Samarinda No.22.a/SK/YPPM/VI/2017 tentang Pengesahan Status Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
 7. Surat Keputusan Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Nomor. 424.237/48/UWGM-AK/X/2012 Tentang Pedoman Penunjukkan Dosen Pembimbing dan Penguji Skripsi peserta didik.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi tentang Penunjukkan Dosen Pembimbing Mahasiswa dalam Penelitian dan Penyusunan Skripsi;
 2. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi tentang Penunjukkan Tim Penguji Ujian Skripsi (Komprehensif) Mahasiswa;
 3. Hasil Rekapitulasi Nilai Ujian Skripsi (Komprehensif) mahasiswa yang bersangkutan;

No.	Nama Penguji	Tanda Tangan	Keterangan
1.	Dr. Martinus Robert Hutaaruk, SE.,MM,Ak,CA	1.	Ketua
2.	Firmansyah S.E., M.Ak	2.	Anggota
3.	Siti Rohmah, SE., M.Ak	3.	Anggota

MEMUTUSKAN

Nama Mahasiswa : WINDY ADITYA APRILIANAWATI
NPM : 21.111007.62201.002
Judul Skripsi : Peran Ukuran Perusahaan Dalam Memoderasi Hubungan Antara Strategi Perpajakan Dan Manajemen Laba
Nilai Angka/Huruf : **79,54/B+**

- Catatan :
1. LULUS / ~~TIDAK LULUS~~
2. REVISI / ~~TIDAK REVISI~~

Mengetahui

Pembimbing I

Dr. Martinus Robert Hutaaruk, SE.,MM,Ak,CA

Pembimbing II

Firmansyah S.E., M.Ak

Telp : (0541) 4121117
Fax : (0541) 736572
Email : uwigama@uwgm.ac.id
Website : uwgm.ac.id

Kampus unggul, widyakewirausahaan, gemilang, dan mulia.

Kampus Biru UWGM
Rektorat – Gedung B
Jl. K.H. Wahid Hasyim, No 28 Rt.08
Samarinda 75119

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul PERAN UKURAN PERUSAHAAN DALAM
MEMODERASI HUBUNGAN ANTARA STRATEGI
PERPAJAKAN DAN MANAJEMEN LABA

Diajukan oleh : Windy Aditya Aprilianawati

NPM : 2162201002

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan/Program : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Martinus Robert Hutaauruk, SE., MM, Ak, CA
NIDN.1120037001



Firmansyah, SE, M. Ak
NIDN.1128029402

Mengetahui,

4 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Widyagama Mahakam Samarinda



Dr. M. Astri Yulidar Abbas, SE., M.M
NIP. 19730704 200501 1 002

Lulus Ujian Komprehensif Tanggal : 7 Agustus 2025

HALAMAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS PADA:

Hari Kamis

Tanggal 7 Agustus 2025

Dosen Penguji,

1. Dr. Martinus Robert Hutauruk, SE., MM, Ak, CA 1.



2. Firmansyah S.E., M.Ak 2.



3. Siti Rohmah, SE., M.Ak 3.



HALAMAN PENGUJI

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Windy Aditya Aprilianawati

NPM : 2162201002

Telah melakukan revisi skripsi yang berjudul :

PERAN UKURAN PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI HUBUNGAN ANTARA STRATEGI PERPAJAKAN DAN MANAJEMEN LABA

Sebagaimana telah di sarankan oleh dosen penguji, sebagai berikut:

No.	Dosen Penguji	Bagian yang direvisi	Tanda Tangan
1.	Dr. Martinus Robert Hutauruk,SE.,MM,Ak,CA	1. Ikutin saran penguji relevan. 2. Cek lagi deskriptif statistik pada standar deviasi yang bernilai .	

2.	Firmansyah S.E.,M.Ak	1. Perbaiki abstrak 2. Tambahkan penelitian terdahulu dalam pembahasan 3. Bab 3 dibaca kembali untuk strukturnya 4. Model konseptual	
3.	Siti Rohmah,SE.,M.Ak	1. Tambahkan fenomena permasalahan. 2. Hubungan teori pada bab 2 variabel - variabel terkait. 3. Sesuaikan judul dengan korelasi perpajakan. 4. Definisi operasional 5. Persamaan regresi 6. Bab V -VI sesuaikan dan korelasi dengan pernyataan yang baik dan logis. 7. Sesuaikan sistematika penulisan.	

RIWAYAT HIDUP



Windy Aditya Aprilianawati lahir di Samarinda, Kalimantan Timur pada tanggal 24 April 2002 merupakan anak dari bapak Sarman Dwi Cahyono dan ibu Noor Susilawati. Menempuh pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK12 Samarinda setelah itu melanjutkan ke Sekolah Dasar Di SDN 002 Samarinda, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 022 Samarinda dan tamat pada tahun 2016 serta melanjutkan Sekolah di SMK Negeri 3 Samarinda dan tamat pada tahun 2020. Tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan jurusan Akuntansi.

Windy Aditya Aprilianawati

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Peran Ukuran Perusahaan Dalam Memoderasi Hubungan Antara Strategi Perpajakan Dan Manajemen Laba*".

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tulus, khususnya kepada orang tua (Ibu dan Ayah) atas segala dukungan moral, material, dan doa yang tiada henti, yang merupakan kunci utama keberhasilan penulis menyelesaikan studi. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini, meskipun penulis menyadari bahwa hasilnya masih jauh dari kesempurnaan.

1. Bapak Prof Husaini Usman, M.Pd., M.T Selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
2. Bapak Arbain, M.Pd Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. Bapak Dr. Suyanto Selaku Wakil Rektor Kemahasiswaan, Alumni, Perencanaan, Kerja sama & Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
4. Bapak Dr. Akmad Sopian, M.P Selaku Wakil Rektor bidang Umum, Sumber Daya Manusia dan Keuangan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
5. Bapak Dr. Muhammad Astri Yulidar Abbas, S.E., M.M Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

6. Ibu Erni Setiawati, S.E., M.E Selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
7. Ibu Siti Rohmah, S.E., M.Ak Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
8. Bapak Dr. Martinus Robert Hutauruk, SE, Ak, MM Selaku Dosen Pembimbing I
9. Bapak Firmansyah S.E., M.Ak Selaku Dosen Pembimbing II
10. Teman-Teman saya yang selalu mendukung bahkan membantu saya selama masa perkuliahan saya.

Dan pihak-pihak lain yang dianggap penulis berkontribusi dalam penyusunan skripsi. Dalam penyusunan ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa pembuatan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kelemahan baik mengenai isi, maupun bahasanya, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan. Semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan hidayah – Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya selama pembuatan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Akhir kata dengan kerendahan hati dan kekurangan penulis berharap semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkannya, seberapa pun kecilnya, semoga.

Samarinda, 7 Agustus 2025

Penulis



Windy Aditya Aprilianawati

2162201002

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGUJI	v
LEMBAR PERSETUJUAN REVISI SKRIPSI.....	v
RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Batasan Masalah.....	12
1.4 Tujuan Penelitian.....	13
1.5 Manfaat Penelitian.....	14
1.6 Sistematika Penulisan	15
BAB II DASAR TEORI.....	17
2.1 Penelitian Terdahulu	17
2.2 Dasar Teori.....	20
2.2.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	20
2.2.2 Teori Sinyal (<i>Signalling Theory</i>).....	21
2.2.3 Teori Akuntansi Perpajakan	22
2.2.4 Laporan keuangan	23
2.2.5 Manajemen Laba.....	25
2.2.6 Aset Pajak Tangguhan	26
2.2.7 Beban Pajak Tangguhan	28
2.2.8 Perencanaan Pajak (X3)	30
2.2.9 <i>Leverage</i> (X4).....	31

2.2.10 Ukuran Perusahaan (Z).....	33
2.3 Kerangka Konseptual.....	34
2.4 Hipotesis atau Pernyataan Penelitian	35
2.4.1 Pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba	35
2.4.2 Pengaruh beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba	37
2.4.3 Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba	38
2.4.4 Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Manajemen Laba.....	39
2.4.5 Moderasi Ukuran Perusahaan pada Hubungan antara Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba	40
2.4.6 Moderasi Ukuran Perusahaan pada Hubungan antara Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba	42
2.4.7 Moderasi Ukuran Perusahaan pada Hubungan antara Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba.....	43
2.4.8 Moderasi Ukuran Perusahaan pada Hubungan antara <i>Leverage</i> terhadap Manajemen Laba	45
2.4.9 Interaksi Keseluruhan antara Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, dan <i>Leverage</i> terhadap Manajemen Laba...	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1 Metode Penelitian.....	48
3.2 Definisi Operasional Variabel	48
3.2.1 Variabel Dependen	49
3.2.2 Variabel Independen	49
3.2.3 Variabel Moderasi	51
3.3 Populasi dan Sampel.....	51
3.3.1 Populasi Penelitian	51
3.3.2 Sampel Penelitian.....	51
3.4 Teknik Pengumpulan Data	53
3.5 Metode Analisis	54
3.5.1 Statistik Deskriptif	55
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	55
3.5.2.1 Uji Normalitas	55
3.5.2.2 Uji Multikolinearitas.....	56
3.5.3 Uji Heteroskedastisitas	57

3.5.2.4 Uji AutoKorelasi.....	57
3.6 Pengujian Hipotensis	58
3.6.1 Analisis Regresi Berganda.....	58
3.6.1.1 Uji Signifikan Parsial (Uji-t).....	59
3.6.1.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji-f).....	59
3.6.1.3 Uji Koefisien Determinan (R ²)	60
3.6.2 Analisis Regresi Moderate (Moderated Regression Analysis-MRA) ...	60
3.6.3 Uji Hipotensis	61
BAB IV GAMBARAN OBYEK PENELITIAN	63
4.1 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	63
4.1.1 PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN)	63
4.1.2 PT Binakarya Jaya Abadi Tbk. (BIKA)	64
4.1.3 PT Bukit Darmo Property Tbk. (BKDP).....	64
4.1.4 PT Sentul City Tbk. (BKSL)	64
4.1.5 PT Ciputra Development Tbk. (CTRA)	65
4.1.6 PT Duta Anggada Realty Tbk. (DART)	65
4.1.7 PT Intiland Development Tbk (DILD).....	66
4.1.8 PT Bakrieland Development Tbk (ELTY)	66
4.1.9 PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD)	67
4.1.10 PT Perdana Gapuraprima (GPRA).....	67
4.1.11 PT Indonesian Paradise Property Tbk (INPP)	68
4.1.12 PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA)	68
4.1.13 PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK).....	69
4.1.14 PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR).....	69
4.1.15 PT Star Pacific Tbk (LPLI).....	70
4.1.16 PT Modernland Realty Tbk (MDLN)	70
4.1.17 PT Metropolitan Kentjana Tbk (MKPI)	71
4.1.18 PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP).....	71
4.1.19 PT Metropolitan Land Tbk. (MTLA).....	71
4.1.20 PT Metro Realty Tbk. (MTSM).....	72
4.1.21 PT City Retail Development Tbk. (NIRO).....	72
4.1.22 PT Plaza Indonesia Realty Tbk (PLIN).....	72

4.1.23 PT Pudjiadi Prestige Tbk. (PUDP).....	73
4.1.24 PT Pakuwon Jati Tbk.(PWON).....	73
4.1.25 PT Roda Vivatex Tbk.(RDTX)	73
4.1.26 PT Pikko Land Development Tbk. (RODA)	74
2.1.27 PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM)	74
2.1.28 PT Summarecon Agung Tbk (SMRA)	75
4.1.29 PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk (CSIS).....	75
4.1.30 PT Kota Satu Properti Tbk. (SATU)	75
4.1.31 PT Pollux Hotels Group Tbk. (POLI)	76
4.1.32 PT Bima Sakti Pertiwi Tbk. (PAMG).....	76
4.1.33 PT Perintis Trinitas Tbk. (TRIN)	76
4.1.34 PT Makmur Berkah Amanda Tbk. (AMAN).....	77
4.1.35 PT Era Graharealty Tbk. (IPAC).....	77
BAB V ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	78
5.1 Analisis Data Penelitian	78
5.1.1 Uji Statistik Deskriptif	78
5.2 Uji Asumsi Klasik.....	81
5.2.1 Uji Normalitas.....	81
5.2.2 Uji Multikolinearitas	83
5.2.3 Uji Heterokedastisitas	85
5.2.4 Uji AutoKorelasi	86
5.3 Pengujian Hipotesis	86
5.3.1 Analisis Regresi Berganda.....	87
5.3.1.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji t).....	87
5.3.1.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	89
5.3.1.3 Uji Koefisiensi Determinasi (R ²).....	90
5.3.2 Analisis Regresi Moderat (<i>Moderated Regression Analysis</i> – MRA). 91	
5.4 Pembahasan Hasil Penelitian	93
5.4.1 Pengaruh Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba	93
5.4.2 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba	95
5.4.3 Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba	97
5.4.4 Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Manajemen Laba.....	99

5.4.5 Moderasi Ukuran Perusahaan pada Hubungan antara Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba	100
5.4.6 Moderasi Ukuran Perusahaan pada Hubungan antara Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba	102
5.4.7 Moderasi Ukuran Perusahaan pada Hubungan antara Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba.....	104
5.4.8 Moderasi Ukuran Perusahaan pada Hubungan antara <i>Leverage</i> terhadap Manajemen Laba	105
5.4.9 Interaksi Keseluruhan antara Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, dan Leverage terhadap Manajemen Laba.	107
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	112
6.1 Kesimpulan	112
6.2. Saran	114
Daftar Pustaka	115
LAMPIRAN	118

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perbandingan Pendapatan Emiten Properti Kuartal III tahun 2021 & 2022 dalam miliar	2
Tabel 1.2. Perbandingan Laba Bersih/Rugi Emiten Properti Kuartal III tahun 2021 & 2022 dalam miliar.....	4
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 3.1. Hasil Seleksi Sampel.....	52
Tabel 3.2. Daftar Sampel Perusahaan.....	52
Tabel 5.1. Hasil Statistik Deskriptif.....	79
Tabel 5.2. Hasil Uji Normalitas.....	82
Tabel 5.3. Hasil Uji Multikolinearitas.....	84
Tabel 5.4. Hasil Uji Heterokedastisitas.....	85
Tabel 5.5. Hasil Uji Autokorelasi.....	86
Tabel 5.6. Hasil Uji Parsial (Uji t).....	88
Tabel 5.7. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	89
Tabel 5.8. Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R^2).....	90
Tabel 5.9. Hasil Analisis Regresi Moderate (MRA).....	91
Tabel 5.10. Hasil Uji Hipotesis.....	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual.....	35
Gambar 5.1. Grafik Normal P-Plot	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Perhitungan.....	119
Lampiran 2. Hasil Perhitungan Manajemen Laba	122
Lampiran 3. Hasil Perhitungan Aset Pajak Tangguhan.....	128
Lampiran 4. Hasil Perhitungan Beban Pajak Tangguhan.....	133
Lampiran 5. Hasil Perhitungan Perencanaan Pajak	138
Lampiran 6. Hasil Perhitungan Leverage.....	144
Lampiran 7. Hasil Perhitungan Ukuran Perusahaan.....	149
Lampiran 8. Hasil Output SPSS	154
Lampiran 9. Tabel Durbin Watson (DW)	159
Lampiran 10. Tabel Uji F	160
Lampiran 11. Tabel Uji f.....	161

ABSTRAK

Windy Aditya Aprilianawati “Peran Ukuran Perusahaan Dalam Memoderasi Hubungan Antara Strategi Perpajakan Dan Manajemen Laba”. Dengan Dosen Pembimbing I, Dr. Martinus Robert Hutaeruk, SE, Ak, MM dan Dosen Pembimbing II, Bapak Firmansyah, S.E.,M.Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, dan *Leverage* terhadap Manajemen Laba, serta menguji peran Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan 35 perusahaan selama empat tahun (2020–2024), menghasilkan 175 sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan bantuan SPSS versi 27 melalui regresi linear berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA), serta uji asumsi klasik, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aset Pajak Tangguhan, dan Beban Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba, sedangkan Perencanaan Pajak dan *Leverage* tidak berpengaruh signifikan. Hasil uji moderasi menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh Aset Pajak Tangguhan, dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba, namun tidak mampu memoderasi pengaruh Perencanaan Pajak dan *Leverage*. Secara simultan, keempat variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik manajemen laba tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil dari interaksi strategi keuangan dan perpajakan yang kompleks serta karakteristik perusahaan, salah satunya ukuran perusahaan.

Kata kunci: manajemen laba, aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, perencanaan pajak, *leverage*, ukuran perusahaan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri Real Estate dan Property termasuk di antara berbagai sektor terpenting dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini memainkan peran strategis dalam penyediaan infrastruktur dan perumahan serta berkontribusi signifikan terhadap PDB negara. Perusahaan–Perusahaan di sektor ini beroperasi dalam lingkungan yang sangat kompetitif, dengan tekanan untuk menjaga kinerja keuangan, termasuk dalam hal pengelolaan pajak, *leverage*, dan manajemen laba. Sering kali, dalam upaya untuk menjaga daya tarik bagi investor dan pihak lain yang terlibat, Periode 2020 hingga 2023 memberikan gambaran yang signifikan mengenai bagaimana sektor ini menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang mempengaruhi pertumbuhan laba perusahaan. Berbagai faktor ekonomi, termasuk dampak pandemi COVID-19 dan perubahan kebijakan pemerintah, menjadi elemen penting yang mempengaruhi kinerja perusahaan di sektor ini.

Menurut (Anindya, 2020) manajemen laba adalah proses penyesuaian laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen untuk mencerminkan kondisi dan kinerja perusahaan sesuai tujuan yang diinginkan. Menurut (Agustia, 2018). menambahkan bahwa proses ini bisa melibatkan penyesuaian pengakuan pendapatan dan beban. Tujuannya adalah agar informasi yang disajikan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan, sehingga laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan.

Salah satu tujuan manajemen laba adalah memaksimalkan laba yang dilaporkan. Ini penting karena pendapatan perusahaan menjadi dasar untuk berbagai keputusan strategis, seperti investasi, kebijakan manajerial jangka panjang, dan perhitungan pajak (Fitrian, 2021). Oleh karena itu, perusahaan sering menggunakan berbagai strategi, termasuk strategi perpajakan, dalam pelaporan keuangan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Tabel 1. 1. Perbandingan Pendapatan Emiten Properti Kuartal III tahun 2021&2022 dalam miliar

No.	Emiten	Pendapatan Q3 2022	Pendapatan Q3 2021	Perubahan Pendapatan
1.	PWON	4.490	3.780	18,78%
2.	BSDE	7.140	5.160	38,37%
3.	CTRA	7.220	6.640	8,69%
4.	SMRA	4.210	3.780	11,13%
5.	DILD	1.920	1.820	5,21%
6.	LPKR	10.750	7.490	44,20%
7.	DMAS	1.256,22	1.307,21	-3,91%
8.	ASRI	4.493,5	2.847,3	57,8%
9.	JRPT	2.260	2.177	3,89%
10.	MTLA	995	596	67%

Sumber: www.cnbcindonesia.com/

Pandemi COVID-19 sempat menekan sektor properti, tetapi data tahun 2022 menunjukkan indikasi pemulihan yang kuat. Pemulihan ini tercermin dari peningkatan pendapatan sejumlah emiten properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.1. Mayoritas emiten tersebut berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan pada kuartal III 2022 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) mencatatkan peningkatan pendapatan tertinggi, yaitu sebesar 67%, dari Rp596 miliar pada Q3 2021 menjadi Rp995 miliar

pada Q3 2022. Diikuti oleh PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) yang mengalami pertumbuhan sebesar 57,8%, dari Rp2.847,3 miliar menjadi Rp4.493,5 miliar. Selanjutnya, PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 44,20%, dari Rp7.490 miliar menjadi Rp10.750 miliar.

Sementara itu, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) menunjukkan peningkatan sebesar 38,37%, dari Rp5.160 miliar menjadi Rp7.140 miliar. PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) juga mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 18,78%, dari Rp3.780 miliar menjadi Rp4.490 miliar. Pada PT Ciputra Development Tbk (CTRA), yakni sebesar 8,69%, dari Rp6.640 miliar menjadi Rp7.220 miliar, serta PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) yang tumbuh 11,13%, dari Rp3.780 miliar menjadi Rp4.210 miliar.

Di sisi lain, PT Intiland Development Tbk (DILD) mencatatkan pertumbuhan yang lebih rendah, yakni 5,21%, dari Rp1.820 miliar menjadi Rp1.920 miliar. PT Jaya Real Property Tbk (JRPT) juga hanya mengalami peningkatan tipis sebesar 3,89%, dari Rp2.177 miliar menjadi Rp2.260 miliar. Sementara itu, satu-satunya emiten dalam daftar ini yang mengalami penurunan pendapatan adalah PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS), yakni sebesar -3,91%, dari Rp1.307,21 miliar menjadi Rp1.256,22 miliar.

Secara keseluruhan, data mengindikasikan tren pemulihan pendapatan pada mayoritas perusahaan properti di Indonesia, sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi pascapandemi. Namun, perlu dicatat bahwa peningkatan pendapatan tidak selalu paralel dengan peningkatan laba bersih. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh

berbagai faktor, seperti tingginya beban bunga dan pajak, atau penerapan kebijakan akuntansi tertentu. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mungkin menerapkan strategi pengelolaan laba tertentu, termasuk strategi perpajakan, dalam pelaporan keuangan.

Tabel 1. 2.Perbandingan Laba Bersih/Rugi Emiten Properti Kuartal III tahun 2021&2022 dalam miliar

No.	Emiten	Laba Bersih/Rugi Q3 2022	Laba Bersih/Rugi Q3 2021	Perubahan Laba Bersih/Rugi
1.	PWON	138	80	72,80%
2.	BSDE	918	931	-1,33%
3.	CTRA	152	105	50,50%
4.	SMRA	309	170	81,69%
5.	DILD	-91,2	-77,23	-0,41%
6.	LPKR	-573,29	-2.340	-75,5%
7.	DMAS	767,59	757,32	+1,36%
8.	ASRI	1.086	145,7	+645%
9.	JRPT	860,9	768,9	+11,83%
10.	MTLA	269	202	+33%

Sumber: www.cnbcindonesia.com/

Meskipun pendapatan secara umum meningkat, kondisi laba bersih yang ditampilkan pada Tabel 1.2 menunjukkan variasi yang signifikan. Tidak semua emiten properti berhasil mencatatkan pertumbuhan laba; bahkan, beberapa di antaranya mengalami penurunan atau tetap membukukan kerugian.

PT. ASRI (Alam Sutera Realty Tbk) mencatatkan pertumbuhan laba bersih tertinggi, yaitu +645%, dari Rp145,7 miliar menjadi Rp1.086 miliar. Kenaikan ini menunjukkan pemulihan yang sangat kuat, yang dapat dipengaruhi oleh efisiensi operasional atau strategi pengakuan pendapatan tertentu. PT. SMRA (Summarecon Agung Tbk) mengalami kenaikan laba sebesar 81,69%, dari Rp170,44 miliar menjadi Rp309,67 miliar, menunjukkan peningkatan profitabilitas yang signifikan.

PT. PWON (Pakuwon Jati Tbk) mencatat kenaikan laba sebesar 72,80%, dari Rp800 miliar menjadi Rp1.380 miliar, sejalan dengan penguatan pendapatan dan manajemen biaya yang baik. PT. CTRA (Ciputra Development Tbk) juga menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan laba 50,50%, dari Rp1.010 miliar menjadi Rp1.520 miliar.

PT. MTLA (Metropolitan Land Tbk) mencatatkan pertumbuhan laba sebesar 33%, dari Rp202 miliar menjadi Rp269 miliar. PT. JRPT (Jaya Real Property Tbk) mengalami kenaikan laba sebesar 11,83%, dari Rp768,9 miliar menjadi Rp860,9 miliar. PT. DMAS (Puradelta Lestari Tbk) juga mencatat kenaikan tipis sebesar +1,36%, dari Rp757,32 miliar menjadi Rp767,59 miliar.

Di sisi lain, terdapat emiten yang menunjukkan hasil kurang menguntungkan. PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) mengalami penurunan laba sebesar 1,33%, dari Rp931 miliar menjadi Rp918 miliar. PT Intiland Development Tbk (DILD) masih mencatat rugi bersih, bahkan mengalami peningkatan kerugian dari Rp77,23 miliar menjadi Rp91,2 miliar, atau sekitar 0,41%. Sementara itu, PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) masih mencatat kerugian besar meskipun terjadi perbaikan dari rugi sebesar Rp2.340 miliar menjadi Rp573,29 miliar. Penurunan kerugian sebesar 75,5%.

Perbedaan antara peningkatan pendapatan dan laba bersih pada perusahaan properti mengindikasikan bahwa kenaikan pendapatan tidak selalu berbanding lurus dengan laba bersih. Kondisi ini dapat muncul akibat berbagai faktor, termasuk beban operasional yang tinggi, efisiensi biaya yang belum optimal, atau

kemungkinan adanya praktik manajemen laba. Oleh karena itu, disparitas signifikan antara kedua metrik ini menjadi dasar penting untuk meneliti lebih lanjut faktor-faktor yang memengaruhi manajemen laba pada perusahaan properti.

Penelitian ini mengkaji beberapa aspek terkait manajemen laba di sektor properti. Pertama, perencanaan pajak merupakan strategi penting untuk meminimalkan beban pajak, namun praktik ini juga dapat menimbulkan manajemen laba yang tidak transparan. (Dewi & Jati, K. W., 2014) menemukan adanya hubungan signifikan antara manipulasi laba dengan perencanaan pajak. Kedua, aset dan beban pajak tangguhan berpotensi memengaruhi pengakuan laba dan mendorong manipulasi laba (Utomo & Chariri, 2020). Terakhir, tingginya utang (leverage) dapat menekan perusahaan untuk melaporkan laba yang lebih baik. Namun, temuan penelitian mengenai pengaruh leverage ini masih bervariasi (Nurdiniah & Herlina, 2015) menemukan tidak ada pengaruh signifikan, sedangkan (Utari & Sari, 2016) menemukan pengaruh positif leverage terhadap praktik manajemen laba.

Ukuran perusahaan bertindak sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara perencanaan pajak, aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, leverage, dan manajemen laba. Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki sumber daya dan pengawasan yang lebih baik, sehingga praktik manajemen laba mungkin berbeda dari perusahaan yang lebih kecil (Machdar & Nurdiniah, 2021).

Berdasarkan teori agensi, muncul konflik kepentingan antara manajer (sebagai agen) dan pemilik (sebagai prinsipal). Manajer memiliki kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan pribadinya, yang salah satunya diwujudkan melalui praktik manajemen laba demi memperoleh kompensasi atau menjaga reputasi. Penelitian terbaru oleh (Anggraeni & Yuniarta, 2023) menunjukkan bahwa manajer sering memanfaatkan fleksibilitas dalam pelaporan akuntansi dan strategi perpajakan untuk mengelola laba demi mencapai target kinerja yang ditetapkan pemilik.

Teori sinyal didasarkan pada asumsi asimetri informasi, yaitu ketidakseimbangan informasi antara manajemen perusahaan dan pihak eksternal. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki prospek keuangan yang baik akan berupaya mengirimkan sinyal positif kepada investor. Sinyal ini bisa diwujudkan melalui berbagai tindakan, seperti pengelolaan pajak yang efektif atau pelaporan kinerja yang stabil (Machdar & Nurdiniah, 2021).

Menurut (Setiawan & Raharja, 2018) perencanaan pajak adalah strategi yang sah untuk menekan beban pajak dengan tetap mematuhi regulasi. Praktik ini menjadi sangat penting di sektor properti dan real estat, terutama akibat tekanan finansial dan ketidakstabilan laba yang dipicu oleh pandemi COVID-19 (Utomo & Chariri, 2020). Menurut (Fauzi & Abdurrahman, 2018) optimalisasi pajak dapat meningkatkan laba bersih dan daya tarik perusahaan bagi investor. Selain itu, berdasarkan teori sinyal, perencanaan pajak dapat dilihat sebagai upaya manajemen memberikan sinyal positif kepada investor bahwa perusahaan mampu mengelola beban pajak secara efisien untuk meningkatkan profitabilitas. (Putri & Harahap,

2021) menemukan bahwa pada perusahaan dengan pengawasan lemah, perencanaan pajak sering kali digunakan sebagai alat manajemen laba.

Menurut (Rahayu & Machdar, 2019) aset pajak tangguhan merupakan pajak penghasilan yang dapat dikompensasi di periode mendatang, yang timbul dari perbedaan waktu pengakuan dan pemanfaatan kompensasi kerugian fiskal. Dari sudut pandang teori sinyal, pengakuan aset ini menunjukkan upaya manajer untuk memberikan informasi mengenai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan kepada pihak eksternal. Fleksibilitas yang dimiliki manajer dalam membuat proyeksi laba memungkinkan aset pajak tangguhan digunakan sebagai sinyal kinerja. Dengan demikian, pengelolaan aset pajak tangguhan berfungsi sebagai strategi manajemen laba untuk menyampaikan sinyal positif mengenai kemampuan perusahaan dalam memenuhi target kinerja dan menjaga reputasinya di mata para pemangku kepentingan.

Beban pajak tangguhan timbul akibat adanya perbedaan waktu dalam pengakuan pendapatan dan beban antara standar akuntansi (PSAK) dan ketentuan perpajakan. Perbedaan ini, terutama koreksi fiskal negatif, terjadi saat pendapatan akuntansi lebih tinggi dari pendapatan fiskal, atau beban fiskal lebih besar dari beban akuntansi (Machdar & Nurdiniah, 2021). Kondisi ini dapat mencerminkan upaya manajemen untuk meningkatkan laba sebelum pajak, sebagai bagian dari strategi membangun citra positif di mata investor. Berdasarkan teori agensi, praktik tersebut muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, di mana manajer berupaya memaksimalkan kepentingannya

dengan menampilkan kinerja keuangan yang lebih baik melalui pengelolaan beban pajak tangguhan.

Menurut (Riyanto, 2016), leverage mengukur sejauh mana aset perusahaan didanai oleh utang. Rasio leverage yang tinggi dapat menekan manajemen untuk menjaga reputasi keuangan guna menghindari risiko gagal bayar. Tekanan ini memotivasi manajer untuk menyajikan laba yang lebih tinggi agar dapat menarik kepercayaan kreditor dan investor. Temuan penelitian mengenai hubungan antara leverage dan manajemen laba menunjukkan hasil yang perbedaan temuan dalam penelitian (Utari & Sari, 2016) menemukan adanya pengaruh positif, sementara (Nurdiniah & Herlina, 2015) tidak menemukan pengaruh yang signifikan, terutama pada perusahaan dengan utang yang lebih rendah. Dalam konteks teori agensi, tingginya leverage memperkuat konflik kepentingan antara manajer dan pihak luar, yang mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba demi melindungi citra perusahaan.

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan berperan sebagai variabel moderasi yang memengaruhi hubungan antara variabel-variabel strategis seperti perencanaan pajak, aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, dan leverage terhadap manajemen laba. Umumnya, perusahaan besar memiliki sumber daya dan pengawasan yang lebih baik (Machdar & Nurdiniah, 2021) sehingga cenderung memiliki insentif yang lebih rendah untuk melakukan manajemen laba. Sebaliknya, perusahaan kecil lebih sering menggunakan praktik manajemen laba untuk menarik investor (Putri & Harahap, 2018). Berdasarkan teori sinyal, ukuran perusahaan menentukan cara perusahaan mengirimkan sinyal tentang kinerja dan stabilitasnya

perusahaan besar melakukannya melalui transparansi, sementara perusahaan kecil mungkin menggunakan manajemen laba sebagai alat untuk menunjukkan performa positif.

Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dari studi sebelumnya oleh Humayra et al. (2022) yang menganalisis pengaruh aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba di industri manufaktur. Fokus ini adalah pada sektor properti dan real estat, yang memiliki dinamika perpajakan dan pengelolaan laba yang berbeda. Selain itu, penelitian ini diperluas dengan memasukkan leverage sebagai variabel independen dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi, sebuah pendekatan yang belum menjadi fokus utama dalam studi sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi manajemen laba di sektor ini.

Perbedaan utama lainnya adalah rentang waktu penelitian yang lebih mutakhir, yaitu tahun 2020 hingga 2024. Periode ini relevan karena mencakup dampak langsung pandemi COVID-19 yang menyebabkan perubahan signifikan dalam kebijakan fiskal dan strategi perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan konteks yang lebih terkini dalam menganalisis praktik manajemen laba.

Perbedaan signifikan penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik pada sektor properti dan real estat. Selain itu, penelitian ini memperkenalkan leverage sebagai variabel independen baru dan ukuran perusahaan sebagai variabel

moderasi. Dengan menggunakan rentang waktu yang lebih mutakhir, yakni 2020 hingga 2024, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih relevan tentang praktik manajemen laba di tengah tantangan pascapandemi COVID-19.

Sektor properti dan real estat memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, tetapi menghadapi tantangan besar terkait pengelolaan pajak dan utang, terutama selama periode fluktuasi ekonomi 2020-2024. Manajemen laba sering digunakan sebagai strategi untuk menjaga stabilitas keuangan dan menarik perhatian pemangku kepentingan. Berdasarkan hal ini, penelitian ini berjudul *“Peran Ukuran Perusahaan dalam Memoderasi Hubungan antara Strategi Perpajakan dan Manajemen Laba.”*

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Aset Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate?
2. Apakah Beban Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba pada perusahaan Sektor Properti dan Real Estate?
3. Apakah Perencanaan Pajak berpengaruh signifikan praktik Manajemen Laba pada perusahaan Sektor Properti dan Real Estate?
4. Apakah *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap keputusan Manajemen Laba pada perusahaan Sektor Properti dan Real Estate?
5. Apakah Ukuran Perusahaan mampu memoderasi Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba?

6. Apakah Ukuran Perusahaan mampu memoderasi Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba?
7. Apakah Ukuran Perusahaan mampu memoderasi Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba?
8. Apakah Ukuran Perusahaan mampu memoderasi *Leverage* terhadap Manajemen Laba?
9. Apakah Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, dan *Leverage* secara keseluruhan berpengaruh terhadap Manajemen Laba?

1.3 Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya akan berfokus pada perusahaan yang terdaftar di sektor Properti dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk sektor lain.
2. Penelitian ini akan dibatasi pada periode tahun 2020 hingga 2024, mengingat adanya perubahan regulasi perpajakan dan kondisi ekonomi yang signifikan selama periode tersebut.
3. Penelitian ini akan membatasi analisis pada empat variabel independen, yaitu Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, dan *Leverage*, serta satu variabel moderasi, yaitu Ukuran Perusahaan. Variabel lain yang dapat mempengaruhi Manajemen Laba tidak akan dibahas dalam penelitian ini.
4. Penelitian ini mendefinisikan Manajemen Laba sebagai upaya manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan dengan cara tertentu untuk mencapai

target laba tertentu, tanpa membahas secara mendalam praktik-praktik manajemen laba yang lebih luas.

5. Penelitian ini mungkin dipengaruhi oleh ketersediaan dan akurasi data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yang akan diekstrak dari laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan mengevaluasi pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba pada perusahaan sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Menentukan seberapa besar pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap praktik Manajemen Laba di sektor Properti dan Real Estate.
3. Menganalisis bagaimana Perencanaan Pajak memengaruhi praktik Manajemen Laba pada perusahaan sektor Properti dan Real Estate.
4. Mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak dari tingkat *Leverage* terhadap keputusan Manajemen Laba di sektor Properti dan Real Estate.
5. Meneliti bagaimana Ukuran Perusahaan memoderasi hubungan antara Aset Pajak Tangguhan dan Manajemen Laba.
6. Menganalisis bagaimana ukuran perusahaan memoderasi hubungan antara Beban Pajak Tangguhan dan Manajemen Laba.
7. Menilai sejauh mana Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba.
8. Meneliti bagaimana Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh *Leverage* terhadap Manajemen Laba.

9. Menganalisis keseluruhan interaksi antara Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, dan *Leverage* dalam mempengaruhi Manajemen Laba.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a) Berpartisipasi dalam pengembangan ilmu akuntansi terutama dalam Manajemen Laba, Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, dan *Leverage* di perusahaan sektor Properti dan Real Estate di Indonesia.
- b) Memperluas pemahaman dan memberikan referensi bagi sarjana lain yang ingin menyelidiki masalah manajemen laba dan variabel yang mempengaruhinya.
- c) Memberikan bukti empiris mengenai peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, *Leverage*, dan Manajemen Laba.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan wawasan kepada para pemimpin bisnis Property dan Real Estate mengenai pengelolaan pajak tangguhan, *Leverage* dan perencanaan pajak untuk mengoptimalkan kinerja pelaporan keuangan dan mengurangi aktivitas administrasi Pengelolaan pendapatan yang tidak sehat.
- b) Membantu investor dan pemegang saham memahami faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba sehingga dapat mengambil

keputusan investasi yang lebih baik berdasarkan analisis laporan keuangan.

- c) Memberikan referensi kepada pemerintah dan regulator tentang pentingnya pemantauan aktivitas manajemen laba dan pengaturan terkait pajak tangguhan dan perencanaan pajak untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan perusahaan di sektor Property dan Real Estate.

3. Manfaat Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan perusahaan dalam mengevaluasi kebijakan perpajakan, leverage dan akuntansinya untuk meminimalkan risiko manipulasi laporan keuangan dan meningkatkan transparansi informasi keuangan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan semuanya tercakup dalam bab pendahuluan ini.

BAB II : DASAR TEORI

Bab ini, yang mencakup kerangka konseptual dan hipotesis, menguraikan ide-ide yang mendukung penelitian ini serta yang berkaitan dengan pemahaman variabel yang akan diteliti.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, Teknik pengumpulan data, metode analisis, serta pengujian hipotesis.

BAB IV : GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan dan gambaran umum objek yang akan diteliti.

BAB V : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil pengolahan data penelitian sesuai dengan metode penelitian yang digunakan dan menjelaskan terkait hasil penelitian dengan disertai pendapat yang logis sesuai dengan topik penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran untuk penelitian yang akan mendatang.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu adalah acuan untuk dilakukannya penelitian bagaimana hasil penelitian tersebut dapat diuji Kembali dikarenakan tidak konsistenan dari penelitian tersebut.

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu

No.	Judul & Penulis	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	(Nurdiniah & Herlina, 2016). Pengaruh <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba	Variabel Independen (X): <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan Variabel Dependen (Y): Manajemen laba	Menemukan bahwa <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, tetapi ukuran perusahaan memiliki dampak yang signifikan.	Belum memasukkan variabel aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, dan perencanaan pajak.
2.	(Riyanto, 2016). Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada Sektor Properti	Variabel Independen (X): <i>Leverage</i> Variabel Dependen (Y): Kinerja keuangan	Menyimpulkan bahwa <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan di sektor property.	Fokus penelitian pada kinerja keuangan, bukan pada manajemen laba.
3.	(Utari & Sari, 2017). Pengaruh Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur	Variabel Independen (X): Struktur modal, ukuran Perusahaan Variabel Dependen (Y): Manajemen laba	Menyimpulkan bahwa struktur modal berpengaruh positif terhadap manajemen laba, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif.	Menggunakan struktur modal, bukan leverage maupun variabel pajak tangguhan.

4.	(Christiani L & Herawaty, 2019) Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Moderasi	Variabel Indepen (X): Kepemilikan Manajerial, komite audit, <i>leverage</i> , profitabilitas ,dan ukuran Perusahaan Variabel Dependen(Y): Nilai Perusahaan Variabel Moderasi (Z): Manajemen Laba	Menyimpulkan bahwa Kepemilikan manajerial, profitabilitas, dan ukuran perusahaan mempengaruhi nilai perusahaan, sementara manajemen laba, komite audit, <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh.	Manajemen laba digunakan sebagai variabel moderasi, bukan sebagai variabel dependen.
5.	(Wibowo & Pramono, 2019) Peran Ukuran Perusahaan sebagai Moderasi dalam Hubungan antara <i>Leverage</i> dan Manajemen Laba	Variabel Independen (X): <i>Leverage</i> , ukuran Perusahaan Variabel Dependen (Y): Manajemen laba	Menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan memoderasi hubungan antara <i>leverage</i> dan manajemen laba dengan cara yang signifikan.	Penelitian difokuskan pada peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.
6.	(Rahayu & Machdar, 2019). Pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	Variabel Independen (X): Aset pajak tangguhan Variabel Dependen (Y): Kinerja keuangan	Menyimpulkan bahwa aset pajak tangguhan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.	Fokus penelitian pada kinerja keuangan, bukan pada manajemen laba.
7.	(Abdurrahman, 2020) Analisis Pengaruh <i>Leverage</i> dan Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba	Variabel Independen (X): <i>Leverage</i> , aset pajak tangguhan	Menyimpulkan bahwa baik <i>leverage</i> maupun aset pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.	Belum meneliti perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan.

8.	(Fitria & Yulianto, 2021) Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Retail	Variabel Independen (X): Perencanaan pajak, beban pajak tangguhan Variabel Dependen (Y): Manajemen laba	Menyimpulkan bahwa perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.	Tidak meneliti leverage dan ukuran perusahaan.
9.	(Humayra, Andika, & Rosmawati, 2022) Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba, 2022) Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba	Variabel Independen (X): Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, dan Perencanaan Pajak Variabel Dependen (Y): Manajemen Laba	Menyimpulkan bahwa aset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sementara perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.	Tidak meneliti leverage dan ukuran perusahaan.
10	(Astuti & Sari, 2022) Pengaruh Manajemen Laba terhadap Kinerja Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi	Variabel Independen (X): Manajemen laba Variabel Dependen (Y): Kinerja Perusahaan Variabel Moderasi (Z): Ukuran Perusahaan	Menemukan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, dan ukuran perusahaan berfungsi sebagai moderasi.	Manajemen laba dijadikan variabel independen, bukan variabel dependen.

sumber: data diolah (2025)

2.2 Dasar Teori

Landasan teori menyajikan penjelasan sistematis pada ide–ide yang diterapkan dalam penelitian ini, sehingga penelitian dapat berjalan secara terstruktur dan terfokus dalam membangun kerangka konseptual.

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Agensi menjadi landasan penting dalam pengelolaan perusahaan, terutama ketika terjadi pemisahan antara pihak pemilik (pemegang saham) dan pihak pengelola (manajemen). Berdasarkan teori ini, pemegang saham adalah prinsipal yang mendelegasikan wewenang kepada manajemen, yang berperan sebagai agen, untuk menjalankan operusahaan sesuai dengan kepentingan (Yuliza & Fitri, 2020).

Menurut (Ira nurandina, 2020) yang mengacu pada konsep yang dikembangkan (Jensen & Meckling, 1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara satu atau lebih pihak pemilik (*principal*) yang menunjuk pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan tugas atau jasa tertentu atas nama pemilik, termasuk memberikan wewenang kepada *agent* untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan.

Dalam teori agensi, perbedaan kepentingan antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajer sebagai *agent* berpotensi menimbulkan konflik keagenan. Salah satu konsekuensinya adalah praktik manajemen laba, yaitu upaya manajemen memodifikasi laporan keuangan agar sesuai dengan ekspektasi pemilik atau pasar. Beban pajak tangguhan dapat dimanfaatkan melalui perbedaan temporer antara laba

akuntansi dan laba kena pajak untuk menyesuaikan pelaporan laba. Sementara itu, *leverage* berfungsi ganda: di satu sisi sebagai mekanisme disiplin melalui kewajiban pembayaran bunga, namun di sisi lain meningkatkan tekanan bagi manajemen untuk menampilkan kinerja positif. Oleh karena itu, beban pajak tangguhan, *leverage*, dan manajemen laba saling berkaitan sebagai bentuk respons manajemen terhadap tuntutan pemegang saham maupun kreditur.

2.2.2 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori Sinyal (*Signaling Theory*), yang pertama kali dikemukakan oleh (Spence, 1973) menjelaskan bagaimana manajemen perusahaan memberikan informasi atau "sinyal" kepada pihak eksternal, terutama investor. Tujuannya adalah untuk mengurangi asimetri informasi kondisi di mana manajemen memiliki data internal yang lebih lengkap dibandingkan pihak luar. Dalam konteks ini, laporan keuangan menjadi alat penting untuk mengirimkan sinyal positif (kinerja baik) atau negatif (kinerja buruk) kepada investor, yang akan memengaruhi kepercayaan dan nilai perusahaan.

Menurut (Himawan & Andayani, 2020) teori sinyal, perusahaan dengan kualitas tinggi dapat mempengaruhi nilai perusahaan dengan secara tidak langsung mengirimkan sinyal yang menguntungkan ke pasar. Menurut (Brigham & Houston, 2019) teori sinyal merupakan suatu aksi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana perusahaan memandang prospek perusahaan.

Aset pajak tangguhan dan perencanaan pajak berperan sebagai sinyal kemampuan manajemen dalam mengelola laba sekaligus meningkatkan efisiensi pemanfaatan pajak perusahaan. Ukuran perusahaan memengaruhi kredibilitas sinyal tersebut, karena perusahaan berskala besar cenderung lebih berhati-hati dalam menyajikan informasi untuk menjaga kepercayaan investor. Dengan demikian, ketiga variabel tersebut saling terkait dan memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba.

2.2.3 Teori Akuntansi Perpajakan

Menurut buku “akuntansi pajak edisi 7 karya (waluyo, 2020;34) akuntansi pajak merupakan proses penetapan besarnya pajak terutang yang didasarkan pada laporan keuangan perusahaan, dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang mengatur konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukuran, serta pelaporan secara khusus. Praktik akuntansi pajak tidak hanya mencakup pencatatan, pengukuran, dan pelaporan kewajiban pajak, tetapi juga berfungsi sebagai alat strategis bagi manajemen dalam mengelola beban pajak secara legal, mendukung pengambilan keputusan keuangan, dan meningkatkan kinerja perusahaan.

Akuntansi pajak merupakan cabang akuntansi yang memfokuskan pada pencatatan, pelaporan, dan analisis kewajiban pajak yang dimiliki oleh individu maupun badan usaha. Konsep dasar akuntansi pajak mencakup prinsip-prinsip dan praktik yang digunakan untuk mengelola serta melaporkan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam konteks akuntansi, akuntansi

pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, tetapi juga sebagai sarana perencanaan pajak yang efektif.

Penerapan akuntansi pajak yang efektif memungkinkan perusahaan mencerminkan kewajiban pajak secara akurat dalam laporan keuangan sekaligus mengoptimalkan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak secara legal. Dengan demikian, akuntansi pajak berperan penting dalam pengambilan keputusan keuangan yang berdampak pada kinerja dan keberlanjutan perusahaan.

2.2.4 Laporan keuangan

Menurut (Haryono, 2011;12) laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang mencakup pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan analisis data keuangan suatu entitas. Pencatatan dan penggolongan dilakukan secara rutin setiap terjadi transaksi keuangan, sedangkan pelaporan dan analisis biasanya dilakukan pada periode tertentu.

Teori laporan keuangan menjelaskan tujuan, fungsi, dan prinsip penyusunan laporan keuangan sebagai sarana komunikasi informasi keuangan perusahaan kepada pemangku kepentingan. Laporan keuangan dirancang untuk memberikan gambaran wajar mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan selama periode tertentu. Tujuan penyusunannya adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

1. Jenis-jenis laporan keuangan

laporan keuangan dibagi menjadi beberapa jenis – jenis laporan keuangan ini memiliki fungsi dan tujuan masing-masing. Berikut adalah jenis-jenis laporan keuangan:

a) Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan utama yang menyajikan informasi kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini memuat data mengenai laba sebelum pajak, beban pajak, dan laba bersih setelah pajak pada periode akuntansi terkait.

b) Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan, atau neraca, merupakan bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Laporan ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Dalam penelitian ini, laporan posisi keuangan digunakan untuk memperoleh data terkait aset pajak tangguhan, total aset, total utang, dan total ekuitas perusahaan.

c) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini diklasifikasikan ke dalam tiga aktivitas utama, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Dalam penelitian ini, fokus diberikan pada arus kas dari aktivitas operasi, yang mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari kegiatan utamanya.

2.2.5 Manajemen Laba

Menurut (Setiawan & Kusuma, 2023) manajemen laba adalah upaya perusahaan untuk mengatur laporan keuangan secara strategis guna mencapai tujuan tertentu, seperti menarik investor atau memenuhi target kinerja. Praktik ini sering dilakukan melalui penyesuaian pengakuan pendapatan dan pengeluaran agar hasil keuangan tampak lebih stabil atau sesuai ekspektasi pasar, dan umumnya lebih sering terjadi pada perusahaan yang menghadapi tekanan kinerja tinggi.

Menurut (Sugiri & Susilowati, 2021) manajemen laba adalah praktik manajer yang memodifikasi elemen tertentu dalam laporan keuangan untuk menyesuaikan ukuran laba, dengan memanfaatkan berbagai teknik dan prosedur yang tetap sesuai aturan akuntansi. Dalam penelitian ini, manajemen laba diukur menggunakan Metode Discretionary Accrual Modified Jones Model (Sugiri & Susilowati, 2021) dengan rumus sebagai berikut:

- a) Menghitung total akrual:

$$TA_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

- b) Menentukan koefisien dari regresi akrual:

$$\frac{TA_{it}}{A_{it-1}} = \beta_1 \left(\frac{1}{C} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right)$$

- c) Menentukan *nondiscretionary accrual*:

$$NDA_{it} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right)$$

- d) Menentukan *discretionary accrual*:

$$DA_{it} = \left(\frac{TA_{it}}{A_{it-1}} \right) - NDA_{it}$$

Keterangan: TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada tahun t
 NI_{it} = Laba bersih perusahaan i pada periode ke t
 CFO_{it} = Aliran kas aktivitas operasi perusahaan i pada periode t
 A_{it-1} = Total aset perusahaan i pada akhir tahun t
 ΔREV_{it} = Perubahan pendapatan dari penjualan perusahaan pada tahun t dari tahun $t-1$
 PPE_{it} = Aset tetap perusahaan i pada tahun t
 NDA_{it} = Nondiscretionary accrual perusahaan i pada tahun t
 ΔREC_{it} = Perubahan piutang bersih perusahaan i pada tahun t dari tahun $t-1$
 DA_{it} = Discretionary accrual perusahaan i pada tahun t

Dalam penelitian ini, manajemen laba diukur menggunakan total akrual, karena metode ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sejauh mana laba dipengaruhi oleh akrual atau transaksi non-kas yang berpotensi dimanipulasi manajemen (Sugiri & Susilowati, 2021). Komponen akrual, yang tidak melibatkan arus kas aktual, sering dimanfaatkan untuk rekayasa laba melalui percepatan atau penundaan pengakuan pendapatan dan beban. Oleh karena itu, total akrual dianggap sebagai indikator yang tepat untuk mendeteksi praktik manajemen laba.

2.2.6 Aset Pajak Tangguhan

Menurut (Cahyono & Putri, 2022) aset pajak tangguhan timbul akibat perbedaan jangka pendek antara laba fiskal dan laba akuntansi, serta menjadi indikator potensi manfaat pajak di masa depan. Pengelolaan aset pajak tangguhan yang baik dapat mendukung strategi pajak perusahaan yang lebih efisien.

Menurut (Susilo & Lestari, 2022) aset pajak tangguhan muncul ketika perusahaan membayar pajak lebih tinggi daripada yang seharusnya berdasarkan laba akuntansi. Pengakuan aset pajak tangguhan memberikan indikasi penting bagi investor mengenai kesehatan keuangan perusahaan, karena mencerminkan potensi

manfaat pajak di masa depan. Penanganan yang efektif terhadap aset pajak tangguhan juga dapat mendukung strategi pajak perusahaan yang lebih efisien. Pengukuran aset pajak tangguhan dilakukan menggunakan beberapa indikator, yaitu:

a. Rasio Aset Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Asset Ratio*)

Rasio Aset Pajak Tangguhan adalah ukuran yang dapat digunakan untuk menilai proporsi aset pajak tangguhan terhadap total aset perusahaan. Rasio Aset Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Asset Ratio*) dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{rasio aset pajak tangguhan} = \frac{\text{aset pajak tangguhan}}{\text{total aset}} \times 100\%$$

Sumber: (Cahyono & Putri, 2022)

b. *Annual Persistence of Temporary Differences* (APT)

Annual Persistence of Temporary Differences (APT) adalah alat yang penting untuk menilai keberlanjutan perubahan dalam aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan perusahaan. *Annual Persistence of Temporary Differences* (APT) dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$APT_{it} = \frac{\Delta \text{aset pajak tangguhan}_{it}}{\text{aset pajak tangguhan}_{t-1}}$$

Sumber: (Surya & Hadi, 2022)

Aset pajak tangguhan dalam penelitian ini diukur menggunakan Rasio Aset Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Asset Ratio*), karena rasio ini menggambarkan proporsi total aset yang berkaitan dengan pajak tangguhan (Cahyono & Putri, 2022). Rasio ini juga memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kesehatan

keuangan perusahaan, khususnya dalam pengelolaan pajak dan antisipasi kewajiban pajak di masa depan.

2.2.7 Beban Pajak Tangguhan

Menurut (Nugroho & Sari, 2023) beban pajak tangguhan adalah pajak yang harus dibayarkan di masa mendatang akibat perbedaan jangka pendek antara laba fiskal dan laba akuntansi. Beban ini mencerminkan pajak yang ditangguhkan akibat perbedaan pengakuan pendapatan dan pengeluaran antara laporan keuangan akuntansi dan peraturan pajak.

Menurut (Rahayu & Ramadhani, 2022) beban pajak tangguhan merupakan kewajiban yang timbul ketika jumlah pajak yang jatuh tempo melebihi pajak yang dibayarkan. Pengelolaan beban pajak tangguhan penting dalam perencanaan pajak yang efektif untuk mengurangi kewajiban pajak di masa mendatang. Pengakuan beban pajak tangguhan memungkinkan perusahaan merencanakan dan mengelola kewajiban pajak secara lebih efisien. Pengukuran beban pajak tangguhan dilakukan menggunakan beberapa indikator, yaitu:

a. Rasio Beban Pajak Tangguhan

Rasio Beban Pajak Tangguhan adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi aset pajak tangguhan (DTA) terhadap total aset yang dimiliki oleh usaha. Rasio Beban Pajak Tangguhan dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Beban Pajak Tangguhan} = \frac{\text{aset pajak tangguhan}}{\text{total aset}} \times 100\%$$

Sumber: (Astuti & Hidayat, 2022)

b. Perbandingan Beban Pajak Tangguhan

Perbandingan Beban Pajak Tangguhan mengacu pada perbandingan antara beban pajak tangguhan yang timbul pada suatu periode tertentu dengan periode sebelumnya, atau dengan total beban pajak perusahaan. Perbandingan beban pajak tangguhan dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Perbandingan Beban Pajak Tangguhan} = \frac{\text{beban pajak tangguhan}}{\text{laba sebelum pajak}} \times 100\%$$

Sumber: (Nugroho & Sari, 2023)

c. Dampak Beban Pajak Tangguhan

Dampak Beban Pajak Tangguhan mengacu pada perubahan yang terjadi pada laporan keuangan perusahaan akibat fluktuasi dalam aset pajak tangguhan (DTA) atau liabilitas pajak tangguhan (DTL). Dampak beban pajak tangguhan dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\begin{aligned} &\text{dampak beban pajak tangguhan} \\ &= \text{kinerja keuangan} \div \text{beban pajak tangguhan} \end{aligned}$$

Sumber: (Kusnadi & Wulandari, 2022)

Beban pajak tangguhan dalam penelitian ini diukur menggunakan perbandingan beban pajak tangguhan, karena metode ini memberikan pemahaman mengenai pengaruh pajak tangguhan terhadap laba sebelum pajak perusahaan (Astuti & Hidayat, 2022). Pengukuran ini juga meningkatkan transparansi bagi

pemangku kepentingan dan mempermudah evaluasi kinerja pengelolaan pajak perusahaan.

2.2.8 Perencanaan Pajak (X3)

Menurut (Kurniawan & Rahayu, 2023), perencanaan pajak adalah prosedur yang digunakan perusahaan untuk mengelola kewajiban pajak secara efisien, mengoptimalkan pengurangan pajak, dan meminimalkan risiko perpajakan di masa depan. Strategi perencanaan pajak ini penting untuk mencapai tujuan keuangan perusahaan sekaligus memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut (Putri & Handayani, 2022) perencanaan pajak adalah memaksimalkan keuntungan pajak dengan merencanakan pengakuan pendapatan dan pengeluaran serta memanfaatkan ketentuan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Perencanaan pajak yang efektif mendukung pengambilan keputusan perusahaan yang lebih tepat. Pengukuran perencanaan pajak dilakukan menggunakan beberapa indikator, yaitu:

a) Efektivitas Perencanaan Pajak (ETR)

Efektivitas Perencanaan Pajak (ETR) mengukur persentase pembayaran pajak sebagai persentase pendapatan perusahaan. Efektivitas Perencanaan Pajak (ETR) dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{efektivitas perencanaan pajak} = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{laba sebelum pajak}} \times 100\%$$

Sumber: (Putri & Handayani, 2022)

b) Dampak Perencanaan Pajak

Dampak Perencanaan Pajak adalah konsekuensi yang timbul akibat strategi perpajakan yang diterapkan, baik itu dampak positif maupun negatif, terhadap kinerja keuangan, kepatuhan pajak, arus kas, serta profitabilitas perusahaan. Dampak Perencanaan Pajak dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{dampak perencanaan pajak} = \frac{\text{profitabilitas}}{\text{total pengeluaran pajak}} \times 100\%$$

Sumber: (Sari & Puspitasari, 2022)

Dalam penelitian ini, perencanaan pajak diukur menggunakan efektivitas perencanaan pajak, karena metode ini memberikan pemahaman mengenai seberapa baik perusahaan mengelola kewajiban pajak dan pengaruhnya terhadap laba bersih (Putri & Handayani, 2022). Pengukuran ini juga membantu mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan terkait pengelolaan pajak.

2.2.9 Leverage (X4)

Menurut (Susanti & Rudianto, 2023) leverage adalah penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan untuk meningkatkan potensi pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham. Penggunaan leverage dapat meningkatkan laba per saham, namun juga menimbulkan risiko kebangkrutan yang lebih tinggi jika pendapatan perusahaan tidak sesuai harapan.

Menurut (Hendrawan & Sari, 2022) leverage merujuk pada proporsi utang dalam struktur modal perusahaan. Penggunaan leverage dapat memberikan

keuntungan jika perusahaan mampu menghasilkan pengembalian lebih tinggi daripada biaya utang, namun leverage yang berlebihan meningkatkan risiko finansial. Pengukuran leverage dilakukan menggunakan beberapa indikator, yaitu:

a) *Debt to Asset Ratio (DAR)*

Debt to Asset Ratio (DAR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana usaha menggunakan utang untuk membiayai aset-asetnya.

Debt to Asset Ratio (DAR) dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$DAR = \frac{\text{total utang}}{\text{total aset}}$$

Sumber: (Pramudito & Indrawati, 2022)

b) *Long-Term Debt To Equity*

Rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas menunjukkan proporsi utang jangka panjang perusahaan dibandingkan ekuitas yang dimiliki pemegang saham. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{long-term debt to equity} = \frac{\text{utang jangka panjang}}{\text{ekuitas pemegang saham}}$$

Sumber: (Fatmawati & Maulana, 2022)

c) *Debt-to-Equity Ratio (DER)*

Salah satu metode untuk mengukur proporsi utang perusahaan terhadap ekuitas adalah melalui rasio utang terhadap ekuitas (*Debt-to-Equity Ratio*, DER). Rasio ini dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{total utang}}{\text{total ekuitas}}$$

Sumber: (Yulianto & Arifin, 2022)

Dalam penelitian ini, leverage diukur menggunakan Debt-to-Equity Ratio (DER), karena rasio ini memberikan pemahaman mengenai struktur modal perusahaan dan proporsi pendanaan melalui utang maupun ekuitas (Yulianto & Arifin, 2022). Rasio ini berguna untuk menilai kesehatan keuangan, kebijakan pembiayaan, serta sejauh mana perusahaan mengandalkan utang dalam operasionalnya.

2.2.10 Ukuran Perusahaan (Z)

Menurut (Prasetyo & Handayani, 2023) ukuran perusahaan merupakan angka yang mewakili ruang lingkup operasional dan asetnya. Ukuran ini, yang menunjukkan seberapa besar atau kecilnya perusahaan dalam kaitannya dengan bisnis lain, sering dihitung menggunakan total aset atau total pendapatan.

Menurut (Yuliana, 2021) ukuran perusahaan diwakili oleh logaritma natural ($\ln$) dari total aset, yang mencerminkan kekuatan keuangan dan dapat memengaruhi nilai perusahaan. Seiring bertambahnya ukuran, aktivitas perusahaan juga meningkat, sehingga berfungsi sebagai jaminan dalam memperoleh dana eksternal. Oleh karena itu, nilai perusahaan umumnya lebih tinggi pada perusahaan yang lebih besar. Pengukuran ukuran perusahaan dilakukan menggunakan beberapa indikator, yaitu:

a) Ukuran Perusahaan Berdasarkan Total Aset

Ukuran Perusahaan berdasarkan total aset merupakan Nilai keseluruhan aset perusahaan, baik lancar atau tidak mulus. Ukuran Perusahaan berdasarkan total aset dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$ukuran\ perusahaan = Ln\ (total\ aset)$$

Sumber: (Santoso & Lestari, 2023)

b) Ukuran Perusahaan Berdasarkan Total Penjualan

Ukuran perusahaan berdasarkan total penjualan menunjukkan seberapa besar pendapatan yang dihasilkan perusahaan dari penjualan barang atau jasa selama periode tertentu. Ukuran ini dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$ukuran\ perusahaan = in\ (total\ penjualan)$$

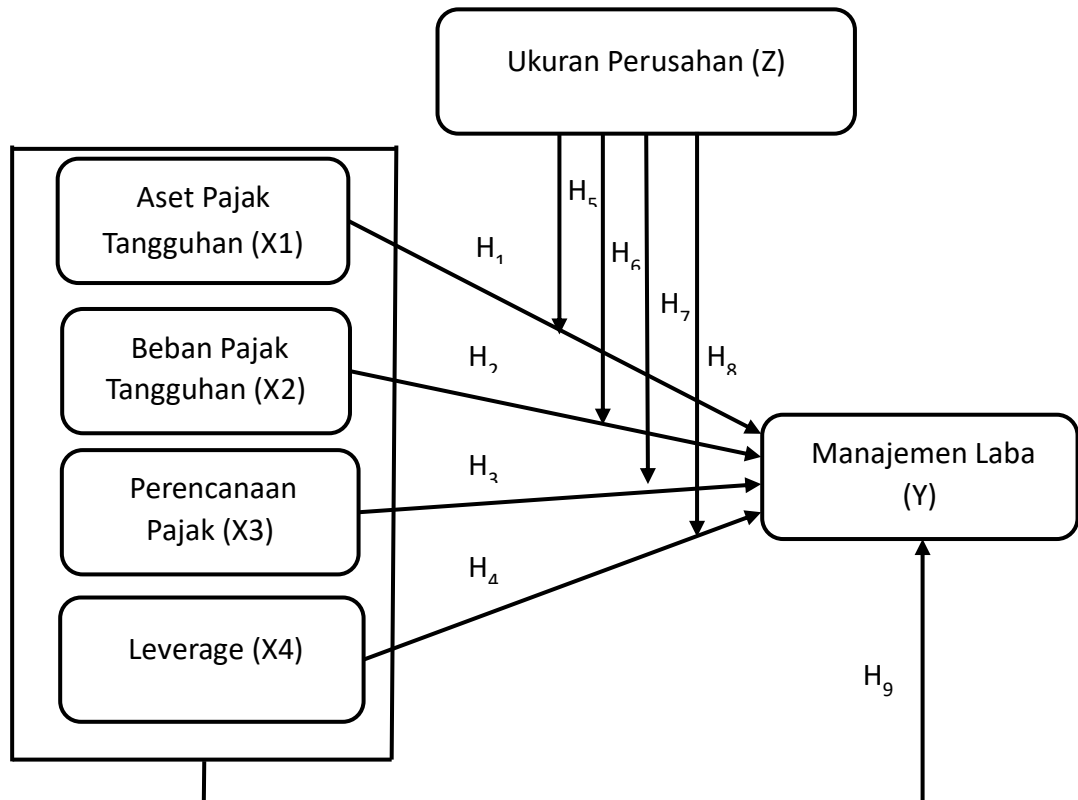
Sumber: (Rahmawati & Pratama, 2022)

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur menggunakan total aset karena metode ini memberikan beberapa keunggulan dalam analisis keuangan (Santoso & Lestari, 2023). Pengukuran berbasis total aset membantu menormalkan data, mengurangi dampak perbedaan skala antarperusahaan, serta meningkatkan stabilitas analisis keuangan.

2.3 Kerangka Konseptual

Model konseptual dalam konteks penelitian merujuk pada sebuah gambaran atau representasi yang menggambarkan hubungan antara berbagai konsep atau variabel yang ada dalam suatu fenomena yang diteliti. Model ini berfungsi sebagai alat untuk memahami dan mengorganisir ide-ide atau konsep-konsep yang relevan dalam penelitian.

Gambar 2. 1. Kerangka Konseptual



Sumber: Diolah penulis (2025)

2.4 Hipotesis atau Pernyataan Penelitian

Model konseptual dalam konteks penelitian merujuk pada sebuah gambaran atau representasi yang menggambarkan hubungan antara berbagai konsep atau variabel yang ada dalam suatu fenomena yang diteliti. Model ini berfungsi sebagai alat untuk memahami dan mengorganisir ide-ide atau konsep-konsep yang relevan dalam penelitian.

2.4.1 Pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Menurut (Susilo & Lestari, 2022) aset pajak tangguhan timbul ketika suatu entitas membayar pajak melebihi kewajiban berdasarkan laba akuntansi. Pengakuan

aset ini memberikan sinyal positif kepada investor terkait prospek keuangan perusahaan karena mencerminkan potensi manfaat pajak di masa depan.

Dalam perspektif teori sinyal, aset pajak tangguhan digunakan manajemen sebagai instrumen untuk menyampaikan sinyal positif kepada investor dan kreditor mengenai kondisi keuangan perusahaan. Pengakuan atau pengungkapan yang tepat mencerminkan prospek keuangan yang sehat dan stabil, sekaligus membuka peluang praktik manajemen laba untuk menyesuaikan laporan keuangan agar kinerja tampak menguntungkan, sehingga ekspektasi investor terpenuhi dan kepercayaan pasar meningkat.

Aset pajak tangguhan berkaitan erat dengan manajemen laba, karena memungkinkan perusahaan mengatur waktu pengakuan pendapatan dan beban untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan. Pengelolaan aset pajak tangguhan memberikan kendali lebih pada manajemen atas kewajiban pajak dan dampaknya terhadap laba, sehingga dapat digunakan untuk mencapai tujuan manajerial maupun pasar.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Saputri, 2019) yang menyatakan bahwa aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba. Studi lain oleh (Fitriany L. C., 2016) juga menunjukkan pengaruh positif aset pajak tangguhan terhadap praktik manajemen laba. Sebaliknya, penelitian (Anggraini, 2018) menemukan bahwa aset pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

H₁: Aset pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba

2.4.2 Pengaruh beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Menurut (Kusnadi & Wulandari, 2022) beban pajak tangguhan merupakan kewajiban pajak yang timbul akibat perbedaan antara laba akuntansi dan pendapatan kena pajak. Pengakuan beban ini membantu perusahaan dalam perencanaan strategis dan pengawasan tanggung jawab pajak secara efektif.

Dalam perspektif teori agensi, beban pajak tangguhan dapat menimbulkan asimetri informasi antara manajemen (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Manajemen terdorong untuk mengelola pengakuan dan besaran beban pajak tangguhan sebagai bagian dari strategi manajemen laba, guna menghaluskan fluktuasi laba dan menjaga citra perusahaan. Praktik ini bertujuan menyesuaikan ekspektasi investor, mengurangi tekanan pasar, dan mempertahankan posisi manajerial.

Beban pajak tangguhan erat kaitannya dengan praktik manajemen laba karena memungkinkan perusahaan mengendalikan tanggung jawab pajak di masa depan, yang berdampak pada pendapatan yang dilaporkan. Fleksibilitas pengelolaan beban ini memungkinkan manajemen menyesuaikan laba sesuai kebutuhan manajerial atau tujuan tertentu, seperti memenuhi ekspektasi pasar.

Temuan penelitian ini sejalan dengan (Wati et al., 2023) serta (Cahyani, 2021) yang menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Namun, hasil bertolak belakang ditemukan dalam studi (Sules, M, & Hartini, 2020) serta (Wulandari & Kurniawan, 2021),

yang menyatakan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Ketidaksignifikanan ini disebabkan oleh ketatnya regulasi perpajakan yang membatasi ruang gerak manajemen dalam memanipulasi beban pajak tangguhan sebagai alat manajemen laba.

H₂: Beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba

2.4.3 Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

Menurut (Kurniawan & Rahayu, 2023) perencanaan pajak adalah upaya perusahaan untuk mengelola kewajiban pajak secara optimal dengan memaksimalkan efisiensi, memanfaatkan insentif pajak, dan mengurangi potensi kewajiban di masa depan, sambil tetap mematuhi peraturan perpajakan.

Dalam perspektif teori sinyal, perencanaan pajak digunakan manajemen untuk memberikan sinyal positif kepada investor mengenai kemampuan mengelola sumber daya dan prospek keuangan perusahaan. Strategi perencanaan pajak yang efektif mencerminkan kemampuan perusahaan meminimalkan beban fiskal secara legal dan meningkatkan efisiensi operasional, sekaligus berpotensi membuka peluang praktik manajemen laba untuk menampilkan kinerja yang lebih menguntungkan.

Perencanaan pajak dan manajemen laba memiliki keterkaitan erat karena perusahaan mengelola pajak dan laba secara bersamaan. Perencanaan pajak bertujuan meminimalkan kewajiban pajak secara sah, sementara manajemen laba mengatur laba yang dilaporkan untuk mencapai tujuan manajerial. Perusahaan dapat menggunakan perencanaan pajak untuk mempengaruhi manajemen laba

dengan mengendalikan waktu pengakuan pajak dan biaya sehingga mempengaruhi laba yang dilaporkan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil studi (Lubis, 2020) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sebaliknya, hasil ini konsisten dengan (Apriyanti, 2017) yang menegaskan pengaruh signifikan perencanaan pajak terhadap praktik manajemen laba. Namun, hasil ini berbeda dengan studi (Mulyani et al.,) serta (Wibowo & Limajatini, 2023) menemukan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba karena sifatnya yang lebih teknis dan berorientasi pada efisiensi pajak daripada rekayasa laba.

H₃: Perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba

2.4.4 Pengaruh *Leverage* terhadap Manajemen Laba

Menurut (Hendrawan & Sari, 2022) leverage adalah proporsi utang dalam struktur modal perusahaan. Leverage dapat menguntungkan jika pengembalian melebihi biaya utang, namun penggunaan leverage yang berlebihan meningkatkan risiko finansial.

Dalam perspektif teori agensi, *leverage* berperan sebagai mekanisme pengendalian yang membatasi penggunaan dana secara tidak efisien melalui kewajiban pembayaran bunga. Namun, *leverage* juga dapat dimanfaatkan manajemen untuk melakukan manajemen laba guna menjaga kinerja keuangan di hadapan kreditor dan investor. Dengan demikian, *leverage* berfungsi sekaligus

sebagai sumber pendanaan dan instrumen strategis yang memengaruhi keputusan serta pelaporan keuangan perusahaan.

Leverage berkaitan erat dengan manajemen laba karena tingkat utang yang tinggi mendorong insentif bagi perusahaan untuk mengelola laba yang dilaporkan. Kewajiban bunga, komitmen utang, dan risiko kebangkrutan memotivasi perusahaan melakukan manajemen laba agar memenuhi tanggung jawab keuangan dan menjaga reputasi di mata investor dan kreditor. Perusahaan dengan *leverage* signifikan cenderung menggunakan strategi manajemen laba untuk menghasilkan laporan laba yang konsisten dan sesuai ekspektasi pasar.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhani et al., 2017) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. Temuan ini didukung oleh (Tambunan & Siagian, 2021) yang konsisten menyatakan pengaruh *leverage* terhadap manajemen laba. Namun, penelitian (Almadara, 2017) dan (Astriyanto & Sulestiyono, 2022) menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat utang bukan faktor utama dalam keputusan manajemen melakukan manipulasi laporan keuangan.

H₄: *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba

2.4.5 Moderasi Ukuran Perusahaan pada Hubungan antara Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Menurut (Putri & Sari, 2022) ukuran perusahaan dapat diukur melalui total aset, total pendapatan, atau jumlah karyawan. Perusahaan besar umumnya memiliki

akses pembiayaan lebih mudah dan stabilitas keuangan lebih tinggi dibanding perusahaan kecil.

Dalam perspektif teori sinyal, aset pajak tangguhan digunakan manajemen untuk menyampaikan sinyal positif mengenai kondisi keuangan perusahaan. Ukuran perusahaan memoderasi kekuatan sinyal ini, di mana perusahaan besar membuat sinyal lebih kredibel dan mudah diterima dibanding perusahaan kecil.

Ukuran perusahaan secara signifikan memengaruhi interaksi antara aset pajak tangguhan dan manajemen laba. Perusahaan besar, dengan sumber daya lebih banyak dan pengawasan yang ketat, cenderung lebih berhati-hati dalam praktik manajemen laba. Sebaliknya, perusahaan kecil memiliki fleksibilitas lebih besar untuk memanfaatkan aset pajak tangguhan dalam menyesuaikan keuntungan. Pendekatan pemanfaatan aset pajak tangguhan ini bervariasi sesuai ukuran dan struktur organisasi perusahaan.

Penelitian (Sari & Adi, 2020) menunjukkan bahwa aset pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba, namun efek tersebut berkurang pada perusahaan besar yang mendapatkan pengawasan lebih ketat. Hal serupa ditemukan oleh (Prasetyo & Astuti, 2021) yang menyatakan bahwa pengaruh aset pajak tangguhan lebih signifikan pada perusahaan kecil. Menurut (Novianti & Handayani, 2022) juga menyimpulkan bahwa aset pajak tangguhan berdampak positif terhadap manajemen laba, namun pengaruhnya melemah pada perusahaan besar akibat pengawasan eksternal yang lebih intensif.

H₅: Ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba

2.4.6 Moderasi Ukuran Perusahaan pada Hubungan antara Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Menurut (Hidayat & Ramadhani, 2022) ukuran perusahaan, yang biasanya diukur dengan logaritma alami total aset, mencerminkan kemampuan dan skala perusahaan dalam bersaing di pasar serta memengaruhi strategi bisnis, eksposur risiko, dan profitabilitas.

Dalam perspektif teori agensi, ukuran perusahaan memoderasi hubungan antara beban pajak tangguhan dan manajemen laba. Perusahaan besar dengan tingkat transparansi dan pengawasan eksternal yang tinggi memiliki ruang gerak terbatas bagi manajemen untuk memanfaatkan beban pajak tangguhan dalam mengatur laba. Sebaliknya, perusahaan kecil dengan pengawasan lebih rendah memiliki fleksibilitas lebih besar dalam praktik tersebut. Oleh karena itu, ukuran perusahaan dapat memperlemah atau memperkuat pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba.

Ukuran perusahaan secara signifikan memengaruhi hubungan antara beban pajak tangguhan dan strategi manajemen laba. Perusahaan besar cenderung menerapkan kebijakan strategis dalam mengelola beban pajak tangguhan sekaligus melakukan manajemen laba, sementara perusahaan kecil memiliki keterbatasan dalam perencanaan pajak dan manajemen laba. Faktor seperti kompleksitas organisasi, tujuan manajerial, dan pengawasan eksternal turut memengaruhi pendekatan pengelolaan pajak dan laba tangguhan.

Temuan penelitian (Prasetyo & Astuti, 2021) menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba, namun dampak positif ini lebih kecil pada perusahaan besar, khususnya di sektor properti. Temuan serupa ditemukan oleh (Sari & Adi, 2020) yang mengindikasikan bahwa pengawasan ketat pada perusahaan besar mengurangi efek beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Menurut (Novianti & Handayani, 2022) juga menyimpulkan bahwa efek positif beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba melemah pada perusahaan besar, sehingga ukuran perusahaan berperan sebagai variabel moderasi yang mengurangi hubungan tersebut.

H₆: Ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba

2.4.7 Moderasi Ukuran Perusahaan pada Hubungan antara Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

Menurut (Prasetyo & Handayani, 2023) ukuran perusahaan mencerminkan skala operasional dan aset yang dimiliki, umumnya diukur menggunakan total aset atau total penjualan sebagai indikator besar kecilnya perusahaan dibandingkan pesaing.

Dalam perspektif teori sinyal, perencanaan pajak digunakan manajemen untuk menyampaikan sinyal positif mengenai efisiensi pengelolaan sumber daya dan prospek keuangan perusahaan. Ukuran perusahaan memoderasi kekuatan sinyal ini, di mana perusahaan besar membuat sinyal lebih kredibel dan mudah diterima dibanding perusahaan kecil.

Ukuran perusahaan secara signifikan memengaruhi hubungan tersebut, dimana perusahaan besar cenderung menerapkan strategi pajak yang lebih maju dan manajemen laba yang lebih taktis. Sebaliknya, perusahaan kecil dengan keterbatasan sumber daya lebih bergantung pada manajemen laba karena kurangnya kemampuan menerapkan perencanaan pajak yang kompleks.

Menurut (Rahmawati & Pratama, 2022) menegaskan bahwa ukuran perusahaan, yang biasanya diukur dengan logaritma alami total aset, memengaruhi hubungan perencanaan pajak dan manajemen laba. Pada perusahaan besar, ukuran memperkuat hubungan tersebut melalui fasilitasi perencanaan pajak dan manajemen laba yang strategis, sementara pada perusahaan kecil, keterbatasan sumber daya memperlemah hubungan tersebut.

Secara umum, ukuran perusahaan mencerminkan skala bisnis berdasarkan total aset dan penjualan. Perusahaan besar dengan aset signifikan memiliki ruang lebih besar untuk meningkatkan kinerja dan laba, yang berimplikasi pada kewajiban pajak lebih tinggi. Oleh sebab itu, perusahaan besar cenderung berhati-hati dalam perencanaan pajak karena pengawasan otoritas pajak yang lebih ketat (Khairiyah & Herawaty, 2020).

H₇: ukuran Perusahaan mampu memoderasi perencanaan pajak terhadap manajemen laba

2.4.8 Moderasi Ukuran Perusahaan pada Hubungan antara *Leverage* terhadap Manajemen Laba

Menurut (Hakim & Dewi, 2022) ukuran perusahaan didefinisikan sebagai kapasitas dan sumber daya yang tercermin melalui nilai aset, pendapatan, atau kapitalisasi pasar.

Dalam perspektif teori agensi, ukuran perusahaan memoderasi hubungan antara *leverage* dan manajemen laba. Perusahaan besar dengan pengawasan ketat dari pemegang saham, regulator, dan publik memiliki ruang gerak terbatas untuk menggunakan *leverage* dalam praktik manajemen laba, sedangkan perusahaan kecil dengan pengawasan lebih rendah memiliki fleksibilitas lebih besar. Oleh karena itu, ukuran perusahaan dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh *leverage* terhadap manajemen laba.

Perusahaan besar cenderung lebih transparan dalam pengelolaan utang dan jarang melakukan manajemen laba agresif meskipun memiliki *leverage* tinggi. Sebaliknya, perusahaan kecil lebih rentan terhadap tekanan utang dan cenderung menggunakan manajemen laba untuk mengelola kewajiban utang karena keterbatasan sumber daya dan akses pembiayaan alternatif. Dengan demikian, ukuran perusahaan berperan sebagai variabel moderasi yang memengaruhi hubungan *leverage* dan manajemen laba.

Dalam kondisi kekurangan kas sementara biaya operasional meningkat akibat penjualan tinggi, perusahaan biasanya menghadapi utang atau menerbitkan saham tambahan (Kania, 2020). Perusahaan besar cenderung menerbitkan saham

tambahan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dan berupaya menyajikan laba tahunan yang stabil, meskipun terkadang melibatkan manipulasi laba untuk menarik investor dan kreditor.

Studi terdahulu oleh (Kania, 2020) serta (Setiawati & Ifgayani, 2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *leverage* terhadap manajemen laba. Namun, hasil tersebut bertentangan dengan penelitian (Febria, 2020) yang menyatakan bahwa perusahaan besar tidak mampu memoderasi dampak *leverage* terhadap manajemen laba.

H₈: Ukuran Perusahaan mampu memoderasi *leverage* terhadap manajemen laba

2.4.9 Interaksi Keseluruhan antara Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, dan *Leverage* terhadap Manajemen Laba

Interaksi antara aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, perencanaan pajak, *leverage*, dan manajemen laba mencerminkan kompleksitas pengelolaan pajak dan pelaporan keuangan. Perusahaan dengan *leverage* tinggi cenderung terdorong melakukan manajemen laba melalui perencanaan pajak serta pengaturan aset dan beban pajak tangguhan untuk mencapai hasil keuangan yang diinginkan, sedangkan perusahaan dengan *leverage* rendah memiliki insentif lebih kecil untuk praktik manajemen laba agresif, namun tetap menerapkan perencanaan pajak demi efisiensi fiskal.

Dalam perspektif teori sinyal, aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, perencanaan pajak, dan *leverage* digunakan manajemen untuk menyampaikan sinyal positif mengenai kondisi keuangan perusahaan. Dari perspektif teori agensi,

variabel-variabel tersebut juga berfungsi mengurangi *asimetri* informasi antara manajemen dan pemegang saham dengan menampilkan kinerja yang menguntungkan.

Menurut (Fitriani & Handayani, 2021) menemukan bahwa aset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Selain itu, perencanaan pajak yang efektif dapat mengurangi pengaruh negatif beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba. *Leverage* juga ditemukan memengaruhi kekuatan hubungan tersebut, dimana perusahaan dengan *leverage* tinggi lebih aktif dalam praktik manajemen laba.

Menurut (Yanti & Rahman, 2022) *Leverage* dapat memperkuat hubungan positif antara aset pajak tangguhan dan manajemen laba. Aset pajak tangguhan menjadi sinyal kemampuan perusahaan mengelola beban pajak secara optimal melalui perencanaan pajak. Namun, pada perusahaan besar, pengaruh ini melemah akibat pengawasan ketat regulator. Menurut (Lestari & Setiawan, 2020) menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba, meskipun perencanaan pajak yang efektif dapat mengurangi efek tersebut pada perusahaan besar. *Leverage* berperan sebagai faktor penguat dalam dinamika ini, memotivasi perusahaan melakukan manajemen laba untuk menjaga reputasi keuangan positif di mata pemangku kepentingan.

H₃: Interaksi Keseluruhan antara Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, dan Leverage berpengaruh terhadap Manajemen Laba

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sekunder dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan dan diolah pihak lain, tanpa melakukan pengamatan langsung. Penelitian termasuk jenis kuantitatif sesuai metodologi yang diterapkan. Menurut (Sugiyono, 2019), metode kuantitatif merupakan pendekatan positivistik yang empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2020–2024, yang diakses melalui situs resmi BEI di www.idx.co.id/id.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Menurut (Sugiyono, 2019) operasional variabel adalah penentu atau nilai yang dapat diamati pada objek atau kegiatan dengan variasi tertentu, yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan disimpulkan. Variabel tersebut dapat diukur secara relevan dan diantisipasi selama pelaksanaan penelitian. Penelitian ini menggunakan empat variabel independen (X), yaitu Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, dan Leverage; satu variabel dependen (Y), yaitu Manajemen Laba; serta satu variabel moderasi (Z), yaitu Ukuran Perusahaan.

3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi hasil dari variabel independen.

3.2.1.1 Manajemen Laba

Manajemen Laba adalah praktik manajer yang memodifikasi elemen tertentu dalam laporan keuangan untuk menyesuaikan ukuran laba dengan menggunakan teknik dan prosedur yang tetap sesuai aturan akuntansi. Dalam penelitian ini, manajemen laba diukur menggunakan Metode Discretionary Accrual Modified Jones Model dengan menghitung total akrual:

$$TA_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

Keterangan : TA_{it} = total akrual perusahaan i pada perusahaan t

NI_{it} = laba bersih perusahaan i pada periode ke t

CFO_{it} = aliran kas aktivitas operasi perusahaan i pada periode t

3.2.2 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel dependen.

3.2.2.1 Aset Pajak Tangguhan (X1)

Aset pajak tangguhan muncul akibat perbedaan sementara antara laba akuntansi dan laba fiskal, yang menunjukkan potensi manfaat pajak di masa depan. Pengukuran aset pajak tangguhan dilakukan menggunakan rasio aset pajak tangguhan.

$$\text{rasio aset pajak tangguhan} = \frac{\text{aset pajak tangguhan}}{\text{total aset}} \times 100\%$$

3.2.2.2. Beban Pajak Tangguhan (X2)

Beban pajak tangguhan adalah kewajiban yang diakui sebagai pajak yang harus dibayar di masa mendatang akibat perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara akuntansi dan perpajakan. Pengukuran beban pajak tangguhan dilakukan menggunakan perbandingan beban pajak tangguhan:

$$\begin{aligned} &\text{Perbandingan Beban Pajak Tangguhan} \\ &= \frac{\text{beban pajak tangguhan}}{\text{laba sebelum pajak}} \times 100\% \end{aligned}$$

3.2.2.3 Perencanaan Pajak (X3)

Perencanaan pajak adalah tindakan strategis untuk mengelola pajak secara optimal, termasuk pemilihan metode perpajakan dan pengaturan waktu pengakuan pendapatan serta beban. Pengukuran perencanaan pajak dilakukan menggunakan efektivitas perencanaan pajak.

$$\text{Efektivitas Perencanaan Pajak} = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{laba sebelum pajak}} \times 100\%$$

3.2.2.4 Leverage (X4)

Leverage adalah alat yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba dengan memanfaatkan dana pinjaman dari pihak ketiga. Pengukuran leverage dilakukan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER):

$$DER = \frac{\text{total utang}}{\text{total ekuitas}}$$

3.2.3 Variabel Moderasi

Variabel moderasi dalam penelitian ini berfungsi sebagai variabel yang mempengaruhi atau meningkatkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

3.2.3.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan ditandai dengan skala relatif yang diukur berdasarkan total aset, angka penjualan, dan jumlah karyawan. Indikator pengukuran ukuran perusahaan yang dapat diterapkan meliputi:

$$ukuran\ perusahaan = in (total\ aset)$$

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2019) populasi adalah kumpulan keseluruhan objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi fokus penelitian untuk memperoleh kesimpulan yang valid. Populasi dalam penelitian ini adalah 92 perusahaan sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 hingga 2024.

3.3.2 Sampel Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2019) sampel merupakan bagian atau segmen dari populasi yang memiliki karakteristik khusus sesuai dengan tujuan penelitian. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probabilitas, di mana setiap anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama

untuk terpilih menjadi sampel. Jenis pengambilan sampel non-probabilitas yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian. Adapun kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1. Hasil Seleksi Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian 2020–2024	92
2.	Total perusahaan sektor Properti dan Real Estate yang memenuhi kriteria penelitian	(57)
	Total Perusahaan Sektor Properti & Real Estate	35
	Lama periode penelitian	5 tahun
	Total sampel keseluruhan	175

Sumber: data diolah, (2025)

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan menerapkan kriteria tertentu untuk memilih sampel. Sampel terdiri dari 35 perusahaan yang beroperasi selama rentang waktu 5 tahun. Dengan demikian, total data yang dianalisis dalam penelitian ini berjumlah 175 data ($35 \text{ perusahaan} \times 5 \text{ tahun}$).

Tabel 3. 2. Daftar Sampel Perusahaan

No.	Kode	Nama Perusahaan
1	APLN	Agung Podomoro Land Tbk.
2	BIKA	Binakarya Jaya Abadi Tbk.
3	BKDP	Bukit Darmo Property Tbk
4	BKSL	Sentul City Tbk.
5	CTRA	Ciputra Development Tbk.

6	DART	Duta Anggada Realty Tbk.
7	DILD	Intiland Development Tbk.
8	ELTY	Bakrieland Development Tbk.
9	GMTD	Gowa Makassar Tourism Developm
10	GPRA	Perdana Gapuraprima Tbk.
11	INPP	Indonesian Paradise Property T
12	KIJA	Kawasan Industri Jababeka Tbk.
13	LPCK	Lippo Cikarang Tbk
14	LPKR	Lippo Karawaci Tbk.
15	LPLI	Star Pacific Tbk
16	MDLN	Modernland Realty Tbk.
17	MKPI	Metropolitan Kentjana Tbk.
18	MMLP	Mega Manunggal Property Tbk.
19	MTLA	Metropolitan Land Tbk.
20	MTSM	Metro Realty Tbk.
21	NIRO	City Retail Developments Tbk.
22	PLIN	Plaza Indonesia Realty Tbk.
23	PUDP	Pudjiadi Prestige Tbk.
24	PWON	Pakuwon Jati Tbk.
25	RDTX	Roda Vivatex Tbk
26	RODA	Pikko Land Development Tbk.
27	SMDM	Suryamas Dutamakmur Tbk.
28	SMRA	Summarecon Agung Tbk.
29	CSIS	Cahayasakti Investindo Sukses
30	SATU	Kota Satu Properti Tbk.
31	POLI	Pollux Hotels Group Tbk.
32	PAMG	Bima Sakti Pertiwi Tbk.
33	TRIN	Perintis Trinita Properti Tbk.
34	AMAN	Makmur Berkah Amanda Tbk.
35	IPAC	Era Graharealty Tbk.

Sumber: www.idx.co.id/id, data diolah,(2025)

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memanfaatkan teknik dokumentasi sebagai metode pengumpulan data yang berhubungan dengan data perusahaan terkini dan memungkinkan pengunduhan laporan secara langsung, seperti laporan keuangan perusahaan sektor Properti dan Real Estate yang tersedia pada situs resmi Bursa

Efek Indonesia. Adapun tahapan dalam pengumpulan dan pengolahan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Pengumpulan data Pada

tahap ini penulis akan mengumpulkan fakta tentang bisnis, seperti sejarahnya dan laporan keuangan yang diperlukan untuk penelitian dan pembuatan sampel.

2) Menganalisis dan mengolah data

Setelah data dan informasi terkumpul, peneliti melakukan pengujian serta analisis terhadap pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, dan *Leverage* terhadap Manajemen Laba dengan memanfaatkan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi.

3) Menarik kesimpulan dan hasil penelitian

Berdasarkan hasil analisis dan kajian data yang telah dilakukan, peneliti menyusun kesimpulan serta memberikan saran terkait pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, dan *Leverage* terhadap Manajemen Laba dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi.

3.5 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS) versi 27 untuk windows dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh. Beberapa tes statistik, termasuk statistik deskriptif.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Menurut (Ghozali, 2016) uji statistik deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai data dengan menganalisis karakteristik variabel penelitian. Melalui pengukuran seperti varians, deviasi standar, nilai maksimum, nilai minimum, serta nilai rata-rata, uji ini mampu menyajikan ringkasan menyeluruh dari data yang diamati. Selain itu, uji statistik deskriptif berfungsi untuk mengidentifikasi satu atau lebih variabel tanpa harus membandingkan antar variabel atau membangun korelasi di antara variabel-variabel tersebut.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Menurut (Ghozali, 2016) uji asumsi klasik diperlukan untuk memastikan variabel penelitian layak dan sesuai dianalisis. Uji ini menjamin validitas hasil regresi linier berganda sebelum pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, untuk memastikan model regresi memenuhi asumsi dasar serta menghasilkan analisis yang valid dan reliabel.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk menentukan apakah variabel dependen, independen, atau keduanya dalam model regresi memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Model regresi yang efektif idealnya menggunakan data terdistribusi normal, karena uji statistik seperti uji-t dan uji-F mengasumsikan residual mengikuti distribusi normal. Pelanggaran asumsi ini dapat menurunkan

validitas hasil uji, terutama pada sampel kecil. Penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk menilai normalitas residual, dengan keputusan berdasarkan kriteria berikut:

1. Jika nilai signifikansi (p-value) $> 0,05$, maka data dianggap berdistribusi normal.
2. Jika nilai signifikansi (p-value) $\leq 0,05$, maka data dianggap tidak berdistribusi normal.

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Menurut (Ghozali, 2016) uji multikolinearitas dilakukan untuk menilai ada atau tidaknya hubungan antarvariabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan korelasi yang signifikan antarvariabel independen, karena multikolinearitas dapat mengganggu kestabilan dan interpretasi koefisien regresi.

Identifikasi multikolinearitas dapat dilakukan dengan memeriksa nilai tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Tolerance mengukur seberapa besar proporsi variabel independen yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya, sedangkan VIF merupakan kebalikan dari tolerance dan menunjukkan seberapa besar varians koefisien regresi meningkat akibat multikolinearitas. Adapun kriteria penentuan multikolinearitas adalah jika nilai tolerance $\leq 0,10$ atau VIF ≥ 10 , maka model dianggap mengalami multikolinearitas.

1. Jika nilai tolerance $> 0,10$, maka tidak terdapat multikolinearitas yang signifikan antarvariabel independen. Jika nilai tolerance $\leq 0,10$, maka terdapat indikasi multikolinearitas antarvariabel independen.
2. Jika nilai VIF < 10 , maka tidak terdapat multikolinearitas yang signifikan. Jika nilai VIF ≥ 10 , maka terdapat indikasi multikolinearitas yang tinggi antarvariabel independen.

5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2016) Uji heteroskedastisitas Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah nilai residual suatu pengamatan berbeda secara tidak sama dengan pengamatan lain di dalam model regresi. model tanpa regresi heteroskedastisitas dianggap sebagai berkualitas tinggi. Dengan syarat ketentuan sebagai berikut:

- a) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.
- b) Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka artinya terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

3.5.2.4 Uji AutoKorelasi

Uji AutoKorelasi berfungsi untuk menentukan apakah ada hubungan antara data yang dikumpulkan dalam periode tertentu. Dalam konteks model regresi linier, uji ini dapat membantu mengidentifikasi apakah terdapat korelasi antara periode saat ini dengan periode sebelumnya. Jika ditemukan korelasi, masalah autokorelasi dapat muncul. Autokorelasi sendiri terjadi akibat adanya pengamatan yang

berurutan dan saling terkait, sebagaimana dijelaskan oleh (Ghozali, 2016). Pengetesan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (uji DW), yang memiliki beberapa ketentuan sebagai syarat:

- a) Jika Durbin-Watson $DW < dL$ atau $DW > (4-dL)$ maka terdapat autokorelasi.
- b) Jika DW terletak diantara dU dan $(4-dU)$ maka tidak terdapat autokorelasi.
- c) Jika DW terletak diantara dL dan dU atau $(4-dU)$ dan $(4-dL)$ maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

3.6 Pengujian Hipotesis

Penelitian ini melibatkan beberapa langkah dalam pengujian hipotesis, antara lain:

3.6.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda memiliki konsep yang serupa dengan analisis regresi sederhana, namun perbedaannya terletak pada jumlah variabel independen yang digunakan. Pada analisis regresi sederhana, terdapat tiga variabel, yaitu satu variabel dependen, empat variabel *independent* dan satu variabel moderasi. Sementara itu, analisis regresi berganda melibatkan satu variabel dependen, empat variabel *independent*.

Variabel independen dalam penelitian ini meliputi Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, perencanaan Pajak dan *Leverage*. Sedangkan variabel dependen yang diuji adalah Manajemen Laba dengan variabel moderasi yaitu

Ukuran Perusahaan. Untuk menguji hipotesis dari variabel-variabel tersebut, rumus persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\gamma = \alpha + \beta_1 \cdot X_1 + \beta_2 \cdot X_2 + \beta_3 \cdot X_3 + \beta_4 \cdot X_4 + \varepsilon$$

Keterangan: γ = ETR

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X_1 = Aset Pajak Tangguhan

X_2 = Beban Pajak Tangguhan

X_3 = Perencanaan Pajak

X_4 = Leverage

ε = Error

3.6.1.1 Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Menurut (Ghozali, 2016) Uji Signifikansi parameter individual (Uji-t) berfungsi untuk menilai efek parsial variabel independen pada variabel dependen. Pedoman untuk menerima atau menolak hipotesis diuraikan sebagai berikut:

- 1) Ketika nilainya $< 0,05$, H_0 ditolak untuk mendukung H_a , menunjukkan bahwa ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.
- 2) Ketika nilainya $> 0,05$, H_0 diterima sementara H_a ditolak, menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

3.6.1.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji-f)

Menurut (Ghozali, 2016) uji-f digunakan untuk menentukan apakah variabel independen secara kolektif mempengaruhi variabel dependen. Untuk melakukan

uji-f, dapat dilihat nilai signifikansi yang disajikan dalam hasil analisis regresi.

Prosedur pengujian ini melibatkan langkah-langkah berikut:

- 1) Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan dihitung sebagai $(n-k)$, di mana n mewakili jumlah total pengamatan dan k menunjukkan jumlah variabel.
- 2) Kriteria pengambilan keputusan:
 - a) Model ini dianggap tidak dapat diterima jika $\alpha > 0,05$
 - b) Model ini dianggap dapat diterima jika $\alpha < 0,05$

3.6.1.3 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Menurut (Ghozali, 2016) Uji Koefisien Determinan (R^2) menilai seberapa baik model menyumbang variabilitas dalam variabel dependen. Koefisien nilai determinasi dapat berkisar dari 0 hingga 1. Nilai R^2 yang lebih rendah menunjukkan bahwa variabel independen memiliki kapasitas terbatas untuk memperhitungkan perubahan pada variabel dependen. Koefisien determinasi dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

Keterangan: Kd = Koefisien Determinasi

R^2 = Koefisien korelasi kuadrat

3.6.2 Analisis Regresi Moderate (Moderated Regression Analysis-MRA)

Menurut (Ghozali, 2016) Uji interaksi, yang juga dikenal dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) adalah aplikasi khusus dari regresi linier berganda yang melibatkan unsur interaksi dalam persamaan regresinya. Uji

hipotesis ini bertujuan untuk menentukan bagaimana variabel moderasi mempengaruhi koneksi antara variabel independent dan variabel dependen. Variabel moderasi adalah variabel independen yang dapat meningkatkan atau mengurangi pengaruh variabel independen lainnya terhadap variabel dependen. Uji MRA dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$\gamma = \alpha + \beta_1 \cdot X_1 + \beta_2 \cdot X_2 + \beta_3 \cdot X_3 + \beta_4 \cdot Z + \beta_5(X_1 \cdot Z) + \beta_6(X_2 \cdot Z) + \beta_7(X_3 \cdot Z) + \beta_8(X_4 \cdot Z) + \varepsilon$$

Keterangan: γ = Manajemen Laba
 α = Konstanta
 β = Koefisien Regresi
 X_1 = Aset Pajak Tangguhan
 X_2 = Beban Pajak Tangguhan
 X_3 = Perencanaan Pajak
 X_4 = Leverage
 Z = Ukuran Perusahaan
 ε = Error

3.6.3 Uji Hipotensis

Uji Hipotensis digunakan untuk menilai apakah variabel independen memiliki dampak parsial pada variabel dependen. Keputusan untuk menerima atau menolak hipotensi didasarkan pada kriteria tertentu.

1. Hipotesis diterima jika Aset Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba, dan ditolak jika tidak signifikan.
2. Hipotesis diterima jika Beban Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba, dan ditolak jika tidak signifikan.

3. Hipotesis diterima jika Perencanaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba, dan ditolak jika tidak signifikan.
4. Hipotesis diterima jika *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba, dan ditolak jika tidak signifikan.
5. Hipotesis diterima jika Ukuran Perusahaan memoderasi secara signifikan pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba, dan ditolak jika tidak signifikan.
6. Hipotesis diterima jika Ukuran Perusahaan memoderasi secara signifikan pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba, dan ditolak jika tidak signifikan.
7. Hipotesis diterima jika Ukuran Perusahaan memoderasi secara signifikan pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba, dan ditolak jika tidak signifikan.
8. Hipotesis diterima jika Ukuran Perusahaan memoderasi secara signifikan pengaruh *Leverage* terhadap Manajemen Laba, dan ditolak jika tidak signifikan.
9. Hipotesis diterima jika interaksi seluruh variabel independen (Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, dan *Leverage*) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba, dan ditolak jika tidak signifikan.

BAB IV

GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

4.1 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Penelitian ini menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai objek kajian. Sampel terdiri dari 35 emiten yang memenuhi kriteria, yaitu telah mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara lengkap pada periode 2020–2024 dan memiliki laporan tahunan yang tersedia. Kelompok emiten ini mencerminkan keragaman sejarah dan perkembangan perusahaan. Profil singkat dari 35 emiten tersebut disajikan sebagai berikut:

4.1.1 PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN)

PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN) didirikan pada tahun 1969 oleh Anton Haliman dan dikenal sebagai pelopor konsep hunian terpadu serta superblok di Indonesia. Sejak 1986, di bawah kepemimpinan Trihatma Kusuma Haliman, perusahaan mengembangkan proyek-proyek ikonik seperti Podomoro City, Green Bay Pluit, dan Senayan City. APLN tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 2010 dengan kode saham APLN, menjalankan model bisnis terintegrasi mulai dari akuisisi lahan hingga pemasaran properti. Dengan pengalaman lebih dari lima dekade, APLN fokus pada pengembangan apartemen, pusat perbelanjaan, hotel, dan properti komersial, menerapkan strategi fast churn serta menekankan pendapatan berulang.

4.1.2 PT Binakarya Jaya Abadi Tbk. (BIKA)

PT Binakarya Jaya Abadi Tbk. (BIKA) didirikan pada tahun 2007, namun memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun melalui induknya, PT Binakarya Propertindo Group. BIKA fokus pada pengembangan apartemen, perumahan, dan kompleks komersial. Perusahaan ini mengelola 17 proyek konstruksi melalui 20 anak usaha di Jabodetabek, Bandung, dan Bali, dengan total lahan 1.059.149 m². Dari jumlah tersebut, 689.625 m² telah dikembangkan, mencakup rumah tapak, hunian vertikal, dan area komersial.

4.1.3 PT Bukit Darmo Property Tbk. (BKDP)

PT Bukit Darmo Property Tbk. (BKDP) didirikan pada 12 Juli 1989 di Surabaya dengan nama awal PT Adhibaladika. Pada 2007, perusahaan mengganti nama menjadi PT Bukit Darmo Property Tbk. sebagai bagian dari restrukturisasi dan persiapan penawaran umum saham perdana (IPO). BKDP telah menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Perusahaan bergerak di bidang pengembangan properti, fokus pada kawasan hunian, komersial, dan fasilitas penunjang, serta dikenal atas komitmennya menciptakan lingkungan berkualitas dan berkelanjutan.

4.1.4 PT Sentul City Tbk. (BKSL)

PT Sentul City Tbk. (BKSL) didirikan pada 16 April 1993 dan resmi berganti nama menjadi PT Sentul City Tbk. pada tahun 2006. Perusahaan mulai memasarkan kawasan Bukit Sentul pada tahun 1993 dan melantai di Bursa Efek Indonesia pada 30 Juni 1997. Mayoritas saham BKSL dimiliki oleh PT Sakti Generasi Perdana,

publik, dan Stella Isabella Djohan. Meskipun menghadapi beberapa sengketa hukum, sebagian besar telah diselesaikan secara damai. Saat ini, BKSL fokus pada pengembangan kawasan hunian terpadu di Sentul, Bogor, dan sekitarnya.

4.1.5 PT Ciputra Development Tbk. (CTRA)

PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) didirikan pada 22 Oktober 1981 oleh Dr. (HC) Ir. Ciputra dengan nama awal PT Citra Habitat Indonesia, kemudian berganti menjadi PT Ciputra Development pada 1990 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 1994. Anak perusahaan seperti PT Ciputra Surya dan PT Ciputra Property sempat melakukan IPO sebelum bergabung kembali dengan induk perusahaan pada 2016. CTRA termasuk salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia dengan lebih dari 70 proyek di lebih dari 30 kota, mencakup perumahan, apartemen, pusat perbelanjaan, hotel, rumah sakit, perkantoran, dan lapangan golf, serta dikenal dengan konsep pengembangan arsitektur modern dan terintegrasi sebagai keunggulan kompetitif.

4.1.6 PT Duta Anggada Realty Tbk. (DART)

PT Duta Anggada Realty Tbk didirikan pada tahun 1983 dengan kantor pusat di Jakarta. Perusahaan memulai bisnis dengan membangun kompleks hunian untuk ekspatriat di Jakarta Selatan, yang menjadi konsep inovatif dan sukses. Seiring waktu, perusahaan memperluas portofolio ke sektor investasi properti, pengembangan properti, perkantoran, pusat perbelanjaan, perhotelan, dan residensial. Dengan lokasi strategis dan desain inovatif, Duta Anggada Realty telah

menjadi salah satu pengembang properti terkemuka di Indonesia, fokus pada pertumbuhan jangka panjang dan penguatan fundamental perusahaan.

4.1.7 PT Intiland Development Tbk (DILD)

PT Intiland Development Tbk, didirikan pada 10 Juni 1983 sebagai PT Wisma Dharmala Sakti, adalah perusahaan pengembang properti yang fokus pada perumahan, apartemen, perkantoran, properti komersial terpadu, kawasan industri, dan perhotelan melalui PT Intiwhiz Hospitality Management. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 1991 dengan kode DILD dan rebranding pada 2007, perusahaan dikenal karena desain inovatif, lokasi strategis, serta prinsip keberlanjutan, dengan proyek ikonik seperti Regatta dan South Quarter di Jakarta, Graha Famili di Surabaya, dan Ngoro Industrial Park di Mojokerto.

4.1.8 PT Bakrieland Development Tbk (ELTY)

PT Bakrieland Development Tbk, bagian dari Bakrie Group, didirikan pada Juni 1990 sebagai PT Purilestari Indah Pratama dan berganti nama menjadi Bakrieland Development pada 1997 setelah akuisisi oleh PT Bakrie Capital Indonesia. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 1995 dengan kode saham ELTY, perusahaan fokus pada pengembangan kawasan terpadu yang mencakup hunian, komersial, hotel, dan ruang publik, dengan proyek ikonik seperti Rasuna Epicentrum di Jakarta. Selain itu, Bakrieland mengembangkan perumahan, properti hospitality, gedung perkantoran, apartemen, serta destinasi rekreasi seperti The Jungle Waterpark di Bogor, dengan komitmen pada kualitas dan keberlanjutan.

4.1.9 PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD)

PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) didirikan pada 14 Mei 1991 dengan fokus pada pengembangan kawasan terpadu di Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah Grup Lippo menjadi pemegang saham mayoritas pada 1994, perusahaan memperluas ekspansi ke wilayah timur Indonesia. GMTD tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 2000 dengan kode saham GMTD dan mengembangkan proyek utama Tanjung Bunga seluas 1.000 hektare, meliputi permukiman, komersial, pariwisata, dan olahraga. Perusahaan berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan kinerja keuangan yang stabil hingga 2024.

4.1.10 PT Perdana Gapuraprima (GPRA)

PT Perdana Gapuraprima didirikan pada tahun 1987 dengan nama awal PT Perdana Gapura Mas, dan berganti nama pada 1999. Perusahaan ini fokus pada pengembangan kawasan hunian dan komersial kelas menengah ke atas, dengan portofolio yang mencakup landed house, mixed-use development, serta gedung bertingkat di Jakarta dan sekitarnya. Selama lebih dari 20 tahun, Grup Gapuraprima telah menyelesaikan lebih dari 30 proyek properti, termasuk perumahan, apartemen, perkantoran, pusat perbelanjaan, rekreasi, dan perhotelan. Perusahaan juga berhasil melewati krisis ekonomi 1998 dan 2009, dan tetap aktif mengembangkan produk premium di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

4.1.11 PT Indonesian Paradise Property Tbk (INPP)

PT Indonesian Paradise Property Tbk (INPP) didirikan pada 14 Juni 1996 dengan nama awal PT Penta Karsa Lubrindo dan berkantor pusat di Jakarta Selatan. Perusahaan bergerak di bidang pengembangan properti gaya hidup, mencakup hotel, pusat perbelanjaan, dan apartemen di kota-kota besar seperti Bali, Batam, Yogyakarta, Jakarta, Makassar, dan Bandung. INPP tercatat di Bursa Efek Surabaya sejak 2004 dan dikenal dengan proyek ikonik seperti Beachwalk Shopping Center dan Sheraton Bali Kuta Resort. Dengan pengalaman lebih dari dua dekade, perusahaan juga memiliki anak usaha di sektor properti, perhotelan, taman hiburan, dan perdagangan, serta terus berkomitmen mengembangkan kawasan urban yang inovatif di Indonesia.

4.1.12 PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA)

PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) didirikan pada 1989 sebagai pelopor pengembangan kawasan industri terpadu di Indonesia. Perusahaan mengembangkan Kota Jababeka di Cikarang, Jawa Barat, seluas lebih dari 5.600 hektare, yang mengintegrasikan kawasan industri, hunian, dan komersial. KIJA tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 1994 dan menjalankan bisnis di bidang real estate, infrastruktur, leisure, serta hospitality, termasuk fasilitas pendidikan Universitas Presiden. Perusahaan juga mengembangkan Kawasan Industri Kendal di Jawa Tengah bersama mitra dari Singapura dan menjadi rumah bagi lebih dari 2.000 perusahaan nasional dan internasional, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

4.1.13 PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK)

PT Lippo Cikarang Tbk adalah pengembang kawasan industri dan kota mandiri yang berlokasi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Didirikan pada 1987, perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 1997 dengan kode saham LPCK. Lippo Cikarang mengembangkan kawasan seluas lebih dari 3.250 hektare yang mengintegrasikan area industri, komersial, perumahan, serta fasilitas sosial seperti pendidikan dan layanan kesehatan, menjadi rumah bagi lebih dari 1.200 perusahaan nasional dan multinasional. Perusahaan terus berinovasi dan berekspansi di bidang real estate, konstruksi, pengelolaan lingkungan, dan jasa konsultasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

4.1.14 PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR)

PT Lippo Karawaci Tbk adalah salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia yang fokus pada pengembangan kota mandiri berkelanjutan dengan kawasan terpadu dan infrastruktur berkualitas. Didirikan sebagai pelopor proyek strategis dengan landbank luas, perusahaan melakukan konsolidasi pada 2004 dengan menggabungkan delapan anak usaha untuk memperluas bisnis ke pengembangan kawasan perkotaan terpadu, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, hotel, dan jasa. Lippo Karawaci tercatat sebagai pemimpin pasar properti di Indonesia berdasarkan aset dan pendapatan, dengan portofolio meliputi properti residensial, komersial, serta jaringan rumah sakit swasta terbesar. Perusahaan terus berinovasi dalam membangun kota mandiri yang inklusif dan berkelanjutan serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

4.1.15 PT Star Pacific Tbk (LPLI)

PT Star Pacific Tbk didirikan pada 1983 dengan nama awal PT Asuransi Lippo Jiwa Sakti dan mulai beroperasi sebagai perusahaan asuransi jiwa pada 1984. Setelah IPO pada 1989 dan beberapa perubahan modal, perusahaan bertransformasi menjadi PT Asuransi Lippo E-Net Tbk pada 2000 dengan fokus pada jasa, teknologi informasi, dan pengelolaan bisnis, kemudian berganti nama menjadi PT Star Pacific Tbk pada 2008, menandai pergeseran ke sektor media, teknologi informasi, dan real estate. Saat ini, perusahaan berfokus pada pengelolaan gedung perkantoran berfasilitas lengkap, serta aktif di sektor real estate, teknologi informasi, dan investasi strategis untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis.

4.1.16 PT Modernland Realty Tbk (MDLN)

PT Modernland Realty Tbk adalah pengembang properti terkemuka di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, khususnya di wilayah Jabodetabek. Perusahaan fokus pada pengembangan properti berkualitas tinggi yang mengedepankan keberlanjutan dan nilai sosial budaya, dengan proyek unggulan Kota Modern di Tangerang, township pertama di Indonesia yang mengintegrasikan hunian, area komersial, dan fasilitas umum dalam satu kawasan terpadu. Selain pengembangan properti, bisnis Modernland mencakup pengelolaan lapangan golf, kontraktor umum, dan perdagangan, dengan komitmen terhadap inovasi dan kualitas untuk mempertahankan posisi sebagai pemain utama di industri properti Indonesia.

4.1.17 PT Metropolitan Kentjana Tbk (MKPI)

PT Metropolitan Kentjana Tbk (MKPI) adalah perusahaan properti terkemuka di Indonesia yang berdiri sejak 29 Maret 1972, dikenal sebagai pengembang kawasan elit Pondok Indah di Jakarta Selatan dengan mengubah 460 hektare hutan karet menjadi kompleks perumahan dan komersial bergengsi. Proyek unggulan MKPI meliputi Pondok Indah Mall, Pondok Indah Office Tower, dan Villa Anggrek, serta memiliki anak usaha di bidang properti residensial dan perhotelan. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham MKPI, perusahaan terus berkomitmen menghadirkan properti berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

4.1.18 PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP)

PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP), berdiri sejak 23 Agustus 2010, bergerak di bidang pengembangan dan penyewaan properti logistik, termasuk gudang dan pusat distribusi. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2015 dengan kode saham MMLP, hingga 2023 perusahaan mengelola 13 aset di 9 lokasi utama dengan total luas sewa lebih dari 368.000 m², menjadi salah satu pemimpin sektor properti logistik nasional.

4.1.19 PT Metropolitan Land Tbk. (MTLA)

PT Metropolitan Land Tbk (Metland) didirikan secara resmi pada 16 Februari 1994 sebagai bagian dari pengembangan PT Metropolitan Development yang berdiri sejak 1970 oleh tujuh pengusaha Indonesia, termasuk Ir. Ciputra. Metland fokus pada pengembangan perumahan dan bangunan komersial. Pada 2004, investor asing Reco Newtown Pte. Ltd dari Singapura bergabung, menandakan

kepercayaan pasar. Metland juga meraih sertifikasi ISO 9001:2000 pada tahun yang sama sebagai bukti komitmen terhadap kualitas.

4.1.20 PT Metro Realty Tbk. (MTSM)

PT Metro Supermarket Realty Tbk, didirikan pada 7 Februari 1980 dengan nama awal PT Melawai Indah Plaza, bergerak di bidang penyewaan dan pengelolaan gedung, investasi, serta pengembangan properti. Perusahaan memulai operasinya pada 1982 dengan pengelolaan Gedung Metro Pasar Baru di Jakarta. Pada 1991, perusahaan melakukan IPO dan tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya pada 1992. Memiliki anak usaha PT Yakin Gloria dengan kepemilikan 99,90% dan didukung oleh sekitar 86 karyawan profesional.

4.1.21 PT City Retail Development Tbk. (NIRO)

PT City Retail Developments Tbk didirikan pada 18 Desember 2003 dengan nama awal PT Adipura Artha Pratama. Pada 2010, perusahaan berganti nama menjadi PT Nirvana Development dan mulai ekspansi melalui akuisisi. Setelah IPO pada 2012, perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pada 2018, nama berubah menjadi PT City Retail Developments Tbk, dengan fokus pada pengembangan dan pengelolaan pusat perbelanjaan di berbagai wilayah Indonesia.

4.1.22 PT Plaza Indonesia Realty Tbk (PLIN)

PT Plaza Indonesia Realty Tbk (PLIN) didirikan pada 5 November 1983 dengan nama awal PT Bimantara Eka Santosa, kemudian berganti nama pada 20 Desember 1990. Proyek utama perusahaan adalah kompleks Plaza Indonesia, termasuk Plaza Indonesia Shopping Center dan Hotel Grand Hyatt Jakarta. PLIN mencatatkan

sahamnya di Bursa Efek pada 2 Mei 1992. Saat ini, mayoritas saham dimiliki oleh PT Plaza Indonesia Investama, bagian dari Dana Investasi Real Estate Simas Plaza Indonesia di bawah PT Sinarmas Asset Management.

4.1.23 PT Pudjiadi Prestige Tbk. (PUDP)

PT Pudjiadi Prestige Tbk, didirikan sejak 1980 sebagai bagian dari The Jayakarta Group, bergerak di bidang pengembangan properti residensial, komersial, serta jasa kontraktor dan manajemen properti. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, perusahaan telah mengembangkan lebih dari 25 proyek, termasuk Jayakarta Plaza, Senopati Apartment, Kemang Apartment, dan Marbella Hotel Anyer, dengan fokus pada kualitas dan kepuasan pelanggan.

4.1.24 PT Pakuwon Jati Tbk.(PWON)

PT Pakuwon Jati Tbk, didirikan pada 1982 dan tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya sejak 1988, merupakan pengembang properti ternama di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 40 tahun. Perusahaan dikenal sebagai pelopor konsep superblock, mengembangkan kawasan terpadu yang menggabungkan pusat perbelanjaan, perkantoran, hunian vertikal, dan hotel di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Bekasi, dan Bali, dengan portofolio mencakup ritel, hunian, komersial, dan perhotelan.

4.1.25 PT Roda Vivatex Tbk.(RDTX)

PT Roda Vivatex Tbk didirikan pada tahun 1980 dan awalnya bergerak di industri tekstil dengan fokus pada kain tenun filament poliester. Perusahaan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 1990. Seiring dinamika industri, sejak 2002

Roda Vivatex mulai diversifikasi ke sektor properti melalui anak usaha yang mengelola gedung perkantoran. Pada 2014, perusahaan menghentikan kegiatan tekstil dan sepenuhnya bertransformasi menjadi perusahaan investasi properti, mengelola empat gedung perkantoran utama di lokasi strategis di Indonesia. Transformasi ini menunjukkan kemampuan perusahaan beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi perubahan pasar.

4.1.26 PT Pikko Land Development Tbk. (RODA)

Pikko Group didirikan pada tahun 1984 dan telah berkembang menjadi salah satu pengembang properti besar di Indonesia. Selama lebih dari tiga dekade, Pikko Group terus meluncurkan berbagai proyek berskala besar yang selalu diminati oleh pasar. Dengan rekam jejak kesuksesan yang konsisten, Pikko Group berencana untuk memperluas jangkauan bisnisnya ke pasar global. Dalam proses ekspansi ini, perusahaan berkomitmen membawa pelanggan dan mitra untuk tumbuh dan berkembang bersama. Keberhasilan dan inovasi yang berkelanjutan membuat pelanggan selalu menantikan proyek-proyek baru dari Pikko Group.

2.1.27 PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM)

PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) adalah perusahaan publik pengembang properti di Indonesia, didirikan pada 1989. SMDM memulai proyek perdana dengan Rancamaya Golf Estate pada 1993 dan melakukan IPO pada 1995. Perusahaan mengembangkan berbagai properti seperti perumahan, lapangan golf, dan fasilitas pendukung. Proyek unggulan SMDM meliputi Rancamaya Golf Estate, Mahogany Residence, Bogor Balcony, Istana Bunga, dan Harvest City. Dengan

pengalaman lebih dari 30 tahun, SMDM berkomitmen menghadirkan properti berkualitas dan memperkuat posisi di industri properti Indonesia.

2.1.28 PT Summarecon Agung Tbk (SMRA)

PT Summarecon Agung Tbk didirikan pada 1975 dan tercatat di BEI sejak 1990. Perusahaan merupakan pengembang properti terkemuka, mengembangkan proyek terpadu hunian, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan rekreasi di berbagai kota, termasuk Summarecon Kelapa Gading, Serpong, dan Bekasi. Selain properti, perusahaan juga aktif di perhotelan dan rekreasi, dengan komitmen pada kualitas dan pembangunan berkelanjutan.

4.1.29 PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk (CSIS)

PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk (CSIS) didirikan pada 2 Juni 1995 di Bogor dan tercatat di BEI pada 2015. Perusahaan bergerak di bidang investasi dan pengelolaan properti, awalnya fokus pada furnitur dan desain interior, kemudian memperluas ke konstruksi umum serta pengembangan hotel dan kondotel di Sentul Utara. CSIS berkomitmen mengembangkan properti berkualitas yang mendukung hunian dan investasi.

4.1.30 PT Kota Satu Properti Tbk. (SATU)

PT Kota Satu Properti Tbk, didirikan pada 3 Oktober 2012 di Semarang dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI pada 19 November 2012, bergerak di bidang pembangunan, pengelolaan, dan perdagangan properti melalui entitas anaknya. Perusahaan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 5 November 2018 melalui IPO dengan penerbitan 500 juta saham. Seluruh kegiatan usaha difokuskan

pada sinergi pengembangan properti untuk menciptakan nilai tambah di sektor real estate nasional.

4.1.31 PT Pollux Hotels Group Tbk. (POLI)

PT Pollux Hotels Group Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan properti dan perhotelan, dengan fokus pada proyek komersial dan residensial di Indonesia dan pasar internasional. Perusahaan mengembangkan hotel mewah, kompleks perkantoran, serta ruang hunian inovatif. Komitmen terhadap inovasi, teknologi, dan standar internasional menjadikan Pollux sebagai salah satu pemain penting di industri properti dan perhotelan nasional.

4.1.32 PT Bima Sakti Pertiwi Tbk. (PAMG)

PT Bima Sakti Pertiwi Tbk adalah pengembang properti terkemuka di Provinsi Riau, khususnya Pekanbaru, dengan pengalaman lebih dari satu dekade. Perusahaan mengembangkan properti berkualitas yang mengutamakan aspek komersial sekaligus nilai sosial dan budaya. Proyek unggulannya, Mal Pekanbaru yang terintegrasi dengan Grand Jatra Hotel bintang lima, menjadi pelopor konsep one stop shopping di kota tersebut. Ke depan, PT Bima Sakti Pertiwi Tbk berkomitmen untuk terus berinovasi, mengembangkan keunggulan kompetitif, dan mempertahankan posisi sebagai pelaku bisnis properti terdepan di Riau.

4.1.33 PT Perintis Trinita Tbk. (TRIN)

PT Perintis Trinita Properti Tbk adalah perusahaan pengembang properti yang didirikan tahun 2009. Perusahaan dikenal melalui proyek-proyek besar seperti Brooklyn Apartment, Yukata Suites, dan Collins Boulevard. Trinita juga

mengembangkan superblok Marc's Boulevard di Batam serta proyek Holdwell Business Park di Lampung dan Sequoia Hills di Sentul. Selain itu, Trinitas tengah mempersiapkan proyek Tanamori di Labuan Bajo sebagai bagian dari ekspansi jangka panjang.

4.1.34 PT Makmur Berkah Amanda Tbk. (AMAN)

PT Makmur Berkah Amanda Tbk (AMAN) adalah pengembang real estate yang berdiri sejak 1996. Proyek perumahan pertamanya, Citra Fajar Golf, terjual 90% pada tahun yang sama. Pada 2006, perusahaan mengembangkan SAFE'n'LOCK Eco Industrial Park di Sidoarjo untuk mendukung Usaha Kecil dan Menengah (UKM), yang sejak 2009 menampung pabrik besar pertama seluas lebih dari 25.000 m². Hingga kini, kawasan ini menjadi industri terkemuka dengan lebih dari 450 bangunan tenant, dihuni oleh investor lokal dan internasional.

4.1.35 PT Era Graha Realty Tbk. (IPAC)

PT ERA Graha Realty Tbk (ERA Indonesia) adalah agen properti terkemuka di Indonesia yang berdiri sejak 1992 dan menjadi pelopor sistem waralaba di industri perantara properti nasional. ERA Indonesia merupakan bagian dari jaringan global ERA Asia Pacific dengan lebih dari 100 kantor broker dan 4.000 agen di seluruh Indonesia. Perusahaan dikenal berkat sistem pemasaran terstruktur serta komitmennya terhadap profesionalisme, integritas, dan kepuasan pelanggan.

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Data Penelitian

Analisis data merupakan tahap penting untuk mengolah dan mengevaluasi data agar ditemukan pola dan bukti empiris yang mendukung pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model regresi data panel untuk menguji pengaruh aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, perencanaan pajak, dan *leverage* terhadap manajemen laba, serta peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Tahapan analisis meliputi analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Dengan analisis yang sistematis, hasil penelitian diharapkan valid, reliabel, dan relevan bagi pengembangan ilmu akuntansi dan praktik keuangan perusahaan.

5.1.1 Uji Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data dari masing-masing variabel penelitian. Statistik deskriptif membantu peneliti memahami pola distribusi, nilai ekstrem, dan penyebaran data, yang penting sebelum dilakukan analisis lanjutan. berikut menyajikan nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 5. 1. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Aset Pajak Tangguhan (X1)	175	.35	2.68	1.8346	.43
Beban Pajak Tangguhan (X2)	175	-1.45	2.50	.8951	.79
Perencanaan Pajak (X3)	175	-6.97	7.06	-.0373	1.59
<i>Leverage</i> (X4)	175	-5.88	5.35	-.4122	1.65
Manajemen Laba (Y)	175	2.75	3.56	3.3317	.18
Ukuran Perusahaan (Y)	175	3.03	3.63	3.4487	.16

Sumber: Output SPSS ver 27 hasil dari pengolahan data sekunder,2025

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 5.1, diperoleh informasi bahwa jumlah observasi (n) sebanyak 175, yang berarti setiap variabel penelitian menggunakan sampel sebanyak 175 data. Adapun rincian nilai dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Variabel Aset Pajak Tangguhan memiliki nilai minimum sebesar 0,35 dan maksimum sebesar 2,68 dengan nilai rata-rata sebesar 1,83 serta standar deviasi sebesar 0,43. Nilai rata-rata yang relatif tinggi dan standar deviasi yang rendah menunjukkan bahwa aset pajak tangguhan pada perusahaan sampel cenderung berada pada tingkat yang serupa.
2. Variabel Beban Pajak Tangguhan memiliki nilai minimum sebesar -1,45 dan maksimum sebesar 2,50 dengan nilai rata-rata sebesar 0,90 dan standar deviasi sebesar 0,79. Nilai ini menunjukkan adanya variasi yang sedang antar perusahaan, dengan indikasi bahwa sebagian perusahaan mengalami

penurunan beban pajak tangguhan (nilai negatif), sedangkan sebagian lainnya mengalami peningkatan.

3. Variabel Perencanaan Pajak memiliki nilai minimum sebesar -6,97 dan maksimum sebesar 7,06 dengan nilai rata-rata sebesar -0,04 serta standar deviasi sebesar 1,59. Rentang nilai yang lebar dan standar deviasi yang relatif tinggi menunjukkan adanya perbedaan strategi perencanaan pajak yang cukup signifikan antar perusahaan. Nilai negatif menunjukkan pengurangan beban pajak, sedangkan nilai positif menunjukkan peningkatan beban pajak.
4. Variabel *Leverage* memiliki nilai minimum sebesar -5,88 dan maksimum sebesar 5,35 dengan nilai rata-rata sebesar -0,41 serta standar deviasi sebesar 1,65. Nilai ini menunjukkan adanya variasi yang cukup besar dalam struktur pendanaan perusahaan, di mana nilai negatif mengindikasikan proporsi ekuitas yang lebih tinggi dibandingkan total kewajiban pada sebagian perusahaan.
5. Variabel Manajemen Laba memiliki nilai minimum sebesar 2,75 dan maksimum sebesar 3,56 dengan nilai rata-rata sebesar 3,33 serta standar deviasi sebesar 0,18. Nilai standar deviasi yang rendah menunjukkan bahwa tingkat manajemen laba antar perusahaan cenderung homogen, sehingga perbedaan praktik manajemen laba di antara perusahaan sampel tidak terlalu signifikan.
6. Variabel Ukuran Perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 3,03 dan maksimum sebesar 3,63, dengan nilai rata-rata sebesar 3,45 serta standar

deviasi sebesar 0,16. Nilai ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan pada sampel penelitian relatif seragam, mengingat seluruh perusahaan berada dalam sektor yang sama dan memiliki skala usaha yang sebanding.

5.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat statistik yang diperlukan dalam model regresi linear. Uji ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, yang bertujuan untuk menghasilkan estimasi yang valid, tidak bias, dan efisien.

5.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi berdistribusi secara normal. Dalam penelitian ini, uji yang digunakan adalah uji *Kolmogorov-Smirnov*. Proses pengambilan keputusan untuk tes *Kolmogorov-Smirnov* didasarkan pada kriteria berikut:

- 1) Jika nilai probabilitas dari uji K-S secara statistik tidak signifikan secara statistik (kurang dari 0,05), maka H_0 diterima, yang menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi secara normal.
- 2) Jika nilai probabilitas dari uji K-S secara statistik signifikan secara statistik (lebih besar dari 0,05), maka H_0 ditolak, menunjukkan bahwa data mengikuti distribusi normal.

Tabel 5. 2. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		175
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.27181225
Most Extreme Differences	Absolute	.051
	Positive	.051
	Negative	-.050
Test Statistic		.051
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.322
	99% Confidence Interval	Lower Bound .310
		Upper Bound .334

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber : output SPSS ver 27 hasil dari pengolahan data sekunder,2025

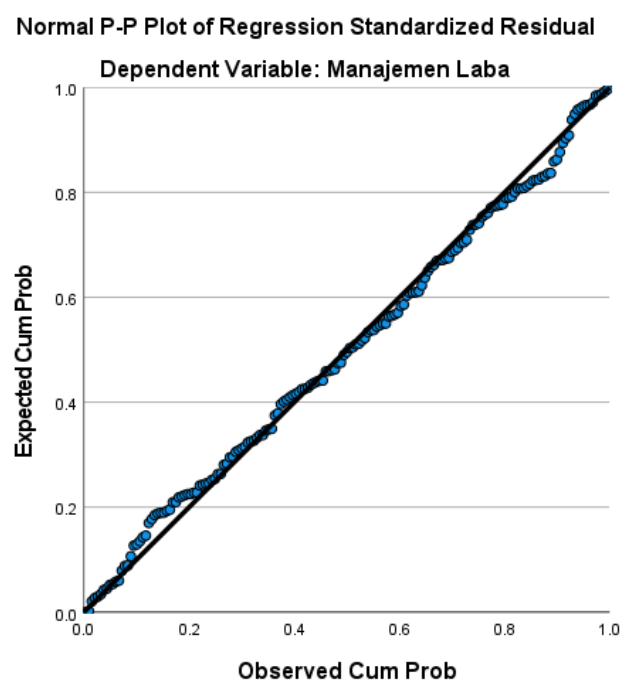
Berdasarkan Tabel 5.2, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 dan nilai *Monte Carlo Sig. (2-tailed)* sebesar 0,322, keduanya lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data residual tidak berbeda secara signifikan dari distribusi normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi dalam model regresi yang digunakan.

Selain menggunakan analisis statistik, uji normalitas juga dapat dilihat dengan menggunakan analisis grafik berupa histogram dan normal P-Plot. Grafik normal P-Plot dapat memberikan visualisasi yang lebih jelas mengenai distribusi

data residual. Jika titik-titik pada P-Plot mengikuti garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal.

Berikut adalah hasil dari grafik normal P-Plot yang menunjukkan distribusi data residual:

Gambar 5. 1. Grafik Normal P-Plot



Sumber: Output SPSS ver 27 hasil pengolahan data sekunder, 2025

Dengan demikian, berdasarkan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* dan analisis grafik, dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi ini berdistribusi normal.

5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah langkah penting dalam analisis regresi untuk memastikan bahwa variabel independen tidak memiliki hubungan linear yang tinggi

satu sama lain. Hal ini penting karena multikolinearitas yang tinggi dapat menyebabkan estimasi parameter regresi menjadi bias dan tidak reliabel, yang pada gilirannya dapat mengganggu validitas hasil analisis. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, dua indikator utama yang digunakan adalah nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kriteria untuk menentukan adanya multikolinearitas adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai *tolerance* $> 0,10$, maka tidak terdapat multikolinearitas yang signifikan antarvariabel independen. Jika nilai *tolerance* $\leq 0,10$, maka terdapat indikasi multikolinearitas antarvariabel independen.
2. Jika nilai VIF < 10 , maka tidak terdapat multikolinearitas yang signifikan. Jika nilai VIF ≥ 10 , maka terdapat indikasi multikolinearitas yang tinggi antarvariabel independen.

Tabel 5. 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Aset Pajak Tangguhan (X1)	.962	1.040
Beban Pajak Tangguhan (X2)	.816	1.225
Perencanaan Pajak (X3)	.838	1.193
Leverage (X4)	.945	1.058
Ukuran Perusahaan (Z)	.965	1.036

Sumber: Ouput SPSS ver 27 hasil dari pengolahan data sekunder, 2025

Berdasarkan Tabel 5.3, semua variabel memiliki nilai *Tolerance* di atas 0,10, yang menunjukkan tidak adanya hubungan linear tinggi antar variabel independen. Selain itu, nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk seluruh variabel berada di bawah 10, bahkan semua nilainya kurang dari 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi yang digunakan.

Dengan demikian, tidak ditemukan indikasi adanya multikolinearitas antar variabel bebas. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel bebas bersifat independen dan tidak saling memengaruhi secara signifikan dalam menjelaskan variabel dependen, yaitu manajemen laba.

5.2.3 Uji Heterokedastisitas

Dalam penelitian ini, uji heterokedastisitas dilakukan menggunakan Uji Glejser, yang mengukur signifikansi korelasi antara variabel independen dan nilai residual yang tidak terstandarisasi.

- 1) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.
- 2) Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka artinya terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Tabel 5. 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig.
Aset Pajak Tangguhan (X1)	.445
Beban Pajak Tangguhan (X2)	.490
Perencanaan Pajak (X3)	.641
Leverage (X4)	.206
Ukuran Perusahaan (Z)	.483

Sumber: Ouput SPSS Ver 27 hasil dari pengolahan data sekunder, 2025

Berdasarkan hasil uji Glejser yang ditampilkan pada Tabel 5.4, seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi di atas 0,05. Aset Pajak Tangguhan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,445 Beban Pajak Tangguhan sebesar 0,490 Perencanaan Pajak sebesar 0,641 *Leverage* sebesar 0,206 dan Ukuran Perusahaan sebesar 0,483. Karena tidak ada variabel independen yang memiliki nilai

signifikansi di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap nilai *absolut residual*. Dengan demikian, model regresi ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas dan telah memenuhi asumsi homoskedastisitas dalam regresi linear klasik.

5.2.4 Uji AutoKorelasi

Uji AutoKorelasi bertujuan untuk mendeteksi adanya hubungan antara residual pada satu observasi dengan residual pada observasi lainnya dalam model regresi. Autokorelasi yang terjadi dapat menyebabkan hasil estimasi menjadi tidak efisien, sehingga pengujian ini penting dilakukan untuk memastikan validitas model. Adapun hasil pengujian autokorelasi pada penelitian ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. 5. Hasil Uji Autokorelasi

dL	dU	DW	4-dua
1.6507	1.7984	1.144	1,793

Sumber: Output SPSS Ver27 hasil dari pengolahan data sekunder,2025

Berdasarkan tabel 5.5 diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,793. Karena nilai DW berada diantara dU ($1,7984 < DW (1,793) < 4 - dU (2,2016)$) maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

5.3 Pengujian Hipotensis

Pada bagian ini dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, perencanaan pajak, dan *leverage* terhadap manajemen laba, serta peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Pengujian menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda, *Moderated Regression*

Analysis (MRA), Uji Koefisien Determinasi (R^2), Uji Signifikansi Simultan (Uji F), Uji Signifikansi Parsial (Uji t), dan Uji Hipotesis. Hasil pengujian menjadi dasar dalam pembahasan dan penarikan kesimpulan penelitian.

5.3.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda merupakan salah satu teknik analisis statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen secara simultan. Dalam penelitian ini, analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Aset Pajak Tangguhan (X_1), Beban Pajak Tangguhan (X_2), Perencanaan Pajak (X_3), dan *Leverage* (X_4) terhadap Manajemen Laba (Y), dengan mempertimbangkan peran Ukuran Perusahaan (Z) sebagai variabel moderasi. pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020–2024. Analisis ini melibatkan tiga uji utama, yaitu uji t (parsial), uji F (simultan), dan koefisien determinasi (R^2). Berikut penjelasannya:

5.3.1.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk melihat apakah masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap Manajemen Laba. Uji ini membantu mengetahui variabel mana saja yang secara signifikan memengaruhi Manajemen Laba.

Tabel 5. 6. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	B	T	Sig.
Aset Pajak Tangguhan (X1)	10.327	16.269	.000
Beban Pajak Tangguhan (X2)	5.792	4.040	.000
Perencanaan Pajak (X3)	-2.485	-.967	.335
Leverage (X4)	-2.740	-1.567	.119

Sumber: Output SPSS Ver27 hasil dari pengolahan data sekunder,2025

Model regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$Y = 29.474 + 10.327X_1 + 5.792X_2 - 2.485X_3 - 2.740X_4$$

Keterangan : Y : Manajemen Laba

X1 : Aset Pajak Tangguhan

X2 : Beban Pajak Tangguhan

X3 : Perencanaan Pajak

X4 : Leverage

Tabel 5.6, diperoleh informasi mengenai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

1. Hasil uji t menunjukkan bahwa Aset Pajak Tangguhan (X1) memiliki nilai t-hitung sebesar 10,327 dengan signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi $< 0,05$ dan $t\text{-hitung} > t\text{-tabel} (1,656)$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Aset Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
2. Hasil uji t menunjukkan bahwa Beban Pajak Tangguhan (X2) memiliki nilai t-hitung sebesar 5,792 dengan signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi $< 0,05$ dan $t\text{-hitung} > t\text{-tabel} (1,656)$, maka variabel Beban Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

3. Hasil uji t menunjukkan bahwa Perencanaan Pajak (X3) memiliki nilai t-hitung sebesar -0,967 dengan signifikansi 0,335. Karena nilai signifikansi $> 0,05$ dan $|t\text{-hitung}| < t\text{-tabel} (1,656)$, maka variabel Perencanaan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
4. Hasil uji t menunjukkan bahwa Leverage (X4) memiliki nilai t-hitung sebesar -1,567 dengan signifikansi 0,119. Karena nilai signifikansi $> 0,05$ dan $|t\text{-hitung}| < t\text{-tabel} (1,656)$, maka variabel Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

5.3.1.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen yang bekerja atau secara simultan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil dari uji F yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5. 7. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

F Tabel	F Hitung	Sign.
2.44	426.281	.000 ^b

Sumber: Output Ver27 hasil dari pengolahan data sekunder, 2025

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 5.7, nilai F hitung sebesar 426.281 dengan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0.000. Nilai F tabel dengan derajat kebebasan pembilang (df1) 4 dan derajat kebebasan penyebut (df2) 135 pada tingkat signifikansi 5% adalah sekitar 2.44. Karena nilai F hitung (426.281) lebih besar dari F tabel (2.44) dan p-value (0.000) kurang dari 0.05, maka dapat

disimpulkan bahwa secara simultan variabel-variabel independen dalam model ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Manajemen Laba.

5.3.1.3 Uji Koefisiensi Determinasi (R²)

Koefisiensi Determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel independen dari variabel Manajemen Laba. Berikut merupakan hasil dari koefisiensi determinasi (R²) yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. 8. Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R²)

R	R Square	Adjusted R Square
.706 ^a	.499	.480

a. Predictors: (Constant):Ukuran Perusahaan, Aset Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, Leverage, Beban Pajak Tangguhan

b. Dependent Variable: Y_ Manajemen Laba

Sumber: Output SPSS Ver27 hasil dari pengolahan data sekunder, 2025

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 13, diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,706, yang mengindikasikan adanya hubungan yang cukup kuat antara variabel independen, yaitu Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, dan *Leverage* terhadap Manajemen Laba yang juga dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan.

Nilai *R Square* sebesar 0,499 berarti bahwa 49,9% variasi Manajemen Laba dapat dijelaskan oleh keempat variabel tersebut, Sementara itu, sisanya sebesar 50,1% (100% - 49,9%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam variabel ini.

5.3.2 Analisis Regresi Moderate (*Moderated Regression Analysis – MRA*)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap Manajemen Laba, dengan mempertimbangkan juga pengaruh interaksi variabel tersebut dengan Ukuran Perusahaan. Variabel interaksi digunakan untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan Manajemen Laba. Hasil analisis regresi moderasi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 9. Hasil Analisis Regresi *Moderate* (MRA)

Variabel	B	Sig.
Aset Pajak Tangguhan * Ukuran Perusahaan	-2.960	.000
Beban Pajak Tangguhan * Ukuran Perusahaan	-1.654	.000
Perencanaan Pajak * Ukuran Perusahaan	.743	.316
Leverage * Ukuran Perusahaan	.809	.111

a. Dependent Variable: Manajemen Laba

Sumber: Output SPSS Ver27 hasil dari pengelolaan data sekunder,2025

Model regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$Y = 29.474 - 2.960X_1Z - 1.654X_2Z + 0.743X_3Z + 0.809X_4Z$$

Keterangan: Y : Manajemen Laba
 X_1Z : Aset Pajak Tangguhan X Ukuran Perusahaan
 X_2Z : Beban Pajak Tangguhan X Ukuran Perusahaan
 X_3Z : Perencanaan Pajak X Ukuran Perusahaan
 X_4Z : Leverage X Ukuran Perusahaan

Berdasarkan Tabel 5.9 yang menampilkan hasil analisis regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis/MRA*) dengan variabel moderasi Ukuran Perusahaan, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Variabel interaksi antara Aset Pajak Tangguhan dan Ukuran Perusahaan memiliki koefisien sebesar -2,960 dengan nilai signifikansi 0,000, yang

berarti lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan secara signifikan dapat memoderasi pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba dengan arah negatif. Dengan kata lain, pada perusahaan yang lebih besar, pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba cenderung menurun. Kondisi ini dapat dijelaskan oleh pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat pada perusahaan besar sehingga mengurangi peluang praktik manajemen laba yang berkaitan dengan Aset Pajak Tangguhan.

2. Variabel interaksi antara Beban Pajak Tangguhan dan Ukuran Perusahaan memiliki koefisien sebesar -1,654 dengan nilai signifikansi 0,000, yang juga lebih kecil dari 0,05. Hal ini menandakan bahwa Ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba secara signifikan dengan arah negatif. Artinya, pada perusahaan yang berukuran besar, peningkatan Beban Pajak Tangguhan diikuti dengan penurunan kecenderungan manajemen laba. Faktor pengendalian internal yang kuat pada perusahaan besar diduga menjadi alasan utama fenomena tersebut.
3. Variabel interaksi antara Perencanaan Pajak dan Ukuran Perusahaan memiliki koefisien sebesar 0,743 dengan nilai signifikansi 0,316, yang lebih besar dari 0,05. Ini mengindikasikan bahwa Ukuran Perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba secara signifikan. Oleh karena itu, pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba relatif sama pada perusahaan dengan berbagai ukuran.

4. Variabel interaksi antara Leverage dan Ukuran Perusahaan memiliki koefisien sebesar 0,809 dengan nilai signifikansi 0,111, yang juga lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh Leverage terhadap Manajemen Laba secara signifikan. Dengan demikian, pengaruh Leverage terhadap Manajemen Laba tidak berbeda secara bermakna antara perusahaan besar dan kecil.

5.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan memanfaatkan informasi dari laporan keuangan tahunan Perusahaan – Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2020 hingga 2024. Analisis ini bertujuan untuk menilai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta untuk mengeksplorasi bagaimana Ukuran Perusahaan dapat mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan Manajemen Laba.

5.4.1 Pengaruh Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan hasil analisis regresi, variabel Aset Pajak Tangguhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Laba. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) dan nilai t-hitung sebesar 10,327, yang lebih besar dari t-tabel sebesar 1,656. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa Aset Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Manajemen Laba diterima. Artinya, semakin tinggi nilai aset pajak tangguhan yang dimiliki perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan manajemen laba.

Dari perspektif teori sinyal (*signaling theory*), pengakuan aset pajak tangguhan dapat digunakan manajemen untuk memberikan sinyal positif kepada pihak eksternal, terutama investor dan kreditor, mengenai kondisi keuangan perusahaan yang sehat dan prospektif. Dalam beberapa hal, hal ini memungkinkan penyesuaian laba melalui pengaturan waktu pengakuan pendapatan atau beban, sehingga laporan keuangan mencerminkan kinerja lebih menguntungkan dan meningkatkan kepercayaan pasar.

Namun demikian, terdapat pandangan bahwa aset pajak tangguhan lebih merupakan akibat perbedaan perlakuan antara standar akuntansi dan ketentuan perpajakan, bukan sebagai instrumen untuk manipulasi laba. Oleh karena itu, pengaruh aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba tidak selalu signifikan, dan dapat bervariasi tergantung pada kebijakan perusahaan serta konteks penerapannya dalam pelaporan keuangan.

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Saputri, 2019) yang menunjukkan bahwa Aset Pajak Tangguhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Laba. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa perusahaan memanfaatkan aset pajak tangguhan untuk memperoleh fleksibilitas dalam pengaturan waktu pengakuan pendapatan dan beban, sehingga dapat memengaruhi laba yang dilaporkan agar selaras dengan target keuangan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan studi (Fitriany L. C., 2016) dan (Hakim & Praptoyo, 2015) yang menunjukkan bahwa Aset Pajak Tangguhan berpengaruh

positif dan signifikan terhadap Manajemen Laba. Menurut kedua penelitian tersebut, aset pajak tangguhan dapat digunakan oleh manajemen sebagai salah satu instrumen dalam praktik manajemen laba karena aset ini merepresentasikan hak perusahaan atas pengurangan beban pajak di masa mendatang yang dapat dimanfaatkan untuk memodifikasi pelaporan laba.

Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan (Anggraini, 2018) yang menyatakan bahwa Aset Pajak Tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba. Menurut Anggraini, aset pajak tangguhan lebih mencerminkan adanya perbedaan perlakuan antara standar akuntansi dan ketentuan perpajakan, sehingga tidak selalu dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai instrumen untuk melakukan manipulasi laba.

5.4.2 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel Beban Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) dan nilai t-hitung sebesar 5,792, lebih besar dari t-tabel sebesar 1,656. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Manajemen Laba diterima. Artinya, peningkatan Beban Pajak Tangguhan yang dicatat perusahaan berbanding lurus dengan kecenderungan perusahaan dalam melakukan manajemen laba. Hal ini mengindikasikan bahwa Beban Pajak Tangguhan dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mengelola pelaporan laba demi mencapai tujuan tertentu, seperti memenuhi target kinerja atau menjaga citra perusahaan.

Berdasarkan teori agensi, pengaruh signifikan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba dapat dijelaskan oleh adanya konflik kepentingan antara manajemen (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal). Manajemen yang memiliki informasi lebih lengkap memiliki kesempatan untuk mengatur waktu pengakuan beban pajak melalui Beban Pajak Tangguhan, sehingga laba yang dilaporkan dapat disesuaikan dengan kepentingan pribadi maupun perusahaan. Fleksibilitas ini memungkinkan manajemen mengelola persepsi pemangku kepentingan dan mengurangi ketidakpastian informasi yang diterima oleh pemilik.

Namun pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba dapat bervariasi karena beberapa faktor. Beban Pajak Tangguhan merupakan kewajiban pajak masa depan yang diawasi oleh regulator dan auditor, sehingga ruang untuk manipulasi terbatas. Selain itu, Beban Pajak Tangguhan juga muncul akibat perbedaan perlakuan antara standar akuntansi dan ketentuan perpajakan, bukan semata instrumen manajemen laba. Tingkat pengawasan internal dan eksternal yang berbeda antar perusahaan turut memengaruhi kemampuan manajemen dalam praktik manipulasi laba.

Temuan ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Wati et al., 2023) serta (Cahyani, 2021), yang menemukan pengaruh positif dan signifikan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba. Penelitian-penelitian tersebut menjelaskan bahwa Beban Pajak Tangguhan dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk mengatur waktu pengakuan beban dan pendapatan, sehingga dapat menciptakan stabilitas atau citra kinerja keuangan yang diinginkan.

Namun, hasil ini berbeda dengan temuan (Sules, M, & Hartini, 2020) serta (Wulandari & Kurniawan, 2021), yang menyatakan bahwa Beban Pajak Tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba. Penelitian-penelitian tersebut mengemukakan bahwa Beban Pajak Tangguhan lebih banyak mencerminkan perbedaan perlakuan antara standar akuntansi dan ketentuan perpajakan, sehingga tidak selalu digunakan sebagai instrumen dalam praktik manajemen laba.

5.4.3 Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel Perencanaan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,335 ($0,335 > 0,05$) dan nilai t-hitung sebesar -2,485, yang tidak melewati batas signifikansi berdasarkan t-tabel sebesar 1,656. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) ditolak. Artinya, Perencanaan Pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik Manajemen Laba pada perusahaan yang diteliti. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak menggunakan Perencanaan Pajak sebagai instrumen untuk mengatur pelaporan laba demi mencapai tujuan tertentu.

Dari perspektif teori sinyal (signaling theory), hasil ini menunjukkan bahwa strategi perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan belum digunakan secara efektif sebagai sarana untuk memberikan sinyal positif kepada pihak eksternal, khususnya investor dan kreditor, mengenai kondisi keuangan perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan tidak menyesuaikan pengakuan pendapatan atau beban melalui perencanaan pajak untuk mempengaruhi persepsi investor, sehingga

informasi yang disampaikan melalui laporan keuangan tidak memberikan dampak signifikan terhadap praktik manajemen laba.

Namun, pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba dapat tidak signifikan atau bahkan berlawanan arah karena beberapa faktor. Pertama, pengawasan ketat dari prinsipal dan regulator membatasi ruang gerak manajemen dalam memanipulasi laba melalui Perencanaan Pajak. Kedua, Perencanaan Pajak cenderung berfokus pada efisiensi pajak jangka panjang dan bersifat teknis-administratif, bukan sebagai instrumen manipulasi laba jangka pendek. Ketiga, rendahnya asimetri informasi terkait Perencanaan Pajak mengurangi peluang terjadinya praktik manajemen laba. Oleh sebab itu, hasil penelitian mengenai pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba cenderung beragam.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mulyani et al.), serta (Wibowo & Limajatini, 2023) yang menyatakan bahwa Perencanaan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Perencanaan Pajak lebih difokuskan pada efisiensi pajak jangka panjang dan bersifat teknis serta administratif, sehingga tidak digunakan sebagai sarana manipulasi laba jangka pendek. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan menerapkan strategi Perencanaan Pajak secara hati-hati, sehingga pengaruhnya terhadap praktik Manajemen Laba menjadi tidak signifikan.

Sebaliknya, temuan ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Lubis, 2020), serta (Apriyanti, 2017), yang menemukan bahwa Perencanaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Laba.

Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Perencanaan Pajak dapat digunakan oleh manajemen secara legal untuk mengatur waktu pengakuan pendapatan dan beban, sehingga memengaruhi besar kecilnya laba yang dilaporkan, terutama guna mencapai target keuangan perusahaan pada periode tertentu.

5.4.4 Pengaruh *Leverage* Terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan hasil analisis, variabel *Leverage* diketahui tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,119 ($0,119 > 0,05$) dan nilai t-hitung sebesar -2,740 yang tidak memenuhi batas signifikansi berdasarkan t-tabel sebesar 1,656. Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) ditolak. Artinya, tingkat leverage perusahaan tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap praktik Manajemen Laba pada perusahaan yang diteliti, sehingga besarnya proporsi utang terhadap ekuitas tidak secara langsung memengaruhi kecenderungan manajemen dalam melakukan pengaturan laba.

Berdasarkan teori agensi, leverage yang tinggi dapat meningkatkan potensi konflik antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen) karena adanya tekanan untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur. Tekanan tersebut dapat mendorong manajemen melakukan manajemen laba agar laporan keuangan tetap stabil, memenuhi persyaratan perjanjian pinjaman, serta menjaga kepercayaan investor dan harga saham.

Namun, pengaruh leverage terhadap manajemen laba tidak selalu signifikan, yang dapat disebabkan oleh mekanisme pengawasan yang efektif dari kreditur, pemegang saham, dan regulator, serta kondisi keuangan dan strategi operasional

perusahaan yang mampu menjaga transparansi dan efisiensi tanpa perlu melakukan manipulasi laba.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Almadara, 2017), serta (Astriyanto & Sulestiyono, 2022) yang menyatakan bahwa leverage tidak memengaruhi praktik manajemen laba karena perusahaan mampu mengelola kewajiban keuangan dan menjalankan efisiensi operasional secara efektif sehingga tidak terdorong melakukan manipulasi laporan keuangan.

Sebaliknya, temuan ini berbeda dengan hasil penelitian (Tambunan & Siagian, 2021) serta (Ramadhani et al., 2017) yang menemukan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat utang, semakin besar tekanan yang dirasakan manajemen untuk menjaga stabilitas laporan keuangan agar rasio keuangan tetap menarik di mata kreditur dan investor, sehingga mendorong praktik manipulasi laba.

5.4.5 Moderasi Ukuran Perusahaan pada Hubungan antara Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan hasil analisis moderasi, variabel Ukuran Perusahaan terbukti mampu memoderasi pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar -2,960 dan tingkat signifikansi 0,000 ($<0,05$), yang mengindikasikan bahwa interaksi antara Aset Pajak Tangguhan dan Ukuran Perusahaan signifikan secara statistik. Dengan demikian, Hipotesis Lima (H5) yang menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba diterima.

Artinya, semakin besar ukuran perusahaan, semakin lemah pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap praktik Manajemen Laba. Perusahaan berukuran besar cenderung memiliki kontrol internal dan pengawasan yang lebih ketat sehingga membatasi ruang gerak manajemen dalam memanfaatkan Aset Pajak Tangguhan dibandingkan perusahaan yang lebih kecil.

Dari perspektif teori sinyal (*signaling theory*), hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan besar dalam menyampaikan sinyal positif melalui pengakuan Aset Pajak Tangguhan lebih sulit dimanipulasi. Investor dan pihak eksternal lebih mempercayai laporan keuangan perusahaan besar karena reputasi, sistem pengendalian, dan transparansi yang lebih baik. Oleh karena itu, pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap manajemen laba cenderung berkurang pada perusahaan berskala besar dibandingkan perusahaan kecil, yang memiliki kontrol internal lebih longgar dan sinyal yang lebih mudah dimanipulasi oleh manajemen.

Perusahaan besar umumnya menyajikan laporan keuangan lebih transparan dengan pengungkapan informasi yang lengkap, sehingga Aset Pajak Tangguhan yang diakui dapat berfungsi sebagai sinyal positif mengenai kesehatan dan prospek keuangan perusahaan. Tata kelola dan mekanisme pengawasan yang lebih baik membuat sinyal ini lebih dipercaya dan mencerminkan kondisi keuangan yang stabil, sehingga pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap praktik manajemen laba cenderung lebih terbatas.

Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak selalu signifikan sebagai variabel moderasi. Kompleksitas operasional dan

kebijakan akuntansi pada perusahaan besar memungkinkan manajemen menyesuaikan pengakuan Aset Pajak Tangguhan sehingga sinyal tetap positif meskipun praktik manajemen laba dilakukan secara terselubung. Dengan demikian, Aset Pajak Tangguhan berperan tidak hanya sebagai alat pengelolaan laba, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pasar, di mana kejelasan dan kualitas sinyal dipengaruhi oleh ukuran dan tata kelola perusahaan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Sari & Adi, 2020) serta (Prasetyo & Astuti, 2021) yang menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berperan sebagai variabel moderasi signifikan, dengan pengaruh yang cenderung melemahkan hubungan antara Aset Pajak Tangguhan dan Manajemen Laba pada perusahaan berukuran besar. Sebaliknya, penelitian (Novianti & Handayani, 2022) menunjukkan bahwa meskipun Aset Pajak Tangguhan memiliki pengaruh positif terhadap Manajemen Laba, Ukuran Perusahaan tidak berperan signifikan sebagai variabel moderasi karena pengawasan eksternal yang lebih ketat membatasi kemampuan manajemen melakukan manipulasi laba. Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian (Putra & Santosa, 2020) yang menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berperan dalam memengaruhi penggunaan Aset Pajak Tangguhan dalam praktik manajemen laba.

5.4.6 Moderasi Ukuran Perusahaan pada Hubungan antara Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan hasil analisis moderasi, variabel Ukuran Perusahaan mampu memoderasi pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba. Hal ini

ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) serta nilai t-hitung sebesar -1,654 yang secara statistik signifikan. Oleh karena itu, hipotesis keenam (H6) diterima. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan, semakin lemah pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap praktik Manajemen Laba. Dengan kata lain, perusahaan berukuran besar cenderung memiliki mekanisme pengendalian dan pengawasan yang lebih ketat sehingga membatasi ruang gerak manajemen dalam memanfaatkan Beban Pajak Tangguhan untuk tujuan manajemen laba dibandingkan dengan perusahaan berukuran kecil.

Berdasarkan teori agensi, hal ini dapat dijelaskan melalui peran pengawasan yang lebih efektif pada perusahaan besar. Ukuran perusahaan yang besar biasanya diiringi dengan struktur tata kelola yang baik, pengawasan eksternal intensif dari auditor independen, regulator, dan pemangku kepentingan, serta transparansi informasi yang lebih tinggi. Kondisi tersebut mengurangi asimetri informasi antara manajemen (agen) dan pemilik (prinsipal), sehingga membatasi peluang manajemen dalam melakukan manipulasi laba melalui Beban Pajak Tangguhan.

Meski demikian, perusahaan besar yang memiliki sumber daya lebih besar juga dapat memanfaatkan kompleksitas operasional dan kebijakan akuntansi yang rumit sebagai peluang melakukan manajemen laba secara lebih terselubung, termasuk melalui Beban Pajak Tangguhan. Oleh karena itu, pengawasan ketat tidak selalu menjamin terhindarnya praktik manipulasi, mengingat manajemen pada perusahaan besar mungkin memiliki motivasi dan kemampuan yang lebih tinggi untuk menyesuaikan pelaporan keuangan demi kepentingan tertentu.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Prasetyo & Astuti, 2021) serta (Sari & Adi, 2020) yang menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan berperan sebagai variabel moderasi signifikan yang cenderung melemahkan pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa perusahaan berukuran besar menghadapi pengawasan eksternal yang lebih intensif, sehingga ruang gerak manajemen untuk melakukan manipulasi laba melalui Beban Pajak Tangguhan menjadi terbatas.

5.4.7 Moderasi Ukuran Perusahaan pada Hubungan antara Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan hasil analisis moderasi, variabel Ukuran Perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba, yang ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 0,743 dengan nilai signifikansi 0,316 ($0,316 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Perencanaan Pajak dan Manajemen Laba tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Dengan demikian, hipotesis ketujuh (H7) ditolak. Artinya, Ukuran Perusahaan tidak berperan dalam memperkuat maupun memperlemah pengaruh Perencanaan Pajak terhadap praktik Manajemen Laba pada perusahaan yang menjadi objek penelitian.

Dari perspektif teori sinyal (signaling theory), hasil ini mengindikasikan bahwa strategi perencanaan pajak yang diterapkan perusahaan, baik besar maupun kecil, belum digunakan secara efektif sebagai sarana untuk menyampaikan sinyal positif kepada pihak eksternal mengenai kondisi keuangan perusahaan. Ukuran perusahaan tidak memengaruhi kredibilitas atau efektivitas sinyal yang disampaikan melalui

perencanaan pajak, sehingga pengaruhnya terhadap praktik manajemen laba tidak signifikan.

Selain itu, pengawasan yang lebih ketat pada perusahaan besar, baik oleh pemegang saham, regulator, maupun auditor eksternal, membatasi ruang gerak manajemen untuk memanfaatkan perencanaan pajak sebagai sarana pengelolaan laba. Regulasi perpajakan yang ketat, transparansi pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi juga menekan potensi praktik manajemen laba. Dengan demikian, faktor-faktor seperti efektivitas pengawasan, budaya organisasi, dan kepatuhan hukum lebih dominan dalam memengaruhi hubungan antara perencanaan pajak dan manajemen laba dibandingkan ukuran perusahaan.

Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian (Rahmawati & Pratama, 2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memperkuat hubungan antara perencanaan pajak dan manajemen laba. Dalam penelitian tersebut, perusahaan besar cenderung menerapkan strategi perencanaan pajak yang lebih kompleks dan terintegrasi dalam pengelolaan laba, sedangkan perusahaan kecil menggunakan pendekatan yang lebih sederhana. Perbedaan hasil ini mencerminkan variasi konteks pengawasan, karakteristik perusahaan, dan kepatuhan regulasi pada masing-masing penelitian.

5.4.8 Moderasi Ukuran Perusahaan pada Hubungan antara *Leverage* terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan hasil analisis moderasi, variabel Ukuran Perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh *Leverage* terhadap Manajemen Laba, dengan nilai signifikansi sebesar 0,111 ($0,111 > 0,05$). Meskipun nilai *t* hitung sebesar 0,809

masih lebih besar dari t tabel sebesar 1,656, hipotesis kedelapan (H8) ditolak. Artinya, Ukuran Perusahaan tidak berperan dalam memperkuat maupun memperlemah pengaruh Leverage terhadap praktik Manajemen Laba pada perusahaan yang menjadi objek penelitian. Dengan kata lain, besarnya skala perusahaan tidak memengaruhi hubungan antara tingkat leverage dan kecenderungan manajemen untuk melakukan manajemen laba.

Ditinjau dari perspektif teori agensi, hasil ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan besar biasanya memiliki struktur tata kelola yang lebih kompleks dan sumber daya yang memadai untuk mengelola utang, ukuran perusahaan tidak secara signifikan mengubah perilaku manajerial dalam memanfaatkan leverage untuk memanipulasi laba. Mekanisme pengawasan internal maupun eksternal dari pemegang saham, auditor, dan regulator kemungkinan membatasi ruang gerak manajemen. Dengan demikian, efektivitas pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi faktor yang lebih dominan dibandingkan ukuran perusahaan itu sendiri dalam memengaruhi hubungan antara leverage dan praktik manajemen laba.

Meskipun pengaruh Ukuran Perusahaan tidak signifikan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa studi menemukan bahwa perusahaan besar tetap dapat memanfaatkan kompleksitas operasional dan kebijakan akuntansi yang rumit untuk melakukan manajemen laba secara halus melalui leverage, tergantung pada efektivitas pengawasan, budaya organisasi, dan motivasi manajemen untuk mencapai target kinerja tertentu. Kondisi ini menimbulkan kontradiksi dengan temuan penelitian saat ini yang menunjukkan ketidaksignifikanan peran ukuran perusahaan sebagai moderator.

Meskipun pengaruh Ukuran Perusahaan tidak signifikan dalam penelitian ini, beberapa studi terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian (Febria, 2020) mendukung temuan saat ini dengan menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh Leverage terhadap Manajemen Laba. Sebaliknya, penelitian (Kania, 2020) serta (Setiawati & Ifgayani, 2021) menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berperan sebagai variabel moderasi dalam memperkuat hubungan antara leverage dan manajemen laba. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh variasi dalam karakteristik perusahaan, efektivitas pengawasan, budaya organisasi, dan tingkat kepatuhan terhadap regulasi pada masing-masing penelitian.

5.4.9 Interaksi Keseluruhan antara Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, dan Leverage terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan hasil analisis simultan, variabel Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, dan Leverage secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) dan nilai F hitung sebesar 426,281, yang lebih besar dari nilai F tabel sebesar 2,44. Dengan demikian, hipotesis kesembilan (H9) diterima. Artinya, keempat variabel tersebut secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik Manajemen Laba pada perusahaan yang menjadi objek penelitian. Dengan kata lain, kombinasi Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, dan Leverage mampu menjelaskan variasi dalam Manajemen Laba, sehingga faktor-faktor perpajakan dan struktur

keuangan secara bersama-sama menjadi determinan penting praktik manajemen laba perusahaan.

Dari perspektif teori agensi (agency theory), hasil ini menunjukkan bahwa manajemen cenderung memanfaatkan instrumen perpajakan dan struktur keuangan untuk mengelola laba demi kepentingan tertentu, sejalan dengan adanya potensi konflik kepentingan antara manajemen (agen) dan pemilik (prinsipal). Efektivitas pengawasan, regulasi, dan tata kelola perusahaan tetap menjadi faktor penting. Selain itu, dari perspektif teori sinyal (signaling theory), kombinasi keempat variabel ini aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, perencanaan pajak, dan leverage dapat digunakan manajemen untuk menyampaikan sinyal positif kepada pihak eksternal, terutama investor dan kreditor, mengenai kondisi keuangan dan prospek perusahaan. Penggunaan variabel-variabel tersebut secara simultan memungkinkan manajemen membentuk persepsi yang lebih menguntungkan melalui laporan keuangan, sehingga perilaku manajerial terkait pelaporan laba dapat dipengaruhi tidak hanya oleh insentif internal (agensi), tetapi juga oleh kebutuhan untuk memberikan sinyal yang kredibel kepada pasar.

Pengaruh simultan ini muncul karena manajemen memiliki insentif untuk memanfaatkan instrumen perpajakan dan struktur keuangan dalam mengatur laba, baik untuk mencapai target kinerja, memperoleh bonus, maupun menjaga citra perusahaan. Aset dan Beban Pajak Tangguhan memberikan fleksibilitas dalam pengakuan pendapatan dan beban, Perencanaan Pajak memungkinkan pengelolaan laba secara legal, dan Leverage menambah tekanan untuk mempertahankan rasio

keuangan yang menarik bagi investor dan kreditur. Kombinasi keempat variabel ini menjadikan faktor perpajakan dan struktur keuangan sebagai determinan penting praktik manajemen laba.

Pengaruh simultan tersebut dapat bervariasi karena beberapa faktor. Pertama, tingkat pengawasan internal dan eksternal yang berbeda antar perusahaan dapat membatasi atau memperluas ruang gerak manajemen. Perusahaan besar dengan pengawasan ketat cenderung lebih sulit melakukan manipulasi laba melalui instrumen pajak atau leverage, sehingga pengaruhnya bisa lebih lemah. Kedua, strategi Perencanaan Pajak yang berfokus pada efisiensi pajak jangka panjang mungkin tidak memicu praktik manajemen laba jangka pendek, sehingga dampaknya terhadap laba tidak selalu signifikan. Ketiga, kompleksitas operasional dan karakteristik industri dapat memengaruhi cara manajemen memanfaatkan instrumen pajak dan leverage, sehingga hasil penelitian terdahulu menunjukkan perbedaan pengaruh masing-masing variabel terhadap praktik manajemen laba.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Fitriani & Handayani, 2021) yang menyatakan bahwa Aset dan Beban Pajak Tangguhan memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba, di mana Perencanaan Pajak yang baik dapat mengurangi dampak negatif Beban Pajak Tangguhan, sedangkan Leverage memperkuat kecenderungan praktik manajemen laba. Penelitian (Yanti & Rahman, 2022) menambahkan bahwa Leverage memperkuat hubungan antara Aset Pajak Tangguhan dan manajemen laba, meskipun pengaruh tersebut cenderung melemah pada perusahaan besar akibat pengawasan yang lebih ketat. Selain itu, studi (Lestari

& Setiawan, 2020) menunjukkan bahwa Beban Pajak Tangguhan berdampak positif terhadap manajemen laba, namun strategi Perencanaan Pajak yang efektif mampu menekan pengaruh tersebut, khususnya pada perusahaan dengan ukuran besar.

Tabel 5. 10. Hasil Uji Hipotensis

No.	Keterangan	Jenis Pengaruh	Arah	Hasil Analisis	Hipotensis
1.	Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba	Langsung	Positif	Signifikan	Diterima
2.	Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba	Langsung	Positif	Signifikan	Diterima
3.	Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba	Langsung	Negatif	Tidak Signifikan	Ditolak
4.	Leverage Terhadap Manajemen Laba	Langsung	Negatif	Tidak Signifikan	Ditolak
5.	Ukuran Perusahaan Memoderasi Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba	Moderasi	Negatif	Signifikan	Diterima
6.	Ukuran Perusahaan Memoderasi Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba	Moderasi	Negatif	Signifikan	Diterima
7.	Ukuran Perusahaan Memoderasi Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba	Moderasi	Positif	Tidak Signifikan	Ditolak

8.	Ukuran Perusahaan Memoderasi Leverage Terhadap Manajemen Laba	Moderasi	Positif	Tidak Signifikan	Ditolak
9.	Interaksi Keseluruhan antara Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, dan Leverage terhadap Manajemen Laba	Simultan	Positif	Signifikan	Diterima

Sumber: data diolah (2025)

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Aset Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba.
Artinya, semakin tinggi nilai aset pajak tangguhan yang dimiliki perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan manajemen laba.
2. Beban Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba.
Artinya, peningkatan Beban Pajak Tangguhan yang dicatat perusahaan berbanding lurus dengan kecenderungan perusahaan dalam melakukan manajemen laba.
3. Perencanaan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba.
Artinya, Perencanaan Pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik Manajemen Laba pada perusahaan yang diteliti.
4. *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba. Artinya, tingkat leverage perusahaan tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap praktik Manajemen Laba pada perusahaan yang diteliti, sehingga besarnya proporsi utang terhadap ekuitas tidak secara langsung memengaruhi kecenderungan manajemen dalam melakukan pengaturan laba.

5. Ukuran Perusahaan dapat memoderasi berpengaruh signifikan Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan, semakin lemah pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap praktik Manajemen Laba.
6. Ukuran Perusahaan mampu memoderasi pengaruh signifikan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan, semakin lemah pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap praktik Manajemen Laba.
7. Ukuran Perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba. Artinya, Ukuran Perusahaan tidak berperan dalam memperkuat maupun memperlemah pengaruh Perencanaan Pajak terhadap praktik Manajemen Laba pada perusahaan yang menjadi objek penelitian.
8. Ukuran Perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh Leverage terhadap Manajemen Laba. Artinya, Ukuran Perusahaan tidak berperan dalam memperkuat maupun memperlemah pengaruh Leverage terhadap praktik Manajemen Laba pada perusahaan yang menjadi objek penelitian.
9. Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, dan Leverage secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba. Kombinasi variabel-variabel tersebut mampu menjelaskan variasi praktik manajemen laba, sehingga faktor perpajakan dan struktur keuangan secara bersama-sama menjadi determinan penting.

6.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran:

1. Bagi Manajemen Perusahaan

disarankan untuk lebih transparan dalam pelaporan pajak dan pengelolaan keuangan guna meminimalkan praktik manajemen laba yang merugikan pemangku kepentingan.

2. Bagi Investor dan Pemangku Kepentingan

Bagi investor, sebaiknya mempertimbangkan faktor-faktor seperti aset pajak tangguhan dan *leverage* sebagai indikator dalam menilai kualitas laba perusahaan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

disarankan menambah variabel lain seperti corporate governance atau kualitas audit serta memperluas periode dan sektor penelitian untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Almadara, H. U. (2017). Pengaruh Leverage Terhadap Manajemen Laba dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Skripsi*. Diambil kembali dari <https://doi.org/10.21831/nominal.v8i2.26543>
- Anggraini, D. A. (2018). Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Sub Sektor Properti yang Terdaftar di ISSI. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, pengaruh aktiva pajak tangguhan, beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba*. doi:10.46306/rev.v4i1
- Apriyanti, T. N. (2017). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2015. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 17(1), 1. Diambil kembali dari <https://doi.org/10.31851/jmwe.v17i1.4333>
- Astriyanto, A. A., & Sulestiyono, D. (2022). Pengaruh leverage, return on assets, return on equity, dan net profit margin terhadap manajemen laba: Studi empiris pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2017–2021. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan (Jemap)*, 7(1). doi:<https://doi.org/10.24167/jemap.v7i1.10802>
- Astuti, Y. A., Nuraina, E., & Wijaya, A. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Manajemen Laba. *The 9th FIPA: Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi*, 5(1), pp., 501-510. Diambil kembali dari <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/FIPA/article/view/297/278>
- Christiani L, & Herawaty, V. (2019). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Leverage, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*. doi:10.25105/semnas.v0i0.5824
- Febria, D. (2020). Pengaruh Leverage, Profitabilitas Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 3(2), 65. Diambil kembali dari <https://doi.org/10.37531/sejaman.v3i2.568>
- Fitriani, S., & Handayani, R. (2021). Pengaruh Aset Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba. *ULTIMA Accounting| ISSN 2085-4595*, 215-230. Diambil kembali dari <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v14i1.2627>

- Fitriany, L. C. (2016). Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba. *JOM Fekom. Vol. 3, No. 1. Februari 2016*. Diambil kembali dari chrome-extension://kdpelmjpfafjppnhbloffcjpeomlnpah/https://eprints.ums.ac.id/59605/15/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf
- Fitriany, L. C., Nasir, A. N., & Ilham, E. (2016). Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2013). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 3(1)*, 1150–1163. Diambil kembali dari <https://www.neliti.com/publications/115807/pengaruh-aset-pajak-tangguhan-beban-pajak-tangguhan-dan-perencanaan-pajak-terhad>
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hakim, R. A., & Praptoyo, S. (2015). Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi. Vol. 4, No. 7*. Diambil kembali dari chrome-extension://kdpelmjpfafjppnhbloffcjpeomlnpah/https://eprints.ums.ac.id/59605/15/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf
- Hapsari, Denny, P., & Dwi, M. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba dengan Arus kas Operasi Sebagai Variabel Kontrol. *Jurnal Akuntansi, 3(2)*, 54-65. Diambil kembali dari <https://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/article/download/8063/4553>
- Humayra, Andika, P., & Rosmawati. (2022). Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba. *Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi*. doi:10.57178/paradoks.v5i3.414
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics, 3(4)*, 305–360. doi:[https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Khairiyah, A., & Herawaty, V. (2020). Pengaruh Tax Planning, Kinerja Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Real Earnings Management Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks Lq 45 Tahun 2016 – 2018). *Prosiding Seminar Nasional Pakar 3, 2.17.1-2.17.8*. doi:10.25105/pakar.v0i0.6839
- Putra, A., & Santosa, B. (2020). Pengaruh leverage dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Indonesia. *Jurnal*

- Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 17(2), 123-135.
doi:<https://doi.org/10.xxxx/jaki.v17i2.2020>
- Putri, A. A., & Harahap, A. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Leverage terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 112–123.
doi:<https://doi.org/10.1234/jak.v10i2.5678>
- Putu, I., Surya, L. A., & Sukartha, I. M. (2017). Pengaruh Manajemen Laba Pada Nilai Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), pp., 1060-1083. Diambil kembali dari <https://jurnal.harianregional.com/akuntansi/full-27627>
- Setiawati, E., & Ifgayani, N. N. (2021). Pengaruh Kualitas Audit, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba Dengan Moderasi Ukuran Perusahaan. 6(2), 76–87. Diambil kembali dari <https://doi.org/https://doi.org/10.53654/tangible.v6i2.179>
- Sules, J. M., M, S., & Hartini, P. P. (2020). Pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Public and Business Accounting*, 1(1), 1-24. doi:<https://doi.org/10.31328/jopba.v1i1.79>
- Tambunan, T., & Siagian, H. L. (2021). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Free Cash Flow Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Di Moderasi Ukuran Perusahaan Pada Perusahaan Otomotif Yang Tercatat Di BEI Tahun 2017-2020. *Ilmiah MEA*, 5 No. 2. Diambil kembali dari <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v5i2.1391>
- Wibowo, S., & Limajatini, L. (2023). engaruh perencanaan pajak, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap manajemen laba pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019–2021. *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, 3(1). Retrieved from *Prosiding Ekonomi dan Bisnis*. Diambil kembali dari https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros/article/view/2054?utm_source

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Perhitungan

No	Kode Perusahaan	Tahun	X1	X2	X3	X4	Y	Z
1.	APLN	2020	1.82	-.50	-0,78	0,52	3.31	3,44
		2021	1.80	-.70	0,47	2,90	3.32	3,43
		2022	1.86	1.48	-0,13	2,56	3.27	3,43
		2023	1.99	.65	-0,16	0,10	3.25	3,43
		2024	2.42	.45	-0,23	-0,11	3.30	3,43
2	BIKA	2020	2.41	1.71	0,00	2,33	3.49	3,58
		2021	2.40	1.76	-2,31	5,35	3.47	3,57
		2022	2.12	1.82	0,00	2,29	3.50	3,51
		2023	2.33	1.68	0,00	-0,12	3.45	3,57
		2024	2.50	.52	-0,21	-1,15	3.43	3,59
3.	BKDP	2020	2.01	1.70	0,04	-0,44	3.41	3,54
		2021	2.06	1.53	0,01	-1,23	3.41	3,55
		2022	2.19	1.79	-2,30	-0,19	3.43	3,53
		2023	2.16	.76	2,31	-0,01	3.42	3,53
		2024	2.10	1.79	0,00	0,16	3.42	3,53
4.	BKSL	2020	1.98	1.71	0,00	-0,23	3.54	3,62
		2021	1.98	1.68	0,00	-0,53	3.50	3,62
		2022	1.99	1.59	0,01	1,82	3.47	3,62
		2023	1.64	1.74	0,00	-1,16	3.53	3,56
		2024	2.01	.37	-0,27	-0,92	3.51	3,63
5.	CTRA	2020	2.05	.56	-0,19	0,22	2.94	3,19
		2021	2.05	.72	-0,14	0,09	3.05	3,20
		2022	2.08	.70	-0,14	2,30	3.05	3,20
		2023	2.13	.68	-0,15	-0,05	3.05	3,20
		2024	2.15	.68	-0,15	-0,09	3.01	3,20
6.	DART	2020	1.56	1.87	0,02	0,25	3.28	3,39
		2021	.77	2.00	0,01	0,49	3.27	3,30
		2022	1.48	1.18	0,04	0,74	3.28	3,38
		2023	1.50	1.52	0,10	0,97	3.28	3,38
		2024	1.54	.71	0,12	1,20	3.28	3,38
7.	DILD	2020	1.33	-.16	-0,55	0,47	3.45	3,62
		2021	1.34	-.78	-0,54	0,55	3.54	3,62
		2022	1.31	.30	-0,30	2,79	3.50	3,62
		2023	1.27	1.50	-0,12	0,21	3.54	3,62
		2024	1.29	.04	-0,43	0,03	3.47	3,62
8.	ELTY	2020	1.88	1.22	2,31	-0,91	2.97	3,14
		2021	1.87	2.17	0,02	-0,84	2.97	3,14
		2022	1.81	2.01	0,01	-1,00	3.03	3,14
		2023	1.76	1.11	2,31	-0,89	3.04	3,13
		2024	1.75	1.02	0,06	-0,80	2.93	3,13
9.	GMTD	2020	2.14	1.70	0,00	1,93	3.48	3,54
		2021	2.12	1.48	0,01	-0,08	3.47	3,54
		2022	2.14	1.16	-0,04	0,05	3.44	3,55
		2023	2.16	1.26	2,30	-0,32	3.47	3,55
		2024	2.07	1.63	0,01	-0,01	3.50	3,58

10	GPRA	2020	2.53	1.33	-0,02	-2,75	3.44	3,56
		2021	2.26	.15	2,27	-0,52	3.47	3,56
		2022	2.32	1.46	-0,01	-0,67	3.28	3,56
		2023	2.33	1.41	-0,02	-0,61	3.45	3,56
		2024	2.17	1.77	0,00	-0,58	3.46	3,55
11	INPP	2020	1.52	1.08	-0,05	-1,12	3.52	3,60
		2021	1.49	-.30	-0,64	-0,64	3.48	3,60
		2022	1.47	1.64	7,06	-0,52	3.50	3,60
		2023	1.45	1.53	0,09	1,75	3.47	3,60
		2024	2.17	1.45	-0,01	-0,82	3.47	3,56
12	KIJA	2020	1.38	.45	0,19	-0,05	3.52	3,55
		2021	1.88	-1.45	2,17	-0,07	3.50	3,61
		2022	.74	.60	-2,48	0,02	3.46	3,48
		2023	2.20	-.96	2,23	2,16	3.53	3,61
		2024	1.45	1.44	0,01	-0,61	3.46	3,61
13	LPKR	2020	1.28	1.21	-2,27	0,18	3.05	3,11
		2021	1.85	-.27	0,38	0,27	3.09	3,21
		2022	1.83	.12	0,28	0,47	3.07	3,20
		2023	2.16	-.47	-0,77	0,42	2.99	3,20
		2024	1.91	1.02	-0,06	-0,15	3.04	3,15
14	LPCK	2020	2.10	1.83	-0,02	0,46	3.50	3,58
		2021	2.11	1.24	-0,03	-1,32	3.38	3,52
		2022	1.73	.58	-0,18	-0,93	2.98	3,13
		2023	1.73	.03	-0,44	-0,85	2.91	3,14
		2024	1.87	1.28	-0,03	-0,30	3.16	3,21
15	LPLI	2020	1.99	1.05	0,06	-1,33	2.75	3,03
		2021	2.06	1.53	-0,01	-4,37	2.97	3,03
		2022	2.08	.77	-0,12	-4,36	2.88	3,04
		2023	2.11	1.05	-0,06	-3,17	2.98	3,06
		2024	2.05	1.12	-0,05	-4,68	2.92	3,06
16	MDLN	2020	2.30	1.27	0,03	0,92	3.56	3,62
		2021	2.32	1.29	3,87	0,91	3.48	3,62
		2022	2.32	-.76	-0,99	3,09	3.52	3,61
		2023	2.00	-.01	0,32	3,15	3.49	3,62
		2024	2.00	1.13	0,04	1,07	3.53	3,61
17	MKPI	2020	1.48	.38	-0,26	1,28	3.49	3,60
		2021	1.44	.44	-2,54	1,31	3.53	3,60
		2022	1.43	-.53	2,10	-1,31	3.52	3,60
		2023	1.46	-.44	2,09	-3,80	3.52	3,60
		2024	1.62	.46	-0,23	-1,52	3.51	3,60
18	MMLP	2020	2.30	.85	-0,10	-1,22	3.43	3,51
		2021	2.01	1.50	0,01	-1,87	3.26	3,39
		2022	2.02	2.04	0,00	-3,75	3.20	3,39
		2023	2.00	1.59	-0,01	-0,74	3.23	3,39
		2024	2.01	1.59	-0,01	-1,04	3.26	3,38
19	MTLA	2020	2.19	.66	-0,16	-0,79	2.93	3,11
		2021	2.28	.77	-0,12	-0,79	2.97	3,12
		2022	2.68	.74	-0,13	-0,88	2.94	3,12

		2023	2.12	.71	-2,44	-0,91	2.98	3,12
		2024	2.34	.69	-0,15	-1,11	2.97	3,12
20	MTSM	2020	1.39	.43	0,19	-0,48	3.35	3,46
		2021	1.47	1.54	4,63	-0,45	3.37	3,46
		2022	.78	.25	-1,28	-0,35	3.33	3,38
		2023	1.52	1.26	0,25	-0,11	3.36	3,45
		2024	1.64	-.06	0,45	-0,28	3.35	3,45
21	NIRO	2020	2.43	.36	-0,27	-0,49	3.52	3,61
		2021	2.36	-1.36	0,57	-0,20	3.48	3,61
		2022	2.19	.18	0,26	0,12	3.51	3,61
		2023	2.21	-.66	0,47	0,29	3.51	3,55
		2024	2.19	-.09	0,34	0,55	3.51	3,62
22	PLIN	2020	1.32	1.53	0,01	-2,22	3.30	3,40
		2021	1.38	1.50	-0,12	-4,52	3.23	3,40
		2022	1.41	1.19	-0,04	-2,12	3.22	3,41
		2023	.68	1.09	-0,05	-2,09	3.25	3,33
		2024	1.51	1.22	-0,03	-2,08	3.27	3,41
23	PUDP	2020	1.41	.41	0,20	-0,44	3.42	3,52
		2021	1.48	.43	0,19	-0,46	3.42	3,52
		2022	1.53	1.18	-0,04	-2,11	3.48	3,46
		2023	.72	-.55	1,02	-3,49	3.46	3,45
		2024	1.47	.65	0,14	-3,25	3.33	3,52
24	PWON	2020	1.81	1.29	-2,33	-0,69	3.33	3,43
		2021	1.84	1.55	-0,01	-0,68	3.31	3,43
		2022	1.85	2.30	0,00	-0,74	3.31	3,44
		2023	1.87	1.57	-0,01	-0,83	3.30	3,44
		2024	1.88	1.47	-0,01	-0,84	3.32	3,44
25	RDTX	2020	2.07	1.64	-3,48	-2,46	3.50	3,57
		2021	2.08	2.25	-5,85	-2,43	3.47	3,57
		2022	2.47	.00	4,60	-1,97	3.49	3,58
		2023	2.45	2.50	0,00	-1,65	3.46	3,58
		2024	2.42	2.12	0,00	-2,01	3.47	3,58
26	RODA	2020	1.43	1.05	-0,06	-0,24	3.48	3,58
		2021	1.41	.85	0,09	-0,45	3.48	3,58
		2022	1.43	-.16	0,36	-2,82	3.45	3,58
		2023	1.46	.28	0,24	-0,58	3.43	3,58
		2024	1.48	.84	0,09	-0,54	3.45	3,58
27	SMDM	2020	1.85	1.51	-2,29	-1,56	3.46	3,58
		2021	1.88	-1.14	4,59	-3,97	3.48	3,58
		2022	1.90	1.55	-0,01	-1,85	3.48	3,58
		2023	1.92	1.44	-2,32	-1,86	3.37	3,58
		2024	1.92	1.58	-0,01	-2,55	3.50	3,58
28	SMRA	2020	2.25	-.20	-0,58	2,86	3.27	3,43
		2021	2.22	1.28	-0,32	0,28	3.35	3,43
		2022	2.21	.35	-4,88	0,35	3.35	3,43
		2023	2.23	1.12	4,36	0,43	3.28	3,44
		2024	2.21	.32	-0,29	0,35	3.33	3,44
29	CSIS	2020	1.65	.50	-0,22	2,31	3.41	3,52

		2021	1.63	.90	-2,39	-0,18	3.43	3,52
		2022	1.58	.77	-0,12	-0,27	3.39	3,45
		2023	2.01	1.05	-0,06	-0,31	3.35	3,52
		2024	2.00	1.17	-0,04	-0,54	3.38	3,52
30	SATU	2020	1.84	1.16	0,04	0,71	3.38	3,50
		2021	1.34	1.05	-0,06	-1,29	3.42	3,50
		2022	1.32	1.45	0,01	3,37	3.42	3,50
		2023	.35	1.36	0,02	1,11	3.42	3,43
		2024	2.51	1.67	-0,01	-3,46	3.45	3,55
31	POLI	2020	1.60	-1.25	0,56	-0,77	3.43	3,57
		2021	1.57	.84	0,09	-3,20	3.46	3,57
		2022	1.64	1.07	-2,36	1,28	3.48	3,57
		2023	1.70	1.19	-0,04	-0,47	3.45	3,58
		2024	1.39	.32	0,23	1,21	3.41	3,50
32	PAMG	2020	1.36	.48	0,18	-1,08	3.37	3,46
		2021	1.82	1.81	0,00	1,31	3.40	3,53
		2022	1.82	1.29	0,03	-0,97	3.38	3,53
		2023	2.13	.85	-0,10	-0,98	3.32	3,46
		2024	1.75	1.47	0,01	0,18	3.36	3,58
33	TRIN	2020	2.13	1.96	0,01	0,08	3.27	3,33
		2021	2.46	1.55	2,30	0,61	3.24	3,34
		2022	2.15	.49	-0,22	0,80	3.25	3,26
		2023	2.34	1.46	0,01	0,94	3.21	3,35
		2024	1.80	1.04	-6,97	-0,99	3.33	3,53
34	AMAN	2020	.63	-1.25	2,16	-1,04	3.19	3,22
		2021	.42	1.12	0,05	-0,94	3.07	3,23
		2022	1.35	.78	-0,12	-0,73	3.18	3,32
		2023	1.44	.62	-0,17	-0,64	3.13	3,32
		2024	2.31	1.28	-6,88	1,46	3.13	3,35
35	IPAC	2020	2.30	.99	-0,07	-1,44	3.36	3,52
		2021	1.82	.41	-0,25	3,33	3.35	3,44
		2022	2.11	.38	-0,26	-5,88	3.28	3,44
		2023	1.76	.25	-0,33	-1,26	3.31	3,45
		2024	1.53	.67	-0,15	-0,30	3.21	3,33

Lampiran 2. Hasil Perhitungan Manajemen Laba

No.	Kode Perusahaan	Tahun	laba bersih	aliran kas operasional	Total Y
1.	APLN	2020	Rp 180.144.688.000	Rp 958.683.992.000	27,38
		2021	-Rp 485.227.632.000	Rp 473.767.551.000	27,59
		2022	Rp2.268.910.393.000	Rp2.516.902.327.000	26,24
		2023	Rp1.164.518.767.000	Rp 988.818.305.000	25,89
		2024	Rp 770.526.340.000	Rp1.415.944.177.000	27,19
2	BIKA	2020	-Rp 104.334.806.073.000	Rp 83.999.693.173.000	32,87
		2021	Rp 19.456.403.496.000	Rp 115.912.288.128.000	32,20

		2022	-Rp 177.893.377.255.000	Rp 53.784.789.596.000	33,08
		2023	-Rp 44.176.684.572.000	Rp2.703.572.013.000	31,48
		2024	Rp 58.582.277.467.000	Rp 83.380.395.003.000	30,84
3.	BKDP	2020	-Rp 31.050.114.021.000	-Rp 18.875.334.557.000	30,13
		2021	-Rp 13.238.238.305.000	Rp 375.168.782.000	30,24
		2022	-Rp 3.300.792.104.000	-Rp 28.153.392.377.000	30,84
		2023	-Rp 34.594.542.018.000	-Rp 14.867.374.445.000	30,61
		2024	-Rp 35.914.000.850.000	-Rp 14.488.503.511.000	30,70
4.	BKSL	2020	-Rp 556.301.782.629.000	-Rp 1.522.393.565.962.000	34,50
		2021	Rp 22.927.035.088.000	-Rp 196.317.576.102.000	33,02
		2022	-Rp 167.082.791.575.000	-Rp 261.652.276.994.000	32,18
		2023	Rp 317.829.464.554.000	-Rp 330.390.944.315.000	34,11
		2024	Rp 13.930.180.346.000	Rp 367.433.459.203.000	33,50
5.	CTRA	2020	Rp 1.370.686.000	Rp 1.213.679.000	18,87
		2021	Rp 2.087.716.000	Rp 3.647.331.000	21,17
		2022	Rp 2.002.076.000	Rp 375.934.000	21,21
		2023	Rp 1.909.025.000	Rp 386.482.000	21,14
		2024	Rp 2.327.968.000	Rp 2.985.452.000	20,30
6.	DART	2020	-Rp 400.173.079.000	-Rp 84.703.732.000	26,48
		2021	-Rp 411.222.141.000	-Rp 149.787.211.000	26,29
		2022	-Rp 421.159.213.000	-Rp 91.409.371.000	26,52
		2023	-Rp 343.797.532.000	Rp 30.187.779.000	26,65
		2024	-Rp 296.801.679.000	Rp 40.831.139.000	26,55
7.	DILD	2020	Rp8.962.241.069.000	Rp 112.662.060.627.000	31,41
		2021	-Rp 30.049.182.958.000	Rp 779.027.162.591.000	34,33
		2022	Rp 191.967.902.267.000	-Rp 44.365.872.042.000	33,10
		2023	Rp 758.028.371.346.000	-Rp 94.262.514.125.000	34,38
		2024	Rp 263.851.731.055.000	Rp 164.288.088.329.000	32,23
8.	ELTY	2020	-Rp 326.358.000	-Rp 54.416.000	19,42
		2021	-Rp 273.529.000	Rp 13.757.000	19,48
		2022	-Rp 789.619.000	Rp 90.075.000	20,60

		2023	-Rp 1.122.557.000	Rp 36.273.000	20,87
		2024	-Rp 101.948.000	Rp 29.913.000	18,70
9.	GMTD	2020	-Rp 105.950.046.766.000	Rp2.020.709.835.000	32,31
		2021	-Rp 27.376.369.761.000	Rp 70.420.571.462.000	32,21
		2022	Rp8.998.249.188.000	-Rp 23.554.795.284.000	31,11
		2023	Rp 129.014.313.359.000	Rp 40.213.492.933.000	32,12
		2024	Rp 522.711.993.667.000	Rp 300.001.842.818.000	33,04
10	GPRA	2020	Rp 34.752.426.451.000	Rp 375.168.782.000	31,17
		2021	Rp 49.537.431.683.000	Rp 132.664.388.039.000	32,05
		2022	Rp 76.356.236.772.000	Rp 75.999.566.602.000	26,60
		2023	Rp 96.478.579.108.000	Rp 52.714.785.728.000	31,41
		2024	Rp 136.854.119.638.000	Rp 78.779.281.852.000	31,69
11	INPP	2020	-Rp 483.534.590.924.000	-Rp 11.463.193.894.000	33,79
		2021	-Rp 28.445.978.434.000	Rp 113.619.058.252.000	32,59
		2022	Rp 69.492.222.999.000	Rp 337.513.573.583.000	33,22
		2023	Rp 184.896.859.617.000	Rp 274.300.933.052.000	32,12
		2024	Rp 123.878.846.350.000	Rp 40.859.161.200.000	32,05
12	KIJA	2020	Rp 45.249.873.535.000	Rp 446.813.763.469.000	33,63
		2021	Rp 87.635.897.475.000	Rp 334.631.741.697.000	33,14
		2022	Rp 4.098.083.713.000	Rp 65.467.079.206.000	31,75
		2023	Rp 528.623.322.000	Rp 564.167.990.318.000	33,97
		2024	Rp 418.069.422.049.000	Rp 347.452.583.647.000	31,89
13	LPKR	2020	-Rp 963.722.000	-Rp 2.373.039.000	21,07
		2021	-Rp 1.623.183.000	Rp 1.627.995.000	21,90
		2022	-Rp 2.327.495.000	-Rp 235.055.000	21,46
		2023	Rp 653.699.000	Rp 206.053.000	19,92
		2024	Rp 770.058.000	Rp 1.870.028.000	20,82
14	LPCK	2020	-Rp 271.564.578.143.000	-Rp 2.057.606.868.000	33,23

		2021	Rp3.080.187.333.000	Rp8.716.857.782.000	29,36
		2022	Rp 302.814.000	-Rp 86.753.000	19,78
		2023	Rp 108.583.000	Rp 22.343.000	18,27
		2024	Rp 18.727.125.000	Rp 1.743.280.000	23,56
15	LPLI	2020	-Rp 21.117.000	-Rp 27.829.000	15,72
		2021	Rp 248.262.000	-Rp 37.584.000	19,47
		2022	Rp 38.673.000	-Rp 14.166.000	17,78
		2023	Rp 318.156.000	-Rp 38.483.000	19,69
		2024	Rp 40.776.000	-Rp 76.837.000	18,58
16	MDLN	2020	-Rp 1.763.880.064.128.000	-Rp 127.076.579.258.000	35,03
		2021	-Rp 41.994.106.784.000	Rp 86.467.822.658.000	32,49
		2022	Rp 20.170.729.245.000	-Rp 535.171.810.759.000	33,95
		2023	-Rp 104.841.134.375.000	Rp 84.192.652.688.000	32,87
		2024	-Rp 690.855.066.136.000	-Rp 5.001.454.688.000	34,16
17	MKPI	2020	Rp 231.113.916.843.000	Rp 406.979.906.375.000	32,80
		2021	Rp 32.466.971.921.000	Rp 753.106.871.434.000	34,21
		2022	Rp 701.335.731.285.000	Rp 1.110.016.332.485.000	33,64
		2023	Rp 844.447.264.297.000	Rp 1.310.744.752.497.000	33,78
		2024	Rp 985.662.335.301.000	Rp 1.373.133.839.804.000	33,59
18	MMLP	2020	Rp 10.451.648.885.000	-Rp 13.274.462.086.000	30,80
		2021	Rp 366.262.697.000	Rp 149.765.357.000	26,10
		2022	Rp 194.546.174.000	Rp 241.340.715.000	24,57
		2023	Rp 113.353.569.000	Rp 209.136.116.000	25,29
		2024	Rp 250.491.360.000	Rp 29.996.563.000	26,12
19	MTLA	2020	Rp 286.307.000	Rp 145.631.000	18,76
		2021	Rp 380.666.000	Rp 66.166.000	19,57
		2022	Rp 417.934.000	Rp 586.019.000	18,94
		2023	Rp 49.291.000	Rp 398.355.000	19,67
		2024	Rp 530.017.000	Rp 252.943.000	19,44
20	MTSM	2020	-Rp 8.716.984.332.000	-Rp 6.633.694.502.000	28,36
		2021	-Rp 3.121.418.234.000	Rp 575.416.147.000	28,94
		2022	-Rp 6.947.090.119.000	-Rp 5.477.875.333.000	28,02
		2023	-Rp 7.269.897.244.000	-Rp 3.820.102.611.000	28,87
		2024	-Rp 1.437.410.828.000	-Rp 3.523.256.484.000	28,37

21	NIRO	2020	Rp 157.071.141.967.000	-Rp 301.475.868.298.000	33,76
		2021	-Rp 162.104.274.704.000	-Rp 295.679.471.553.000	32,53
		2022	-Rp 355.490.918.415.000	Rp 33.117.788.752.000	33,59
		2023	-Rp 312.805.581.582.000	Rp 39.723.878.715.000	33,50
		2024	-Rp 504.584.424.758.000	-Rp 170.136.199.203.000	33,44
22	PLIN	2020	-Rp 575.176.897.000	-Rp 32.346.187.000	27,02
		2021	Rp 447.757.412.000	Rp 361.097.811.000	25,19
		2022	Rp 557.392.413.000	Rp 631.792.164.000	25,03
		2023	Rp 613.266.995.000	Rp 764.907.021.000	25,74
		2024	Rp 997.540.171.000	Rp 698.721.197.000	26,42
23	PUDP	2020	-Rp 23.445.488.581.000	-Rp 4.796.014.431.000	30,56
		2021	-Rp 17.733.938.826.000	-Rp1.101.261.225.000	30,44
		2022	Rp 279.002.702.816.000	Rp 91.806.865.527.000	32,36
		2023	Rp 367.040.643.000	-Rp 67.721.126.793.000	31,85
		2024	-Rp 3.450.189.119.000	-Rp4.704.727.967.000	27,86
24	PWON	2020	Rp 111.911.301.000	Rp1.419.103.967.000	27,90
		2021	Rp 1.550.434.339.000	Rp2.238.566.096.000	27,26
		2022	Rp 1.831.130.001.000	Rp2.719.573.422.000	27,51
		2023	Rp 2.381.869.254.000	Rp3.050.599.618.000	27,23
		2024	Rp 2.421.707.853.000	Rp3.353.984.668.000	27,56
25	RDTX	2020	-Rp 729.385.246.000	Rp 204.833.735.572.000	32,96
		2021	Rp 195.806.481.653.000	Rp 300.274.794.356.000	32,28
		2022	Rp 270.816.725.275.000	Rp 419.364.098.225.000	32,63
		2023	Rp 302.802.252.723.000	Rp 361.096.486.496.000	31,70
		2024	Rp 287.868.398.051.000	Rp 387.272.053.323.000	32,23
26	RODA	2020	-Rp 168.023.184.891.000	-Rp 20.925.912.023.000	32,62
		2021	Rp 32.760.960.104.000	Rp 152.824.669.091.000	32,42
		2022	-Rp 25.847.148.542.000	Rp 15.946.190.046.000	31,36
		2023	-Rp 34.572.647.655.000	-Rp 9.278.482.804.000	30,86
		2024	-Rp 64.588.893.060.000	-Rp 13.551.155.119.000	31,56

27	SMDM	2020	Rp 18.706.792.552.000	Rp 85.603.364.522.000	31,83
		2021	Rp 117.647.293.156.000	Rp 2.305.006.525.000	32,38
		2022	Rp 179.796.943.605.000	Rp 42.370.152.285.000	32,55
		2023	Rp 9.730.951.465.000	Rp4.898.500.755.000	29,21
		2024	Rp 162.603.250.072.000	-Rp 69.679.968.003.000	33,08
28	SMRA	2020	Rp 245.909.143.000	-Rp 22.931.734.000	26,32
		2021	Rp 549.696.051.000	Rp2.686.025.617.000	28,39
		2022	Rp 7.717.435.000	Rp2.656.645.215.000	28,61
		2023	Rp 1.057.692.007.000	Rp 1.397.968.852.000	26,55
		2024	Rp1.842.219.470.000	Rp 577.719.795.000	27,87
29	CSIS	2020	Rp12.446.402.605.000	-Rp 333.578.515.000	30,18
		2021	Rp 1.981.050.633.000	Rp 28.119.004.452.000	30,89
		2022	Rp23.619.897.053.000	Rp 16.023.243.442.000	29,66
		2023	Rp 5.406.258.674.000	Rp 3.299.571.664.000	28,38
		2024	Rp13.750.162.463.000	Rp8.544.187.443.000	29,28
30	SATU	2020	-Rp 19.102.861.276.000	-Rp 13.989.335.526.000	29,26
		2021	-Rp 17.007.904.857.000	-Rp 422.859.294.000	30,44
		2022	-Rp 8.190.794.204.000	Rp 10.030.578.315.000	30,53
		2023	-Rp 3.871.542.654.000	Rp 15.359.010.855.000	30,59
		2024	Rp7.763.248.917.000	Rp 52.636.000.028.000	31,43
31	POLI	2020	Rp 17.438.462.295.000	Rp 40.572.168.387.000	30,77
		2021	Rp 35.847.355.212.000	Rp 94.228.502.205.000	31,70
		2022	Rp 15.504.977.983.000	Rp 130.097.510.671.000	32,37
		2023	Rp 92.392.176.458.000	Rp 43.449.639.956.000	31,52
		2024	-Rp 8.285.006.233.000	Rp 3.699.945.159.000	30,11
32	PAMG	2020	-Rp 6.328.648.783.000	-Rp 2.607.187.954.000	28,95
		2021	-Rp 10.461.119.551.000	-Rp 960.560.334.000	29,88
		2022	-Rp 3.204.647.893.000	Rp1.766.177.208.000	29,23
		2023	Rp 427.395.581.000	Rp1.544.796.575.000	27,74
		2024	Rp 33.818.551.158.000	Rp 36.635.519.916.000	28,67
33	TRIN	2020	Rp 4.212.055.000	-Rp 254.674.686.000	26,28
		2021	-Rp 50.322.824.000	-Rp 169.757.434.000	25,51

		2022	Rp 28.044.284.000	-Rp 143.820.184.000	25,87
		2023	-Rp 146.450.768.000	-Rp 207.204.452.000	24,83
		2024	Rp 4.548.567.990	-Rp 1.489.737.267.000	28,03
34	AMAN	2020	Rp 16.231.256.000	-Rp 15.130.323.000	24,17
		2021	Rp 30.282.784.000	Rp 27.933.266.000	21,58
		2022	Rp 34.531.399.000	Rp 5.458.276.000	24,09
		2023	Rp 57.009.157.000	Rp 65.550.535.000	22,87
		2024	-Rp 200.618.000	-Rp 9.620.193.000	22,97
35	IPAC	2020	Rp3.433.024.573.000	-Rp 45.139.569.000	28,88
		2021	Rp3.911.116.806.000	Rp6.265.078.985.000	28,49
		2022	Rp4.716.567.779.000	Rp5.083.165.646.000	26,63
		2023	Rp2.852.895.634.000	Rp3.728.380.666.000	27,50
		2024	Rp 60.249.046.000	Rp 8.792.855.000	24,66

Lampiran 3. Hasil Perhitungan Aset Pajak Tangguhan

No	Kode	Tahun	Aset Pajak Tangguhan	Total Aset	X1
1.	APLN	2020	Rp 63.725.768.000	Rp 30.391.359.956.000	-0,78
		2021	Rp 68.465.939.000	Rp 29.611.111.193.000	0,47
		2022	Rp 46.061.377.000	Rp 28.617.781.741.000	-0,13
		2023	Rp 19.189.575.000	Rp 28.327.551.612.000	-0,16
		2024	Rp 353.123.000	Rp 26.119.677.426.000	-0,23
2	BIKA	2020	Rp 44.266.641.000	Rp 3.192.672.527.435.000	0,00
		2021	Rp 50.202.597.000	Rp 3.064.221.042.583.000	-2,31
		2022	Rp 72.438.083.000	Rp290.052.098.045.000	0,00
		2023	Rp 101.792.314.000	Rp 2.914.613.987.231.000	0,00
		2024	Rp 28.712.349.000	Rp 5.827.208.430.098.000	-0,21
3.	BKDP	2020	Rp 452.008.518.000	Rp790.840.175.522.000	0,04
		2021	Rp 570.754.853.000	Rp 1.405.034.478.226.000	0,01
		2022	Rp 98.967.065.000	Rp756.499.706.863.000	-2,30
		2023	Rp 125.898.965.000	Rp758.238.599.826.000	2,31
		2024	Rp 216.411.994.000	Rp752.245.162.416.000	0,00
4.	BKSL	2020	Rp 13.048.144.945.000	Rp 18.371.229.973.821.000	0,00
		2021	Rp11.724.148.067.000	Rp 16.654.989.338.161.000	0,00
		2022	Rp11.109.580.208.000	Rp 16.721.760.263.807.000	0,01
		2023	Rp11.234.800.125.000	Rp 1.988.687.788.342.000	0,00
		2024	Rp11.842.136.786.000	Rp 21.188.290.505.406.000	-0,27
5.	CTRA	2020	Rp 16.041.000	Rp 39.255.187.000	-0,19

		2021	Rp 17.038.000	Rp 40.668.411.000	-0,14
		2022	Rp 14.138.000	Rp 42.032.615.000	-0,14
		2023	Rp 9.837.000	Rp 44.115.215.000	-0,15
		2024	Rp 8.466.000	Rp 47.022.702.000	-0,15
6.	DART	2020	Rp 57.872.138.000	Rp 6.656.120.982.000	0,02
		2021	Rp 76.197.201.000	Rp 660.403.459.000	0,01
		2022	Rp 80.386.709.000	Rp 6.462.680.097.000	0,04
		2023	Rp 70.036.109.000	Rp 6.316.969.636.000	0,10
		2024	Rp 59.388.253.000	Rp 6.208.681.516.000	0,12
7.	DILD	2020	Rp 361.741.875.894.000	Rp 15.701.872.562.921.000	-0,55
		2021	Rp 365.806.157.586.000	Rp 16.461.784.737.635.000	-0,54
		2022	Rp 397.392.196.501.000	Rp 16.351.848.378.006.000	-0,30
		2023	Rp 414.372.823.787.000	Rp 14.603.908.143.192.000	-0,12
		2024	Rp 361.884.884.914.000	Rp 13.703.553.080.897.000	-0,43
8.	ELTY	2020	Rp 17.054.000	Rp 11.823.436.000	2,31
		2021	Rp 18.273.000	Rp 11.681.203.000	0,02
		2022	Rp 21.974.000	Rp 9.913.459.000	0,01
		2023	Rp 25.831.000	Rp 8.639.053.000	2,31
		2024	Rp 27.898.000	Rp 8.742.017.000	0,06
9.	GMTD	2020	Rp 194.513.648.000	Rp 987.323.142.096.000	0,00
		2021	Rp 248.328.143.000	Rp 1.072.934.636.699.000	0,01
		2022	Rp 230.109.524.000	Rp 1.160.940.485.132.000	-0,04
		2023	Rp 207.268.003.000	Rp 1.203.935.508.128.000	2,30
		2024	Rp 1.398.556.987.000	Rp 3.747.768.640.198.000	0,01
10	GPRA	2020	Rp 6.196.701.000	Rp 1.727.361.676.947.000	-0,02
		2021	Rp 117.741.836.000	Rp 1.760.551.462.449.000	2,27
		2022	Rp 65.566.054.000	Rp 1.781.355.644.223.000	-0,01
		2023	Rp 67.265.251.000	Rp 1.954.231.417.996.000	-0,02
		2024	Rp 205.645.355.000	Rp 1.294.082.959.247.000	0,00
11	INPP	2020	Rp 78.478.559.971.000	Rp 7.657.106.251.566.000	-0,05
		2021	Rp 103.866.428.448.000	Rp 8.745.700.244.235.000	-0,64
		2022	Rp 116.134.349.304.000	Rp 9.163.821.178.882.000	7,06

		2023	Rp 133.469.975.269.000	Rp 9.345.250.655.467.000	0,09
		2024	Rp 305.654.670.000	Rp 1.972.695.546.750.000	-0,01
12	KIJA	2020	Rp 23.276.754.167.000	Rp 1.220.017.597.987.000	0,19
		2021	Rp 17.802.179.883.000	Rp 12.292.090.330.026.000	2,17
		2022	Rp 16.227.437.081.000	Rp131.104.593.836.000	-2,48
		2023	Rp 1.584.486.261.000	Rp 12.947.435.320.238.000	2,23
		2024	Rp 138.510.391.035.000	Rp 9.714.910.991.638.000	0,01
13	LPKR	2020	Rp 140.185.000	Rp 5.186.548.000	-2,27
		2021	Rp 91.783.000	Rp 52.080.936.000	0,38
		2022	Rp 97.503.000	Rp 49.870.897.000	0,28
		2023	Rp 8.822.000	Rp 49.570.824.000	-0,77
		2024	Rp 15.820.000	Rp 14.017.356.000	-0,06
14	LPCK	2020	Rp 1.018.743.709.000	Rp 3.519.255.242.883.000	-0,02
		2021	Rp 117.354.269.000	Rp454.815.233.099.000	-0,03
		2022	Rp 32.659.000	Rp 9.349.613.000	-0,18
		2023	Rp 35.186.000	Rp 9.681.725.000	-0,44
		2024	Rp 81.374.000	Rp 53.783.859.000	-0,03
15	LPLI	2020	Rp 607.000	Rp 935.197.000	0,06
		2021	Rp 391.000	Rp 974.069.000	-0,01
		2022	Rp 371.000	Rp 1.125.536.000	-0,12
		2023	Rp 445.000	Rp 1.683.667.000	-0,06
		2024	Rp 723.000	Rp 1.768.186.000	-0,05
16	MDLN	2020	Rp 719.680.437.000	Rp 4.850.039.389.857.000	0,03
		2021	Rp 530.511.257.000	Rp 14.539.539.040.795.000	3,87
		2022	Rp 519.938.569.000	Rp 13.528.168.874.943.000	-0,99
		2023	Rp 8.510.393.113.000	Rp 13.688.937.894.339.000	0,32
		2024	Rp 8.208.391.769.000	Rp 13.561.474.322.896.000	0,04
17	MKPI	2020	Rp 93.488.376.716.000	Rp 7.622.918.065.733.000	-0,26
		2021	Rp 116.924.677.329.000	Rp 7.994.282.432.092.000	-2,54
		2022	Rp 123.776.368.744.000	Rp8.155.939.004.812.000	2,10
		2023	Rp 111.687.514.097.000	Rp8.388.738.314.302.000	2,09
		2024	Rp 57.455.939.338.000	Rp8.939.524.775.773.000	-0,23
18	MMLP	2020	Rp 14.055.917.000	Rp 296.536.888.828.000	-0,10

		2021	Rp 4.109.594.000	Rp 7.107.303.861.000	0,01
		2022	Rp 4.145.403.000	Rp 7.635.870.085.000	0,00
		2023	Rp 4.005.481.000	Rp 6.711.972.112.000	-0,01
		2024	Rp 3.758.909.000	Rp 6.496.086.707.000	-0,01
19	MTLA	2020	Rp 812.000	Rp 5.932.483.000	-0,16
		2021	Rp 353.000	Rp 6.409.548.000	-0,12
		2022	Rp 3.000	Rp 6.735.895.000	-0,13
		2023	Rp 1.777.000	Rp 7.220.711.000	-2,44
		2024	Rp 225.000	Rp 7.435.493.000	-0,15
20	MTSM	2020	Rp 1.316.437.287.000	Rp 72.921.362.051.000	0,19
		2021	Rp 921.527.727.000	Rp 69.927.105.928.000	4,63
		2022	Rp 701.789.885.000	Rp 6.188.355.131.000	-1,28
		2023	Rp 577.775.365.000	Rp 55.219.775.774.000	0,25
		2024	Rp 291.425.930.000	Rp 49.373.649.058.000	0,45
21	NIRO	2020	Rp 123.181.737.000	Rp 10.608.390.520.541.000	-0,27
		2021	Rp 285.219.483.000	Rp 11.691.071.599.377.000	0,57
		2022	Rp 1.727.634.292.000	Rp 12.930.967.694.757.000	0,26
		2023	Rp 154.188.346.000	Rp 1.358.489.589.341.000	0,47
		2024	Rp 1.984.372.726.000	Rp 14.519.184.207.376.000	0,34
22	PLIN	2020	Rp 281.728.736.000	Rp 11.815.911.491.000	0,01
		2021	Rp 225.799.104.000	Rp 11.971.692.555.000	-0,12
		2022	Rp 203.448.662.000	Rp 12.369.620.391.000	-0,04
		2023	Rp 170.612.015.000	Rp 1.224.251.411.000	-0,05
		2024	Rp 136.074.152.000	Rp 12.767.559.604.000	-0,03
23	PUDP	2020	Rp 8.793.974.662.000	Rp 521.632.597.211.000	0,20
		2021	Rp 6.109.549.659.000	Rp 492.003.943.529.000	0,19
		2022	Rp 650.917.044.000	Rp 65.136.907.212.000	-0,04
		2023	Rp 6.885.753.423.000	Rp 53.235.045.407.000	1,02
		2024	Rp 6.865.073.456.000	Rp 529.246.868.974.000	0,14
24	PWON	2020	Rp 58.229.219.000	Rp 26.458.805.377.000	-2,33
		2021	Rp 53.547.643.000	Rp 28.866.081.129.000	-0,01
		2022	Rp 53.158.577.000	Rp 30.602.179.916.000	0,00
		2023	Rp 51.223.972.000	Rp 32.710.786.983.000	-0,01
		2024	Rp 48.831.619.000	Rp 35.371.085.149.000	-0,01
25	RDTX	2020	Rp 1.039.388.434.000	Rp 2.971.061.771.714.000	-3,48
		2021	Rp 1.027.879.304.000	Rp 3.161.105.356.526.000	-5,85
		2022	Rp 25.326.103.000	Rp 3.387.321.004.206.000	4,60
		2023	Rp 32.319.559.000	Rp 3.440.333.041.238.000	0,00
		2024	Rp 46.337.708.000	Rp 3.447.072.687.973.000	0,00
26	RODA	2020	Rp 59.442.402.108.000	Rp 3.936.147.888.286.000	-0,06
		2021	Rp 61.861.551.448.000	Rp 3.650.686.851.644.000	0,09
		2022	Rp 53.780.052.626.000	Rp 3.547.426.939.513.000	0,36

		2023	Rp 46.552.223.137.000	Rp3.400.853.313.022.000	0,24
		2024	Rp40.727.597.092.000	Rp3.359.063.695.937.000	0,09
27	SMDM	2020	Rp 5.468.690.151.000	Rp 3.201.910.904.021.000	-2,29
		2021	Rp 4.853.584.887.000	Rp 3.303.511.723.151.000	4,59
		2022	Rp 4.276.266.924.000	Rp 3.423.278.470.836.000	-0,01
		2023	Rp 3.980.762.264.000	Rp 3.534.588.823.995.000	-2,32
		2024	Rp 3.748.268.789.000	Rp 3.462.272.048.915.000	-0,01
28	SMRA	2020	Rp 1.879.412.000	Rp 24.922.534.224.000	-0,58
		2021	Rp 2.654.491.000	Rp 26.049.716.678.000	-0,32
		2022	Rp 3.003.786.000	Rp 28.433.574.878.000	-4,88
		2023	Rp 2.778.732.000	Rp 31.168.375.086.000	4,36
		2024	Rp 3.614.835.000	Rp 33.534.100.462.000	-0,29
29	CSIS	2020	Rp 2.938.205.435.000	Rp538.263.035.994.000	-0,22
		2021	Rp 3.242.001.015.000	Rp526.136.140.616.000	-2,39
		2022	Rp 434.680.381.000	Rp 54.666.644.817.000	-0,12
		2023	Rp 316.485.538.000	Rp548.709.679.878.000	-0,06
		2024	Rp 319.201.716.000	Rp522.017.040.540.000	-0,04
30	SATU	2020	Rp 470.863.632.000	Rp260.603.289.004.000	0,04
		2021	Rp 5.744.469.981.000	Rp259.460.426.774.000	-0,06
		2022	Rp 5.621.772.097.000	Rp237.976.128.033.000	0,01
		2023	Rp 5.575.821.105.000	Rp 23.035.415.122.000	0,02
		2024	Rp 5.293.273.000	Rp 1.119.681.171.320.000	-0,01
31	POLI	2020	Rp 17.246.968.534.000	Rp 2.473.039.414.917.000	0,56
		2021	Rp 19.723.890.591.000	Rp 2.440.573.927.925.000	0,09
		2022	Rp 15.062.382.146.000	Rp 2.583.234.248.023.000	-2,36
		2023	Rp 13.294.690.708.000	Rp 3.245.188.408.916.000	-0,04
		2024	Rp 3.925.665.929.000	Rp213.399.356.790.000	0,23
32	PAMG	2020	Rp 1.173.991.146.000	Rp 58.280.621.435.000	0,18
		2021	Rp 1.225.072.992.000	Rp 583.578.892.476.000	0,00
		2022	Rp 1.233.142.105.000	Rp 582.565.037.552.000	0,03
		2023	Rp 13.366.918.000	Rp 58.263.688.884.000	-0,10
		2024	Rp 13.953.571.096.000	Rp 4.466.077.681.112.000	0,01
33	TRIN	2020	Rp 322.901.000	Rp 1.472.164.984.000	0,01
		2021	Rp 16.016.000	Rp 1.871.869.145.000	2,30
		2022	Rp 37.852.000	Rp 207.697.864.000	-0,22
		2023	Rp 69.893.000	Rp 2.212.539.866.000	0,01
		2024	Rp 1.371.207.066.000	Rp587.960.961.876.000	-6,97
34	AMAN	2020	Rp 12.164.868.000	Rp 79.939.751.000	2,16

		2021	Rp 18.682.433.000	Rp 86.188.887.000	0,05
		2022	Rp 20.015.757.000	Rp 966.109.133.000	-0,12
		2023	Rp 16.045.918.000	Rp 1.085.440.454.000	-0,17
		2024	Rp 90.128.000	Rp 2.222.883.786.000	-6,88
35	IPAC	2020	Rp 21.650.222.000	Rp 475.982.523.359.000	-0,07
		2021	Rp 68.263.756.000	Rp 32.957.177.249.000	-0,25
		2022	Rp 10.344.785.000	Rp 39.088.524.959.000	-0,26
		2023	Rp 133.712.172.000	Rp 44.556.390.017.000	-0,33
		2024	Rp 13.385.095.000	Rp 1.334.801.136.000	-0,15

Lampiran 4. Hasil Perhitungan Beban Pajak Tangguhan

No	Kode	Tahun	beban pajak tangguhan	laba sebelum pajak	total X2
1.	APLN	2020	-Rp 214.555.105.000	Rp 394.699.793.000	-0,54
		2021	-Rp 183.387.409.000	-Rp 301.840.223.000	0,61
		2022	-Rp 31.282.383.000	Rp 2.581.734.223.000	-0,01
		2023	-Rp 200.314.247.000	Rp 1.364.833.014.000	-0,15
		2024	-Rp 203.686.375.000	Rp 974.212.715.000	-0,21
2	BIKA	2020	-Rp 402.726.975.000	-Rp 103.932.079.098.000	0,00
		2021	-Rp 578.716.343.000	Rp 195.142.751.303.000	0,00
		2022	-Rp 380.310.783.000	-Rp 177.513.066.472.000	0,00
		2023	-Rp 208.914.247.000	-Rp 43.967.770.325.000	0,00
		2024	-Rp 13.403.550.695.000	Rp 71.985.828.162.000	-0,19
3.	BKDP	2020	-Rp 124.858.061.000	-Rp 29.801.533.411.000	0,00
		2021	-Rp 130.377.594.000	-Rp 13.107.860.711.000	0,01
		2022	-Rp 81.139.923.000	-Rp 32.926.781.117.000	0,00
		2023	-Rp 406.223.988.000	-Rp 3.418.831.803.000	0,12
		2024	Rp 90.513.032.000	-Rp 36.004.513.882.000	0,00
4.	BKSL	2020	-Rp 2.158.084.775.000	-Rp 554.143.697.854.000	0,00
		2021	-Rp 110.445.688.000	Rp 23.037.480.776.000	0,00
		2022	-Rp 1.238.159.808.000	-Rp 165.844.631.767.000	0,01
		2023	-Rp 1.069.550.385.000	Rp 318.899.014.939.000	0,00
		2024	-Rp 4.292.945.147.000	Rp 18.223.125.493.000	-0,24
5.	CTRA	2020	-Rp 288.435.000	Rp 1.659.121.000	-0,17
		2021	-Rp 308.998.000	Rp 2.396.714.000	-0,13

		2022	-Rp 306.545.000	Rp 2.308.621.000	-0,13
		2023	-Rp 306.744.000	Rp 2.215.769.000	-0,14
		2024	-Rp 377.753.000	Rp 2.705.721.000	-0,14
6.	DART	2020	-Rp 615.137.000	-Rp 394.021.709.000	0,00
		2021	-Rp 248.225.000	-Rp 408.739.891.000	0,00
		2022	-Rp 15.753.101.000	-Rp 405.406.112.000	0,04
		2023	-Rp 3.174.197.000	-Rp 312.055.562.000	0,01
		2024	-Rp 34.380.170.000	-Rp 262.421.509.000	0,13
7.	DILD	2020	-Rp 51.053.706.968.000	Rp 120.015.948.037.000	-0,43
		2021	-Rp 81.747.281.441.000	Rp 51.698.098.483.000	-1,58
		2022	-Rp 67.194.308.121.000	Rp 259.162.210.388.000	-0,26
		2023	-Rp 9.586.712.646.000	Rp 853.895.497.806.000	-0,01
		2024	-Rp 143.234.271.886.000	Rp 407.086.002.941.000	-0,35
8.	ELTY	2020	-Rp 1.108.000	-Rp 32.525.000	0,03
		2021	-Rp 44.000	-Rp 269.129.000	0,00
		2022	-Rp 461.000	-Rp 785.009.000	0,00
		2023	-Rp 5.317.000	-Rp 111.724.000	0,05
		2024	-Rp 6.013.000	-Rp 95.935.000	0,06
9.	GMTD	2020	-Rp 451.221.614.000	-Rp 105.498.825.152.000	0,00
		2021	-Rp 334.357.652.000	-Rp 27.042.012.109.000	0,01
		2022	-Rp 389.995.779.000	Rp 9.388.244.967.000	-0,04
		2023	-Rp 376.576.321.000	Rp 12.939.088.968.000	-0,03
		2024	Rp 3.234.704.153.000	Rp 519.477.289.514.000	0,01
10	GPRA	2020	-Rp 798.248.778.000	Rp 35.550.675.229.000	-0,02
		2021	-Rp 1.590.612.267.000	Rp 5.112.804.395.000	-0,31
		2022	-Rp 1.035.517.399.000	Rp 77.391.754.171.000	-0,01
		2023	-Rp 1.649.618.827.000	Rp 98.128.197.935.000	-0,02
		2024	-Rp 378.165.920.000	Rp 137.232.285.558.000	0,00
11	INPP	2020	Rp 26.770.875.617.000	-Rp 510.305.466.541.000	-0,05
		2021	Rp 25.760.976.302.000	-Rp 54.206.954.736.000	-0,48
		2022	Rp 10.094.029.984.000	Rp 59.398.193.000	169,94
		2023	Rp 1.669.488.775.000	Rp 168.201.971.867.000	0,01
		2024	-Rp 1.738.088.762.000	Rp 125.616.935.112.000	-0,01
12	KIJA	2020	Rp 7.764.814.793.000	Rp 37.485.058.742.000	0,21

		2021	-Rp 12.694.532.635.000	Rp10.033.043.011.000	-1,27
		2022	-Rp 7.911.396.112.000	Rp48.892.233.242.000	-0,16
		2023	-Rp 38.683.079.194.000	Rp56.730.640.127.000	-0,68
		2024	Rp 5.970.558.922.000	Rp 412.098.863.127.000	0,01
13	LPKR	2020	-Rp 326.446.000	-Rp 9.310.774.000	0,04
		2021	-Rp 514.932.000	-Rp 1.108.251.000	0,46
		2022	-Rp 568.363.000	-Rp 1.759.132.000	0,32
		2023	-Rp 754.308.000	Rp 1.408.007.000	-0,54
		2024	-Rp 51.050.000	Rp 821.108.000	-0,06
14	LPCK	2020	Rp 538.575.137.000	-Rp 276.950.329.513.000	0,00
		2021	-Rp 99.996.184.000	Rp 3.180.183.517.000	-0,03
		2022	-Rp 60.519.000	Rp 363.333.000	-0,17
		2023	-Rp 60.513.000	Rp 169.096.000	-0,36
		2024	-Rp 520.812.000	Rp 19.247.937.000	-0,03
15	LPLI	2020	-Rp 1.154.000	-Rp 19.963.000	0,06
		2021	-Rp 2.437.000	Rp 250.699.000	-0,01
		2022	-Rp 5.012.000	Rp 43.685.000	-0,11
		2023	-Rp 19.231.000	Rp 337.387.000	-0,06
		2024	-Rp 2.011.000	Rp 42.787.000	-0,05
16	MDLN	2020	-Rp 49.019.019.156.000	-Rp 1.714.861.044.972.000	0,03
		2021	-Rp 33.200.181.864.000	-Rp 879.392.492.000	37,75
		2022	-Rp 33.911.563.782.000	Rp54.082.293.027.000	-0,63
		2023	-Rp 28.484.831.038.000	-Rp 76.356.303.337.000	0,37
		2024	-Rp 30.114.792.734.000	-Rp 660.740.273.402.000	0,05
17	MKPI	2020	-Rp 69.499.101.794.000	Rp 300.613.018.637.000	-0,23
		2021	-Rp 87.908.780.841.000	Rp 412.578.500.051.000	-0,21
		2022	-Rp 153.586.750.735.000	Rp85.492.248.202.000	-1,80
		2023	-Rp 198.100.046.863.000	Rp 104.254.731.116.000	-1,90
		2024	-Rp 253.946.433.580.000	Rp 1.239.608.768.881.000	-0,20
18	MMLP	2020	-Rp 1.104.688.117.000	Rp11.556.337.002.000	-0,10
		2021	Rp 4.091.894.000	Rp 362.170.803.000	0,01
		2022	Rp 86.206.000	Rp 194.459.968.000	0,00
		2023	-Rp 851.604.000	Rp 114.205.173.000	-0,01
		2024	-Rp 1.905.126.000	Rp 252.396.486.000	-0,01
19	MTLA	2020	-Rp 48.655.000	Rp 334.962.000	-0,15

		2021	-Rp 49.923.000	Rp 430.589.000	-0,12
		2022	-Rp 58.697.000	Rp 476.631.000	-0,12
		2023	-Rp 73.568.000	Rp 566.478.000	-0,13
		2024	-Rp 82.954.000	Rp 612.971.000	-0,14
20	MTSM	2020	-Rp 1.538.262.206.000	-Rp 7.178.722.126.000	0,21
		2021	-Rp 3.151.745.858.000	Rp 30.327.624.000	-103,92
		2022	-Rp 1.511.991.496.000	-Rp 5.435.098.623.000	0,28
		2023	-Rp 1.632.311.512.000	-Rp 56.375.857.320.000	0,03
		2024	-Rp 2.351.215.461.000	Rp 913.804.633.000	-2,57
21	NIRO	2020	-Rp 48.956.550.555.000	Rp 206.027.692.522.000	-0,24
		2021	-Rp 70.722.121.655.000	-Rp 91.382.153.049.000	0,77
		2022	-Rp 82.483.044.688.000	-Rp 273.007.873.727.000	0,30
		2023	-Rp 116.805.031.124.000	-Rp 196.000.550.458.000	0,60
		2024	-Rp 144.033.573.605.000	-Rp 360.550.851.153.000	0,40
22	PLIN	2020	-Rp 5.704.175.000	-Rp 569.472.722.000	0,01
		2021	-Rp 5.587.723.000	Rp 503.634.642.000	-0,01
		2022	-Rp 21.963.599.000	Rp 579.356.012.000	-0,04
		2023	-Rp 33.351.831.000	Rp 646.618.826.000	-0,05
		2024	-Rp 34.457.061.000	Rp 1.031.997.232.000	-0,03
23	PUDP	2020	-Rp 4.247.923.676.000	-Rp 19.197.564.905.000	0,22
		2021	-Rp 3.119.606.584.000	-Rp 14.614.332.241.000	0,21
		2022	-Rp 11.174.581.332.000	Rp 290.177.284.148.000	-0,04
		2023	Rp 235.058.388.000	Rp 131.982.255.000	1,78
		2024	-Rp 440.388.933.000	-Rp 3.009.800.186.000	0,15
24	PWON	2020	-Rp 29.866.411.000	Rp 1.148.979.421.000	-0,03
		2021	-Rp 13.811.705.000	Rp 1.564.246.044.000	-0,01
		2022	-Rp 89.263.000	Rp 1.840.056.301.000	0,00
		2023	-Rp 19.958.345.000	Rp 2.401.827.599.000	-0,01
		2024	-Rp 31.030.763.000	Rp 2.452.738.616.000	-0,01
25	RDTX	2020	-Rp 137.729.358.000	Rp 23.695.500.213.000	-0,01
		2021	-Rp 14.336.288.000	Rp 196.384.936.622.000	0,00
		2022	-Rp 1.003.034.263.000	Rp 2.721.039.142.000	-0,37
		2023	-Rp 1.608.252.000	Rp 303.752.187.096.000	0,00
		2024	-Rp 68.098.199.000	Rp 288.949.240.741.000	0,00

26	RODA	2020	Rp 10.342.118.373.000	-Rp 178.365.303.264.000	-0,06
		2021	Rp 2.906.451.518.000	Rp29.854.508.586.000	0,10
		2022	-Rp 7.747.494.501.000	-Rp 18.099.654.041.000	0,43
		2023	-Rp 7.279.421.993.000	-Rp 27.293.225.662.000	0,27
		2024	-Rp 5.753.326.319.000	-Rp 58.835.566.741.000	0,10
27	SMDM	2020	Rp 204.245.671.000	Rp18.502.546.881.000	0,01
		2021	-Rp 1.642.604.044.000	Rp 1.192.898.972.000	-1,38
		2022	-Rp 1.624.616.553.000	Rp 181.421.560.158.000	-0,01
		2023	-Rp 1.437.027.918.000	Rp98.746.542.568.000	-0,01
		2024	-Rp 1.303.487.801.000	Rp 163.906.737.873.000	-0,01
28	SMRA	2020	-Rp 193.858.373.000	Rp 439.767.516.000	-0,44
		2021	-Rp 20.622.063.000	Rp 755.916.681.000	-0,03
		2022	-Rp 246.112.787.000	Rp 1.017.856.287.000	-0,24
		2023	-Rp 287.712.393.000	Rp 13.454.044.000	-21,38
		2024	-Rp 621.183.522.000	Rp 2.463.402.992.000	-0,25
29	CSIS	2020	-Rp 2.987.938.781.000	Rp15.434.341.386.000	-0,19
		2021	-Rp 1.861.747.813.000	Rp21.672.254.143.000	-0,09
		2022	-Rp 3.072.620.754.000	Rp26.692.517.807.000	-0,12
		2023	-Rp 326.654.579.000	Rp 5.732.913.253.000	-0,06
		2024	-Rp 577.369.791.000	Rp14.327.532.254.000	-0,04
30	SATU	2020	-Rp 764.267.031.000	-Rp 18.338.594.245.000	0,04
		2021	Rp 1.037.044.068.000	-Rp 18.044.948.925.000	-0,06
		2022	-Rp 115.722.833.000	-Rp 8.075.071.371.000	0,01
		2023	-Rp 77.138.383.000	-Rp 3.794.404.271.000	0,02
		2024	-Rp 39.391.235.000	Rp 7.802.640.152.000	-0,01
31	POLI	2020	Rp 7.475.555.497.000	Rp 9.962.906.798.000	0,75
		2021	Rp 3.206.759.485.000	Rp32.640.595.727.000	0,10
		2022	-Rp 8.834.613.442.000	Rp 163.884.393.272.000	-0,05
		2023	-Rp 3.612.554.867.000	Rp96.004.731.325.000	-0,04
		2024	-Rp 1.672.906.680.000	-Rp 6.612.099.553.000	0,25
32	PAMG	2020	-Rp 1.043.452.535.000	-Rp 5.285.196.248.000	0,20

		2021	-Rp 23.042.004.000	-Rp 10.438.077.547.000	0,00
		2022	-Rp 83.207.674.000	-Rp 3.121.440.219.000	0,03
		2023	-Rp 45.260.222.000	Rp 472.655.803.000	-0,10
		2024	Rp 434.611.757.000	Rp 33.383.939.401.000	0,01
33	TRIN	2020	Rp 3.508.000	Rp 4.176.975.000	0,00
		2021	Rp 44.826.000	-Rp 5.036.765.000	-0,01
		2022	-Rp 6.851.078.000	Rp 34.895.362.000	-0,20
		2023	-Rp 1.985.442.000	-Rp 144.465.326.000	0,01
		2024	-Rp 286.434.782.000	Rp 4.835.002.772.000	-0,06
34	AMAN	2020	-Rp 2.493.364.000	Rp 1.872.462.000	-1,33
		2021	Rp 1.346.175.000	Rp 28.936.609.000	0,05
		2022	-Rp 4.430.988.000	Rp 38.962.387.000	-0,11
		2023	-Rp 10.534.845.000	Rp 67.544.002.000	-0,16
		2024	-Rp 5.307.323.000	-Rp 195.310.677.000	0,03
35	IPAC	2020	-Rp 247.646.503.000	Rp 3.680.671.076.000	-0,07
		2021	-Rp 1.103.089.305.000	Rp 5.014.206.111.000	-0,22
		2022	-Rp 1.411.260.574.000	Rp 6.127.828.353.000	-0,23
		2023	-Rp 1.095.609.143.000	Rp 3.948.504.777.000	-0,28
		2024	-Rp 9.999.364.000	Rp 70.248.410.000	-0,14

Lampiran 5. Hasil Perhitungan Perencanaan Pajak

No	Kode	Tahun	laba setelah pajak	laba sebelum pajak	total X3
1.	APLN	2020	Rp 180.144.688.000	Rp 394.699.793.000	0,46
		2021	-Rp 485.227.632.000	-Rp 301.840.223.000	1,61
		2022	Rp 2.268.910.393.000	Rp 581.734.223.000	0,88
		2023	Rp 1.164.518.767.000	Rp 1.364.833.014.000	0,85
		2024	Rp 770.526.340.000	Rp 974.212.715.000	0,79
2	BIKA	2020	-Rp 104.334.806.073.000	-Rp 103.932.079.098.000	1,00
		2021	Rp 19.456.403.496.000	Rp 195.142.751.303.000	0,10
		2022	-Rp 177.893.377.255.000	-Rp 177.513.066.472.000	1,00
		2023	-Rp 44.176.684.572.000	-Rp 43.967.770.325.000	1,00
		2024	Rp 58.582.277.467.000	Rp 71.985.828.162.000	0,81
3.	BKDP	2020	-Rp 31.050.114.021.000	-Rp 29.801.533.411.000	1,04
		2021	-Rp 13.238.238.305.000	-Rp 13.107.860.711.000	1,01
		2022	-Rp 3.300.792.104.000	-Rp 32.926.781.117.000	0,10

		2023	-Rp 34.594.542.018.000	-Rp 3.418.831.803.000	10,12
		2024	-Rp 35.914.000.850.000	-Rp 36.004.513.882.000	1,00
4.	BKSL	2020	-Rp 556.301.782.629.000	-Rp 554.143.697.854.000	1,00
		2021	Rp 22.927.035.088.000	Rp 23.037.480.776.000	1,00
		2022	-Rp 167.082.791.575.000	-Rp 165.844.631.767.000	1,01
		2023	Rp 317.829.464.554.000	Rp 318.899.014.939.000	1,00
		2024	Rp 13.930.180.346.000	Rp 18.223.125.493.000	0,76
5.	CTRA	2020	Rp 1.370.686.000	Rp 1.659.121.000	0,83
		2021	Rp 2.087.716.000	Rp 2.396.714.000	0,87
		2022	Rp 2.002.076.000	Rp 2.308.621.000	0,87
		2023	Rp 1.909.025.000	Rp 2.215.769.000	0,86
		2024	Rp 2.327.968.000	Rp 2.705.721.000	0,86
6.	DART	2020	-Rp 400.173.079.000	-Rp 394.021.709.000	1,02
		2021	-Rp 411.222.141.000	-Rp 408.739.891.000	1,01
		2022	-Rp 421.159.213.000	-Rp 405.406.112.000	1,04
		2023	-Rp 343.797.532.000	-Rp 312.055.562.000	1,10
		2024	-Rp 296.801.679.000	-Rp 262.421.509.000	1,13
7.	DILD	2020	Rp 68.962.241.069.000	Rp 120.015.948.037.000	0,57
		2021	-Rp 30.049.182.958.000	Rp 51.698.098.483.000	-0,58
		2022	Rp 191.967.902.267.000	Rp 259.162.210.388.000	0,74
		2023	Rp 758.028.371.346.000	Rp 853.895.497.806.000	0,89
		2024	Rp 263.851.731.055.000	Rp 407.086.002.941.000	0,65
8.	ELTY	2020	-Rp 326.358.000	-Rp 32.525.000	10,03
		2021	-Rp 273.529.000	-Rp 269.129.000	1,02
		2022	-Rp 789.619.000	-Rp 785.009.000	1,01
		2023	-Rp 1.122.557.000	-Rp 111.724.000	10,05
		2024	-Rp 101.948.000	-Rp 95.935.000	1,06
9.	GMTD	2020	-Rp 105.950.046.766.000	-Rp 105.498.825.152.000	1,00
		2021	-Rp 27.376.369.761.000	-Rp 27.042.012.109.000	1,01
		2022	Rp8.998.249.188.000	Rp9.388.244.967.000	0,96
		2023	Rp 129.014.313.359.000	Rp 12.939.088.968.000	9,97
		2024	Rp 522.711.993.667.000	Rp 519.477.289.514.000	1,01

10	GPRA	2020	Rp 34.752.426.451.000	Rp 35.550.675.229.000	0,98
		2021	Rp 49.537.431.683.000	Rp5.112.804.395.000	9,69
		2022	Rp 76.356.236.772.000	Rp 77.391.754.171.000	0,99
		2023	Rp 96.478.579.108.000	Rp 98.128.197.935.000	0,98
		2024	Rp 136.854.119.638.000	Rp 137.232.285.558.000	1,00
11	INPP	2020	-Rp 483.534.590.924.000	-Rp 510.305.466.541.000	0,95
		2021	-Rp 28.445.978.434.000	-Rp 54.206.954.736.000	0,52
		2022	Rp 69.492.222.999.000	Rp 59.398.193.000	1169,94
		2023	Rp 184.896.859.617.000	Rp 168.201.971.867.000	1,10
		2024	Rp 123.878.846.350.000	Rp 125.616.935.112.000	0,99
12	KIJA	2020	Rp 45.249.873.535.000	Rp 37.485.058.742.000	1,21
		2021	Rp 87.635.897.475.000	Rp 10.033.043.011.000	8,73
		2022	Rp 4.098.083.713.000	Rp 48.892.233.242.000	0,08
		2023	Rp 528.623.322.076.000	Rp 56.730.640.127.000	9,32
		2024	Rp 418.069.422.049.000	Rp 412.098.863.127.000	1,01
13	LPKR	2020	-Rp 963.722.000	-Rp 9.310.774.000	0,10
		2021	-Rp 1.623.183.000	-Rp 1.108.251.000	1,46
		2022	-Rp 2.327.495.000	-Rp 1.759.132.000	1,32
		2023	Rp 653.699.000	Rp 1.408.007.000	0,46
		2024	Rp 770.058.000	Rp 821.108.000	0,94
14	LPCK	2020	-Rp 271.564.578.143.000	-Rp 276.950.329.513.000	0,98
		2021	Rp3.080.187.333.000	Rp3.180.183.517.000	0,97
		2022	Rp 302.814.000	Rp 363.333.000	0,83
		2023	Rp 108.583.000	Rp 169.096.000	0,64
		2024	Rp 18.727.125.000	Rp 19.247.937.000	0,97
15	LPLI	2020	-Rp 21.117.000	-Rp 19.963.000	1,06
		2021	Rp 248.262.000	Rp 250.699.000	0,99
		2022	Rp 38.673.000	Rp 43.685.000	0,89
		2023	Rp 318.156.000	Rp 337.387.000	0,94
		2024	Rp 40.776.000	Rp 42.787.000	0,95
16	MDLN	2020	-Rp 1.763.880.064.128.000	-Rp 1.714.861.044.972.000	1,03

		2021	-Rp 41.994.106.784.000	-Rp 879.392.492.000	47,75
		2022	Rp 20.170.729.245.000	Rp 54.082.293.027.000	0,37
		2023	-Rp 104.841.134.375.000	-Rp 76.356.303.337.000	1,37
		2024	-Rp 690.855.066.136.000	-Rp 660.740.273.402.000	1,05
17	MKPI	2020	Rp 231.113.916.843.000	Rp 300.613.018.637.000	0,77
		2021	Rp 32.466.971.921.000	Rp 412.578.500.051.000	0,08
		2022	Rp 701.335.731.285.000	Rp 85.492.248.202.000	8,20
		2023	Rp 844.447.264.297.000	Rp 104.254.731.116.000	8,10
		2024	Rp 985.662.335.301.000	Rp 1.239.608.768.881.000	0,80
18	MMLP	2020	Rp 10.451.648.885.000	Rp 11.556.337.002.000	0,90
		2021	Rp 366.262.697.000	Rp 362.170.803.000	1,01
		2022	Rp 194.546.174.000	Rp 194.459.968.000	1,00
		2023	Rp 113.353.569.000	Rp 114.205.173.000	0,99
		2024	Rp 250.491.360.000	Rp 252.396.486.000	0,99
19	MTLA	2020	Rp 286.307.000	Rp 334.962.000	0,85
		2021	Rp 380.666.000	Rp 430.589.000	0,88
		2022	Rp 417.934.000	Rp 476.631.000	0,88
		2023	Rp 49.291.000	Rp 566.478.000	0,09
		2024	Rp 530.017.000	Rp 612.971.000	0,86
20	MTSM	2020	-Rp 8.716.984.332.000	-Rp 7.178.722.126.000	1,21
		2021	-Rp 3.121.418.234.000	Rp 30.327.624.000	-102,92
		2022	-Rp 1.511.991.496.000	-Rp 5.435.098.623.000	0,28
		2023	-Rp 7.269.897.244.000	-Rp 5.637.585.732.000	1,29
		2024	-Rp 1.437.410.828.000	Rp 913.804.633.000	-1,57
21	NIRO	2020	Rp 157.071.141.967.000	Rp 206.027.692.522.000	0,76
		2021	-Rp 162.104.274.704.000	-Rp 91.382.153.049.000	1,77
		2022	-Rp 355.490.918.415.000	-Rp 273.007.873.727.000	1,30
		2023	-Rp 312.805.581.582.000	-Rp 196.000.550.458.000	1,60
		2024	-Rp 504.584.424.758.000	-Rp 360.550.851.153.000	1,40
22	PLIN	2020	-Rp 575.176.897.000	-Rp 569.472.722.000	1,01

		2021	Rp 447.757.412.000	Rp 503.634.642.000	0,89
		2022	Rp 557.392.413.000	Rp 579.356.012.000	0,96
		2023	Rp 613.266.995.000	Rp 646.618.826.000	0,95
		2024	Rp 997.540.171.000	Rp1.031.997.232.000	0,97
23	PUDP	2020	-Rp 23.445.488.581.000	-Rp 19.197.564.905.000	1,22
		2021	-Rp 17.733.938.826.000	-Rp 14.614.332.241.001	1,21
		2022	Rp 279.002.702.816.000	R 290.177.284.148.000	0,96
		2023	Rp 367.040.643.000	Rp 131.982.255.000	2,78
		2024	-Rp 3.450.189.119.000	-Rp 3.009.800.186.000	1,15
24	PWON	2020	Rp 111.911.301.000	Rp1.148.979.421.000	0,10
		2021	Rp1.550.434.339.000	Rp1.564.246.044.000	0,99
		2022	Rp1.831.130.001.000	Rp1.840.056.301.000	1,00
		2023	Rp2.381.869.254.000	Rp2.401.827.599.000	0,99
		2024	Rp2.421.707.853.000	Rp2.452.738.616.000	0,99
25	RDTX	2020	-Rp 729.385.246.000	Rp 23.695.500.213.000	-0,03
		2021	-Rp 564.118.681.000	Rp 196.384.936.622.000	0,00
		2022	Rp 271.100.879.937.000	Rp2.721.039.142.000	99,63
		2023	Rp 303.736.104.576.000	Rp 303.752.187.096.000	1,00
		2024	Rp 288.881.142.542.000	Rp 288.949.240.741.000	1,00
26	RODA	2020	-Rp 168.023.184.891.000	-Rp 178.365.303.264.000	0,94
		2021	Rp 32.760.960.104.000	Rp 29.854.508.586.000	1,10
		2022	-Rp 25.847.148.542.000	-Rp 18.099.654.041.000	1,43
		2023	-Rp 34.572.647.655.000	-Rp 27.293.225.662.000	1,27
		2024	-Rp 64.588.893.060.000	-Rp 58.835.566.741.000	1,10
27	SMDM	2020	Rp 18.706.792.552.000	Rp 185.025.468.810.000	0,10
		2021	Rp 117.647.293.156.000	Rp1.192.898.972.000	98,62
		2022	Rp 179.796.943.605.000	Rp 181.421.560.158.000	0,99
		2023	Rp 9.730.951.465.000	Rp 98.746.542.568.000	0,10
		2024	Rp 162.603.250.072.000	Rp 163.906.737.873.000	0,99
28	SMRA	2020	Rp 245.909.143.000	Rp 439.767.516.000	0,56

		2021	Rp 549.696.051.000	Rp 755.916.681.000	0,73
		2022	Rp 7.717.435.000	Rp1.017.856.287.000	0,01
		2023	Rp1.057.692.007.000	Rp 13.454.044.000	78,62
		2024	Rp1.842.219.470.000	Rp2.463.402.992.000	0,75
29	CSIS	2020	Rp 12.446.402.605.000	Rp 15.434.341.386.000	0,81
		2021	Rp 1.981.050.633.000	Rp 21.672.254.143.000	0,09
		2022	Rp 23.619.897.053.000	Rp 26.692.517.807.000	0,88
		2023	Rp 5.406.258.674.000	Rp 5.732.913.253.000	0,94
		2024	Rp 13.750.162.463.000	Rp 14.327.532.254.000	0,96
30	SATU	2020	-Rp 19.102.861.276.000	-Rp 18.338.594.245.000	1,04
		2021	-Rp 17.007.904.857.000	-Rp 18.044.948.925.000	0,94
		2022	-Rp 8.190.794.204.000	-Rp 8.075.071.371.000	1,01
		2023	-Rp 3.871.542.654.000	-Rp 3.794.404.271.000	1,02
		2024	Rp 7.763.248.917.000	Rp 7.802.640.152.000	0,99
31	POLI	2020	Rp 17.438.462.295.000	Rp 9.962.906.798.000	1,75
		2021	Rp 35.847.355.212.000	Rp 32.640.595.727.000	1,10
		2022	Rp 15.504.977.983.000	Rp 163.884.393.272.000	0,09
		2023	Rp 92.392.176.458.000	Rp 96.004.731.325.000	0,96
		2024	-Rp 8.285.006.233.000	-Rp 6.612.099.553.000	1,25
32	PAMG	2020	-Rp 6.328.648.783.000	-Rp 5.285.196.248.000	1,20
		2021	-Rp 10.461.119.551.000	-Rp 10.438.077.547.000	1,00
		2022	-Rp 3.204.647.893.000	-Rp 3.121.440.219.000	1,03
		2023	Rp 427.395.581.000	Rp 472.655.803.000	0,90
		2024	Rp 33.818.551.158.000	Rp 33.383.939.401.000	1,01
33	TRIN	2020	Rp 4.212.055.000	Rp 4.176.975.000	1,01
		2021	-Rp 50.322.824.000	-Rp 5.036.765.000	9,99
		2022	Rp 28.044.284.000	Rp 34.895.362.000	0,80
		2023	-Rp 146.450.768.000	-Rp 144.465.326.000	1,01
		2024	Rp 4.548.567.990	Rp4.835.002.772.000	0,00
34	AMAN	2020	Rp 16.231.256.000	Rp 1.872.462.000	8,67

		2021	Rp 30.282.784.000	Rp 28.936.609.000	1,05
		2022	Rp 34.531.399.000	Rp 38.962.387.000	0,89
		2023	Rp 57.009.157.000	Rp 67.544.002.000	0,84
		2024	-Rp 200.618.000	-Rp 195.310.677.000	0,00
35	IPAC	2020	Rp3.433.024.573.000	Rp3.680.671.076.000	0,93
		2021	Rp3.911.116.806.000	Rp5.014.206.111.000	0,78
		2022	Rp4.716.567.779.000	Rp6.127.828.353.000	0,77
		2023	Rp2.852.895.634.000	Rp3.948.504.777.000	0,72
		2024	Rp 60.249.046.000	Rp 70.248.410.000	0,86

Lampiran 6. Hasil Perhitungan Leverage

No.	Kode	Tahun	total utang	total ekuitas	total X4
1.	APLN	2020	Rp19.036.134.922.000	Rp 1.355.225.034.000	1,68
		2021	Rp19.071.333.513.000	Rp 1.053.977.768.000	18,09
		2022	Rp16.148.220.661.000	Rp 1.246.956.108.000	12,95
		2023	Rp14.876.147.126.000	Rp13.451.404.486.000	1,11
		2024	Rp12.335.995.789.000	Rp13.783.681.637.000	0,89
2	BIKA	2020	Rp 3.537.619.359.533.000	-Rp 344.946.832.098.000	-10,26
		2021	Rp 3.216.992.692.903.000	-Rp 15.277.165.032.000	- 210,58
		2022	Rp 3.228.587.467.386.000	-Rp 328.066.486.936.000	-9,84
		2023	Rp 328.640.215.468.000	-Rp 371.788.167.449.000	-0,88
		2024	Rp 1.401.047.153.697.000	Rp 4.426.161.276.401.000	0,32
3.	BKDP	2020	Rp 309.509.265.589.000	Rp 481.330.909.933.000	0,64
		2021	Rp 316.567.761.309.000	Rp 1.088.466.716.917.000	0,29
		2022	Rp 343.253.957.212.000	Rp 413.245.749.651.000	0,83
		2023	Rp 376.331.162.577.000	Rp 381.907.437.249.000	0,99
		2024	Rp 406.482.108.034.000	Rp 345.763.054.382.000	1,18
4.	BKSL	2020	Rp 8.121.131.006.426.000	Rp 10.250.098.967.395.000	0,79
		2021	Rp 6.168.939.794.466.000	Rp 10.486.049.543.695.000	0,59
		2022	Rp 6.398.549.423.657.000	Rp 1.032.321.084.015.000	6,20
		2023	Rp 4.745.794.622.926.000	Rp 15.141.083.260.494.000	0,31
		2024	Rp 6.034.270.819.491.000	Rp 15.154.019.685.915.000	0,40

5.	CTRA	2020	Rp 21.797.659.000	Rp 17.457.528.000	1,25
		2021	Rp 21.274.214.000	Rp 19.394.197.000	1,10
		2022	Rp 21.017.685.000	Rp 2.101.493.000	10,00
		2023	Rp 21.490.499.000	Rp 22.624.716.000	0,95
		2024	Rp 22.407.372.000	Rp 24.615.330.000	0,91
6.	DART	2020	Rp 3.742.012.201.000	Rp 2.914.108.781.000	1,28
		2021	Rp 4.100.747.128.000	Rp 2.503.287.462.000	1,64
		2022	Rp 4.380.333.825.000	Rp 2.082.346.272.000	2,10
		2023	Rp 4.578.440.529.000	Rp 1.738.529.107.000	2,63
		2024	Rp 4.766.522.099.000	Rp 1.442.159.417.000	3,31
7.	DILD	2020	Rp 9.652.623.140.002.000	Rp 6.049.249.422.919.000	1,60
		2021	Rp 10.429.635.817.904.000	Rp 6.032.148.919.731.000	1,73
		2022	Rp 10.136.195.422.586.000	Rp 621.565.295.542.000	16,31
		2023	Rp 8.064.726.715.168.000	Rp 6.539.181.428.024.000	1,23
		2024	Rp 6.956.640.610.515.000	Rp 6.746.912.470.382.000	1,03
8.	ELTY	2020	Rp 3.387.644.000	Rp 8.435.792.000	0,40
		2021	Rp 3.533.568.000	Rp 8.147.635.000	0,43
		2022	Rp 2.671.612.000	Rp 7.241.847.000	0,37
		2023	Rp 2.507.808.000	Rp 6.131.245.000	0,41
		2024	Rp 2.717.802.000	Rp 6.024.215.000	0,45
9.	GMTD	2020	Rp 402.384.335.106.000	Rp 58.493.880.699.000	6,88
		2021	Rp 515.861.813.615.000	Rp 557.072.823.084.000	0,93
		2022	Rp 594.503.930.604.000	Rp 566.436.554.528.000	1,05
		2023	Rp 507.651.355.382.000	Rp 696.284.152.746.000	0,73
		2024	Rp 1.867.842.626.729.000	Rp 1.879.926.013.469.000	0,99
10	GPRA	2020	Rp 67.411.385.827.000	Rp 1.053.247.818.677.000	0,06
		2021	Rp 654.638.555.294.000	Rp 1.105.912.907.155.000	0,59
		2022	Rp 602.857.333.624.000	Rp 1.178.498.310.599.000	0,51
		2023	Rp 685.872.382.107.000	Rp 1.268.359.035.889.000	0,54
		2024	Rp 463.193.359.356.000	Rp 830.889.599.891.000	0,56
11	INPP	2020	Rp 1.885.064.829.152.000	Rp 5.772.041.422.414.000	0,33
		2021	Rp 3.027.511.364.432.000	Rp 5.718.188.879.803.000	0,53

		2022	Rp 3.423.931.216.118.000	Rp 5.739.889.962.764.000	0,60
		2023	Rp 3.416.917.697.137.000	Rp 592.833.295.833.000	5,76
		2024	Rp 604.841.454.899.000	Rp 1.367.854.091.851.000	0,44
12	KIJA	2020	Rp 5.939.921.471.289.000	Rp 6.260.254.508.581.000	0,95
		2021	Rp 5.920.079.958.943.000	Rp 6.372.010.371.083.000	0,93
		2022	Rp 6.605.083.823.533.000	Rp 6.505.375.560.067.000	1,02
		2023	Rp 6.016.058.083.818.000	Rp 693.137.723.642.000	8,68
		2024	Rp 3.419.601.506.601.000	Rp 6.295.309.485.037.000	0,54
13	LPKR	2020	Rp 28.291.825.000	Rp 23.573.655.000	1,20
		2021	Rp 29.594.927.000	Rp 22.486.009.000	1,32
		2022	Rp 30.731.006.000	Rp 19.139.891.000	1,61
		2023	Rp 29.964.393.000	Rp 19.606.431.000	1,53
		2024	Rp 6.478.399.000	Rp 7.538.957.000	0,86
14	LPCK	2020	Rp 2.161.295.035.484.000	Rp 1.357.960.207.399.000	1,59
		2021	Rp96.003.388.817.000	Rp 358.811.844.282.000	0,27
		2022	Rp 2.654.442.000	Rp 6.695.171.000	0,40
		2023	Rp 2.890.399.000	Rp 6.791.326.000	0,43
		2024	Rp 22.836.790.000	Rp 30.947.069.000	0,74
15	LPLI	2020	Rp 195.934.000	Rp 739.263.000	0,27
		2021	Rp 12.195.000	Rp 961.874.000	0,01
		2022	Rp 14.159.000	Rp 1.111.377.000	0,01
		2023	Rp 67.563.000	Rp 1.616.104.000	0,04
		2024	Rp 16.260.000	Rp 1.751.926.000	0,01
16	MDLN	2020	Rp 10.629.831.146.672.000	Rp 4.220.208.243.185.000	2,52
		2021	Rp 10.355.441.282.714.000	Rp 4.184.097.758.081.000	2,47
		2022	Rp 9.302.635.472.833.000	Rp 422.553.340.211.000	22,02
		2023	Rp 9.572.111.264.549.000	Rp 411.682.662.979.000	23,25
		2024	Rp 10.108.095.087.531.000	Rp 3.453.379.235.365.000	2,93
17	MKPI	2020	Rp 2.015.619.366.153.000	Rp 560.729.869.958.000	3,59
		2021	Rp 2.157.944.970.302.000	Rp 583.633.746.179.000	3,70
		2022	Rp 1.726.321.957.737.000	Rp 6.429.617.047.075.000	0,27

		2023	Rp 153.740.756.993.000	Rp 6.851.330.744.372.000	0,02
		2024	Rp 1.606.773.141.100.000	Rp 7.332.751.634.673.000	0,22
18	MMLP	2020	Rp67.478.279.965.000	Rp 229.058.608.863.000	0,29
		2021	Rp 949.949.854.000	Rp 6.157.354.007.000	0,15
		2022	Rp 145.211.887.000	Rp 6.183.751.215.000	0,02
		2023	Rp 2.163.000.359.000	Rp 4.548.971.753.000	0,48
		2024	Rp 1.702.537.573.000	Rp 4.793.549.134.000	0,36
19	MTLA	2020	Rp 1.855.546.000	Rp 4.076.937.000	0,46
		2021	Rp 2.003.374.000	Rp 4.406.174.000	0,45
		2022	Rp 1.981.223.000	Rp 4.754.672.000	0,42
		2023	Rp 2.071.569.000	Rp 5.149.142.000	0,40
		2024	Rp 1.845.588.000	Rp 5.589.905.000	0,33
20	MTSM	2020	Rp27.817.215.164.000	Rp45.104.146.887.000	0,62
		2021	Rp27.228.089.007.000	Rp42.699.016.921.000	0,64
		2022	Rp25.598.023.852.000	Rp36.285.527.458.000	0,71
		2023	Rp26.046.650.758.000	Rp29.173.125.016.000	0,89
		2024	Rp21.255.470.923.000	Rp28.118.178.135.000	0,76
21	NIRO	2020	Rp 4.019.064.322.188.000	Rp 6.589.326.198.353.000	0,61
		2021	Rp 5.263.849.675.728.000	Rp 6.427.221.923.649.000	0,82
		2022	Rp 6.842.019.184.618.000	Rp 6.088.948.510.139.000	1,12
		2023	Rp 7.778.011.312.836.000	Rp 5.806.884.580.574.000	1,34
		2024	Rp 9.221.015.465.040.000	Rp 5.298.168.742.336.000	1,74
22	PLIN	2020	Rp 1.162.324.697.000	Rp10.653.586.794.000	0,11
		2021	Rp 117.423.738.000	Rp10.797.455.175.000	0,01
		2022	Rp 1.324.547.597.000	Rp11.045.072.794.000	0,12
		2023	Rp 1.353.259.439.000	Rp10.889.254.671.000	0,12
		2024	Rp 1.417.912.848.000	Rp11.349.646.756.000	0,12
23	PUDP	2020	Rp 204.280.317.915.000	Rp 317.352.279.296.000	0,64
		2021	Rp 190.546.059.153.000	Rp 301.457.884.376.000	0,63
		2022	Rp70.130.902.724.000	Rp81.238.169.396.000	0,12
		2023	Rp15.725.076.734.000	Rp 516.625.377.336.000	0,03
		2024	Rp19.680.490.956.000	Rp 509.566.378.018.000	0,04
24	PWON	2020	Rp 8.860.110.106.000	Rp17.598.695.271.000	0,50
		2021	Rp 9.687.642.670.000	Rp19.178.438.459.000	0,51
		2022	Rp 9.883.903.905.000	Rp20.718.276.011.000	0,48
		2023	Rp 9.915.452.617.000	Rp22.795.334.366.000	0,43
		2024	Rp10.629.087.811.000	Rp24.741.997.338.000	0,43

25	RDTX	2020	Rp 234.410.089.039.000	Rp 2.736.651.682.675.000	0,09
		2021	Rp 256.434.333.798.000	Rp 2.904.671.022.728.000	0,09
		2022	Rp 414.789.785.669.000	Rp 2.972.531.218.537.000	0,14
		2023	Rp 555.135.931.061.000	Rp 2.885.197.110.177.000	0,19
		2024	Rp 408.175.686.698.000	Rp 3.038.897.001.275.000	0,13
26	RODA	2020	Rp 1.734.468.189.877.000	Rp 2.201.679.698.409.000	0,79
		2021	Rp 1.420.522.013.633.000	Rp 2.230.164.838.011.000	0,64
		2022	Rp 132.889.720.876.000	Rp 2.218.529.730.753.000	0,06
		2023	Rp 1.222.550.700.928.000	Rp 2.178.302.612.094.000	0,56
		2024	Rp1.238.293.980.632.000	Rp 2.120.769.715.305.000	0,58
27	SMDM	2020	Rp 553.905.302.046.000	Rp 2.648.005.601.975.000	0,21
		2021	Rp 52.399.525.747.000	Rp 2.779.516.465.681.000	0,02
		2022	Rp463.973.692.434.000	Rp 2.959.304.778.402.000	0,16
		2023	Rp 476.254.570.089.000	Rp 3.058.334.253.906.000	0,16
		2024	Rp 251.618.246.015.000	Rp 3.210.653.802.900.000	0,08
28	SMRA	2020	Rp15.836.845.684.000	Rp 908.568.854.000	17,43
		2021	Rp14.819.493.511.000	Rp11.230.223.167.000	1,32
		2022	Rp16.683.534.371.000	Rp11.750.040.507.000	1,42
		2023	Rp18.865.313.214.000	Rp12.303.061.872.000	1,53
		2024	Rp19.701.573.132.000	Rp13.832.527.330.000	1,42
29	CSIS	2020	Rp 270.227.522.474.000	Rp26.803.551.352.000	10,08
		2021	Rp 239.158.814.425.000	Rp 286.977.326.191.000	0,83
		2022	Rp 236.219.079.799.000	Rp 310.447.368.371.000	0,76
		2023	Rp 232.668.850.115.000	Rp316.040.829.763.000	0,74
		2024	Rp 192.024.230.649.000	Rp329.992.809.891.000	0,58
30	SATU	2020	Rp 174.423.102.949.000	Rp 86.180.186.055.000	2,02
		2021	Rp19.032.081.217.000	Rp69.139.614.604.000	0,28
		2022	Rp 176.861.233.163.000	Rp 6.111.489.487.000	28,94
		2023	Rp 173.099.766.963.000	Rp57.254.384.257.000	3,02

		2024	Rp33.960.080.796.000	Rp 1.085.721.090.524.000	0,03
31	POLI	2020	Rp 780.478.933.365.000	Rp 1.692.560.481.552.000	0,46
		2021	Rp70.881.843.352.000	Rp 1.731.755.494.405.000	0,04
		2022	Rp 683.099.929.963.000	Rp190.013.431.806.000	3,60
		2023	Rp 1.244.558.880.638.000	Rp 2.000.629.528.278.000	0,62
		2024	Rp 164.440.882.120.000	Rp 48.958.474.670.000	3,36
32	PAMG	2020	Rp 147.393.574.529.000	Rp435.412.639.821.000	0,34
		2021	Rp 157.557.462.326.000	Rp 42.602.143.015.000	3,70
		2022	Rp 159.757.005.714.000	Rp422.808.031.838.000	0,38
		2023	Rp 159.410.883.598.000	Rp423.226.005.242.000	0,38
		2024	Rp2.429.135.859.054.000	Rp 2.036.941.822.058.000	1,19
33	TRIN	2020	Rp 765.513.291.000	Rp 706.651.693.000	1,08
		2021	Rp 1.214.835.891.000	Rp 657.033.254.000	1,85
		2022	Rp 1.434.907.753.000	Rp 642.070.887.000	2,23
		2023	Rp 1.589.774.031.000	Rp 622.765.835.000	2,55
		2024	Rp 159.185.874.742.000	Rp428.775.087.134.000	0,37
34	AMAN	2020	Rp 208.345.614.000	Rp 591.051.896.000	0,35
		2021	Rp 242.578.454.000	Rp 619.310.416.000	0,39
		2022	Rp 313.827.161.000	Rp 652.281.972.000	0,48
		2023	Rp 375.900.801.000	Rp 709.539.653.000	0,53
		2024	Rp 1.804.103.147.000	Rp 418.780.639.000	4,31
35	IPAC	2020	Rp 91.515.439.005.000	Rp 384.467.084.354.000	0,24
		2021	Rp 7.173.987.349.000	Rp 257.831.899.000	27,82
		2022	Rp 85.459.016.000	Rp30.542.623.359.000	0,00
		2023	Rp 9.825.138.628.000	Rp34.731.251.389.000	0,28
		2024	Rp 568.562.205.000	Rp 766.238.931.000	0,74

Lampiran 7. Hasil Perhitungan Ukuran Perusahaan

No	Kode	Tahun	total aset	total Z
1.	APLN	2020	Rp 30.391.359.956.000	31,05
		2021	Rp 29.611.111.193.000	31,02
		2022	Rp 28.617.781.741.000	30,99
		2023	Rp 28.327.551.612.000	30,97
		2024	Rp 26.119.677.426.000	30,89
2	BIKA	2020	Rp 3.192.672.527.435.000	35,70
		2021	Rp 3.064.221.042.583.000	35,66
		2022	Rp 290.052.098.045.000	33,30
		2023	Rp 2.914.613.987.231.000	35,61
		2024	Rp 5.827.208.430.098.000	36,30
3.	BKDP	2020	Rp 790.840.175.522.000	34,30

		2021	Rp 1.405.034.478.226.000	34,88
		2022	Rp 756.499.706.863.000	34,26
		2023	Rp 758.238.599.826.000	34,26
		2024	Rp 752.245.162.416.000	34,25
4.	BKSL	2020	Rp 18.371.229.973.821.000	37,45
		2021	Rp 16.654.989.338.161.000	37,35
		2022	Rp 16.721.760.263.807.000	37,36
		2023	Rp 1.988.687.788.342.000	35,23
		2024	Rp 21.188.290.505.406.000	37,59
5.	CTRA	2020	Rp 39.255.187.000	24,39
		2021	Rp 40.668.411.000	24,43
		2022	Rp 42.032.615.000	24,46
		2023	Rp 44.115.215.000	24,51
		2024	Rp 47.022.702.000	24,57
6.	DART	2020	Rp 6.656.120.982.000	29,53
		2021	Rp 660.403.459.000	27,22
		2022	Rp 6.462.680.097.000	29,50
		2023	Rp 6.316.969.636.000	29,47
		2024	Rp 6.208.681.516.000	29,46
7.	DILD	2020	Rp 15.701.872.562.921.000	37,29
		2021	Rp 16.461.784.737.635.000	37,34
		2022	Rp 16.351.848.378.006.000	37,33
		2023	Rp 14.603.908.143.192.000	37,22
		2024	Rp 13.703.553.080.897.000	37,16
8.	ELTY	2020	Rp 11.823.436.000	23,19
		2021	Rp 11.681.203.000	23,18
		2022	Rp 9.913.459.000	23,02
		2023	Rp 8.639.053.000	22,88
		2024	Rp 8.742.017.000	22,89
9.	GMTD	2020	Rp 987.323.142.096.000	34,53
		2021	Rp 1.072.934.636.699.000	34,61
		2022	Rp 1.160.940.485.132.000	34,69
		2023	Rp 1.203.935.508.128.000	34,72
		2024	Rp 3.747.768.640.198.000	35,86
10	GPRA	2020	Rp 1.727.361.676.947.000	35,09
		2021	Rp 1.760.551.462.449.000	35,10
		2022	Rp 1.781.355.644.223.000	35,12
		2023	Rp 1.954.231.417.996.000	35,21
		2024	Rp 1.294.082.959.247.000	34,80
11	INPP	2020	Rp 7.657.106.251.566.000	36,57
		2021	Rp 8.745.700.244.235.000	36,71
		2022	Rp 9.163.821.178.882.000	36,75
		2023	Rp 9.345.250.655.467.000	36,77
		2024	Rp 1.972.695.546.750.000	35,22
12	KIJA	2020	Rp 1.220.017.597.987.000	34,74
		2021	Rp 12.292.090.330.026.000	37,05
		2022	Rp 131.104.593.836.000	32,51
		2023	Rp 12.947.435.320.238.000	37,10

		2024	Rp 9.714.910.991.638.000	36,81
13	LPKR	2020	Rp 5.186.548.000	22,37
		2021	Rp 52.080.936.000	24,68
		2022	Rp 49.870.897.000	24,63
		2023	Rp 49.570.824.000	24,63
		2024	Rp 14.017.356.000	23,36
14	LPCK	2020	Rp 3.519.255.242.883.000	35,80
		2021	Rp 454.815.233.099.000	33,75
		2022	Rp 9.349.613.000	22,96
		2023	Rp 9.681.725.000	22,99
		2024	Rp 53.783.859.000	24,71
15	LPLI	2020	Rp 935.197.000	20,66
		2021	Rp 974.069.000	20,70
		2022	Rp 1.125.536.000	20,84
		2023	Rp 1.683.667.000	21,24
		2024	Rp 1.768.186.000	21,29
16	MDLN	2020	Rp 14.850.039.389.857.000	37,24
		2021	Rp 14.539.539.040.795.000	37,22
		2022	Rp 13.528.168.874.943.000	37,14
		2023	Rp 13.688.937.894.339.000	37,16
		2024	Rp 13.561.474.322.896.000	37,15
17	MKPI	2020	Rp 7.622.918.065.733.000	36,57
		2021	Rp 7.994.282.432.092.000	36,62
		2022	Rp 8.155.939.004.812.000	36,64
		2023	Rp 8.388.738.314.302.000	36,67
		2024	Rp 8.939.524.775.773.000	36,73
18	MMLP	2020	Rp 296.536.888.828.000	33,32
		2021	Rp 7.107.303.861.000	29,59
		2022	Rp 7.635.870.085.000	29,66
		2023	Rp 6.711.972.112.000	29,53
		2024	Rp 6.496.086.707.000	29,50
19	MTLA	2020	Rp 5.932.483.000	22,50
		2021	Rp 6.409.548.000	22,58
		2022	Rp 6.735.895.000	22,63
		2023	Rp 7.220.711.000	22,70
		2024	Rp 7.435.493.000	22,73
20	MTSM	2020	Rp 72.921.362.051.000	31,92
		2021	Rp 69.927.105.928.000	31,88
		2022	Rp 6.188.355.131.000	29,45
		2023	Rp 55.219.775.774.000	31,64
		2024	Rp 49.373.649.058.000	31,53
21	NIRO	2020	Rp 10.608.390.520.541.000	36,90
		2021	Rp 11.691.071.599.377.000	37,00
		2022	Rp 12.930.967.694.757.000	37,10
		2023	Rp 1.358.489.589.341.000	34,85
		2024	Rp 14.519.184.207.376.000	37,21
22	PLIN	2020	Rp 11.815.911.491.000	30,10
		2021	Rp 11.971.692.555.000	30,11

		2022	Rp 12.369.620.391.000	30,15
		2023	Rp 1.224.251.411.000	27,83
		2024	Rp 12.767.559.604.000	30,18
23	PUDP	2020	Rp 521.632.597.211.000	33,89
		2021	Rp 492.003.943.529.000	33,83
		2022	Rp 65.136.907.212.000	31,81
		2023	Rp 53.235.045.407.000	31,61
		2024	Rp 529.246.868.974.000	33,90
24	PWON	2020	Rp 26.458.805.377.000	30,91
		2021	Rp 28.866.081.129.000	30,99
		2022	Rp 30.602.179.916.000	31,05
		2023	Rp 32.710.786.983.000	31,12
		2024	Rp 35.371.085.149.000	31,20
25	RDTX	2020	Rp 2.971.061.771.714.000	35,63
		2021	Rp 3.161.105.356.526.000	35,69
		2022	Rp 3.387.321.004.206.000	35,76
		2023	Rp 3.440.333.041.238.000	35,77
		2024	Rp 3.447.072.687.973.000	35,78
26	RODA	2020	Rp 3.936.147.888.286.000	35,91
		2021	Rp 3.650.686.851.644.000	35,83
		2022	Rp 3.547.426.939.513.000	35,80
		2023	Rp 3.400.853.313.022.000	35,76
		2024	Rp 3.359.063.695.937.000	35,75
27	SMDM	2020	Rp 3.201.910.904.021.000	35,70
		2021	Rp 3.303.511.723.151.000	35,73
		2022	Rp 3.423.278.470.836.000	35,77
		2023	Rp 3.534.588.823.995.000	35,80
		2024	Rp 3.462.272.048.915.000	35,78
28	SMRA	2020	Rp 24.922.534.224.000	30,85
		2021	Rp 26.049.716.678.000	30,89
		2022	Rp 28.433.574.878.000	30,98
		2023	Rp 31.168.375.086.000	31,07
		2024	Rp 33.534.100.462.000	31,14
29	CSIS	2020	Rp 538.263.035.994.000	33,92
		2021	Rp 526.136.140.616.000	33,90
		2022	Rp 54.666.644.817.000	31,63
		2023	Rp 548.709.679.878.000	33,94
		2024	Rp 522.017.040.540.000	33,89
30	SATU	2020	Rp 260.603.289.004.000	33,19
		2021	Rp 259.460.426.774.000	33,19
		2022	Rp 237.976.128.033.000	33,10
		2023	Rp 23.035.415.122.000	30,77
		2024	Rp 1.119.681.171.320.000	34,65
31	POLI	2020	Rp 2.473.039.414.917.000	35,44
		2021	Rp 2.440.573.927.925.000	35,43
		2022	Rp 2.583.234.248.023.000	35,49
		2023	Rp 3.245.188.408.916.000	35,72
		2024	Rp 213.399.356.790.000	32,99

32	PAMG	2020	Rp 58.280.621.435.000	31,70
		2021	Rp 583.578.892.476.000	34,00
		2022	Rp 582.565.037.552.000	34,00
		2023	Rp 58.263.688.884.000	31,70
		2024	Rp 4.466.077.681.112.000	36,04
33	TRIN	2020	Rp 1.472.164.984.000	28,02
		2021	Rp 1.871.869.145.000	28,26
		2022	Rp 207.697.864.000	26,06
		2023	Rp 2.212.539.866.000	28,43
		2024	Rp 587.960.961.876.000	34,01
34	AMAN	2020	Rp 79.939.751.000	25,10
		2021	Rp 86.188.887.000	25,18
		2022	Rp 966.109.133.000	27,60
		2023	Rp 1.085.440.454.000	27,71
		2024	Rp 2.222.883.786.000	28,43
35	IPAC	2020	Rp 475.982.523.359.000	33,80
		2021	Rp 32.957.177.249.000	31,13
		2022	Rp 39.088.524.959.000	31,30
		2023	Rp 44.556.390.017.000	31,43
		2024	Rp 1.334.801.136.000	27,92

Lampiran 8. Hasil Output SPSS

1. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Aset Pajak Tangguhan	175	.35	2.68	1.8346	.42997
Beban Pajak Tangguhan	175	-1.45	2.50	.8951	.79301
Perencanaan Pajak	175	-6.97	7.06	-.0373	1.59102
Leverage	175	-5.88	5.35	-.4122	1.65031
Manajemen Laba	175	2.75	3.56	3.3317	.18135
Ukuran Perusahaan	175	3.03	3.63	3.4487	.16310
Valid N (listwise)	175				

2. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		175
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.27181225
Most Extreme Differences	Absolute	.051
	Positive	.051
	Negative	-.050
Test Statistic		.051
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.322
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	.310
	Upper Bound	.334

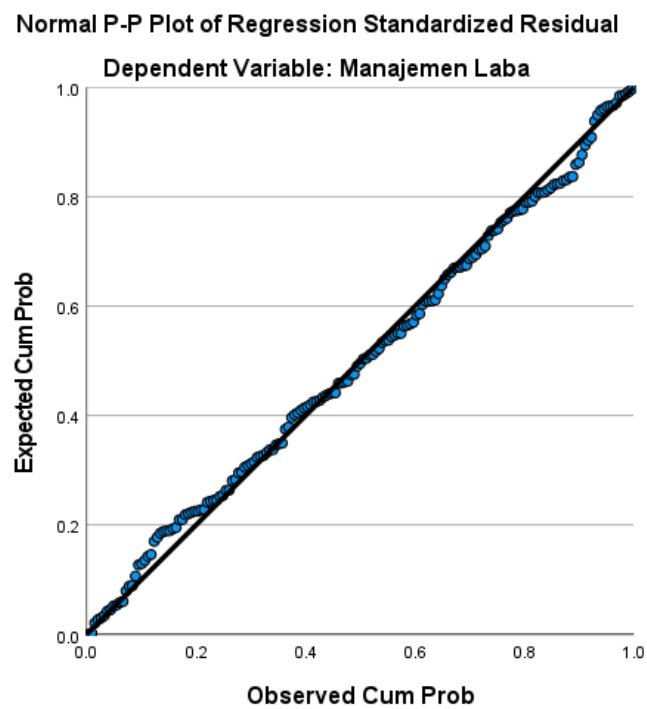
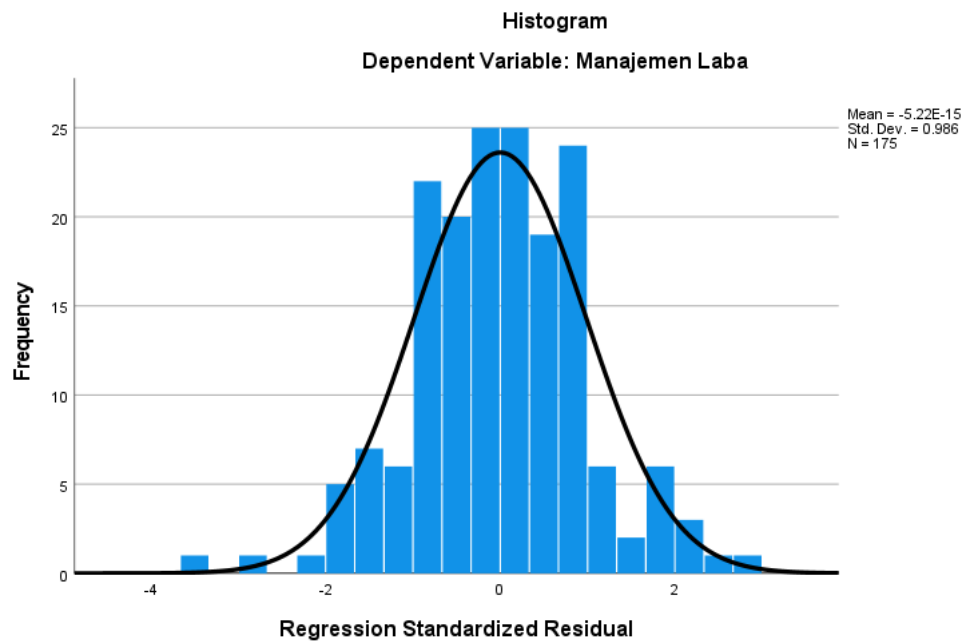
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.



b) Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Aset Pajak Tangguhan	.962	1.040
	Beban Pajak Tangguhan	.816	1.225
	Perencanaan Pajak	.838	1.193
	Leverage	.945	1.058
	Ukuran Perusahaan	.965	1.036

a. Dependent Variable: Manajemen Laba

c) Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.238	1.595		1.403	.163
	Aset Pajak Tangguhan	-.111	.145	-.059	-.765	.445
	Beban Pajak Tangguhan	.066	.096	.065	.692	.490
	Perencanaan Pajak	-.016	.034	-.044	-.467	.641
	Leverage	.065	.051	.097	1.269	.206
	Ukuran Perusahaan	-.893	1.271	-.053	-.703	.483

a. Dependent Variable: ABS_RES

d) Uji AutoKorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.706 ^a	.499	.480	3.39667	1.793

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan_Z, Aset Pajak Tangguhan_X1, Perencanaan Pajak_X3, Leverage_X4, Beban Pajak Tangguhan_X2

b. Dependent Variable: Manajemen Laba_Y

3) Pengujian Hipotesis

a) Uji Koefisiensi Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.706 ^a	.499	.480	3.39667

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan_Z, Aset Pajak Tangguhan_X1, Perencanaan Pajak_X3, Leverage_X4, Beban Pajak Tangguhan_X2

b) Uji Signifikan Simultan(Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3549.562	5	709.912	426.281	.000 ^b
	Residual	281.446	169	1.665		
	Total	3831.009	174			

a. Dependent Variable: Manajemen Laba

b. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Aset Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, Leverage, Beban Pajak Tangguhan

c) Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	29.474	.413		71.300
	Aset Pajak Tangguhan	10.327	.635	5.646	16.269
	Beban Pajak Tangguhan	5.792	1.433	2.968	4.040
	Perencanaan Pajak	-2.485	2.569	-.842	-.967
	Leverage	-2.740	1.748	-.964	-1.567

a. Dependent Variable: Manajemen Laba

d) Uji MRA

Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	29.474	.413		71.300
	Aset Pajak Tangguhan *	-2.960	.185	-5.642	-15.966
	Ukuran Perusahaan				
	Beban Pajak Tangguhan	-1.654	.415	-2.962	-3.989
	* Ukuran Perusahaan				
	Perencanaan Pajak *	.743	.738	.881	1.007
	Ukuran Perusahaan				
	Leverage * Ukuran	.809	.505	.980	1.601
	Perusahaan				

a. Dependent Variable: Manajemen Laba

Lampiran 9. Tabel Durbin Watson (DW)

Rumus : $dL=1.6507$

$dU=1.7984$

$4-dU=4-1.6507=2.3493$

$4-DI=4-1.7984= 2.2016$

Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
137	1.7062	1.7356	1.6914	1.7506	1.6765	1.7659	1.6613	1.7813	1.6461	1.7971
138	1.7073	1.7365	1.6926	1.7514	1.6778	1.7665	1.6628	1.7819	1.6476	1.7975
139	1.7084	1.7374	1.6938	1.7521	1.6791	1.7672	1.6642	1.7824	1.6491	1.7979
140	1.7095	1.7382	1.6950	1.7528	1.6804	1.7678	1.6656	1.7830	1.6507	1.7984
141	1.7106	1.7391	1.6962	1.7537	1.6817	1.7685	1.6670	1.7835	1.6522	1.7988
142	1.7116	1.7400	1.6974	1.7544	1.6829	1.7691	1.6684	1.7840	1.6536	1.7992
143	1.7127	1.7408	1.6985	1.7552	1.6842	1.7697	1.6697	1.7846	1.6551	1.7996
144	1.7137	1.7417	1.6996	1.7559	1.6854	1.7704	1.6710	1.7851	1.6565	1.8000
145	1.7147	1.7425	1.7008	1.7566	1.6866	1.7710	1.6724	1.7856	1.6580	1.8004
146	1.7157	1.7433	1.7019	1.7574	1.6878	1.7716	1.6737	1.7861	1.6594	1.8008
147	1.7167	1.7441	1.7030	1.7581	1.6890	1.7722	1.6750	1.7866	1.6608	1.8012
148	1.7177	1.7449	1.7041	1.7588	1.6902	1.7729	1.6762	1.7871	1.6622	1.8016
149	1.7187	1.7457	1.7051	1.7595	1.6914	1.7735	1.6775	1.7876	1.6635	1.8020
150	1.7197	1.7465	1.7062	1.7602	1.6926	1.7741	1.6788	1.7881	1.6649	1.8024
151	1.7207	1.7473	1.7072	1.7609	1.6937	1.7747	1.6800	1.7886	1.6662	1.8028
152	1.7216	1.7481	1.7083	1.7616	1.6948	1.7752	1.6812	1.7891	1.6675	1.8032
153	1.7226	1.7488	1.7093	1.7622	1.6959	1.7758	1.6824	1.7896	1.6688	1.8036
154	1.7235	1.7496	1.7103	1.7629	1.6971	1.7764	1.6836	1.7901	1.6701	1.8040
155	1.7244	1.7504	1.7114	1.7636	1.6982	1.7770	1.6848	1.7906	1.6714	1.8044
156	1.7253	1.7511	1.7123	1.7642	1.6992	1.7776	1.6860	1.7911	1.6727	1.8048
157	1.7262	1.7519	1.7133	1.7649	1.7003	1.7781	1.6872	1.7915	1.6739	1.8052
158	1.7271	1.7526	1.7143	1.7656	1.7014	1.7787	1.6883	1.7920	1.6751	1.8055
159	1.7280	1.7533	1.7153	1.7662	1.7024	1.7792	1.6895	1.7925	1.6764	1.8059
160	1.7289	1.7541	1.7163	1.7668	1.7035	1.7798	1.6906	1.7930	1.6776	1.8063
161	1.7298	1.7548	1.7172	1.7675	1.7045	1.7804	1.6917	1.7934	1.6788	1.8067
162	1.7306	1.7555	1.7182	1.7681	1.7055	1.7809	1.6928	1.7939	1.6800	1.8070
163	1.7315	1.7562	1.7191	1.7687	1.7066	1.7814	1.6939	1.7943	1.6811	1.8074
164	1.7324	1.7569	1.7200	1.7693	1.7075	1.7820	1.6950	1.7948	1.6823	1.8078
165	1.7332	1.7576	1.7209	1.7700	1.7085	1.7825	1.6960	1.7953	1.6834	1.8082
166	1.7340	1.7582	1.7218	1.7706	1.7095	1.7831	1.6971	1.7957	1.6846	1.8085
167	1.7348	1.7589	1.7227	1.7712	1.7105	1.7836	1.6982	1.7961	1.6857	1.8089
168	1.7357	1.7596	1.7236	1.7718	1.7115	1.7841	1.6992	1.7966	1.6868	1.8092
169	1.7365	1.7603	1.7245	1.7724	1.7124	1.7846	1.7002	1.7970	1.6879	1.8096
170	1.7373	1.7609	1.7254	1.7730	1.7134	1.7851	1.7012	1.7975	1.6890	1.8100
171	1.7381	1.7616	1.7262	1.7735	1.7143	1.7856	1.7023	1.7979	1.6901	1.8103
172	1.7389	1.7622	1.7271	1.7741	1.7152	1.7861	1.7033	1.7983	1.6912	1.8107
173	1.7396	1.7629	1.7279	1.7747	1.7162	1.7866	1.7042	1.7988	1.6922	1.8110
174	1.7404	1.7635	1.7288	1.7753	1.7171	1.7872	1.7052	1.7992	1.6933	1.8114
175	1.7412	1.7642	1.7296	1.7758	1.7180	1.7877	1.7062	1.7996	1.6943	1.8117
176	1.7420	1.7648	1.7305	1.7764	1.7189	1.7881	1.7072	1.8000	1.6954	1.8121
177	1.7427	1.7654	1.7313	1.7769	1.7197	1.7886	1.7081	1.8005	1.6964	1.8124
178	1.7435	1.7660	1.7321	1.7775	1.7206	1.7891	1.7091	1.8009	1.6974	1.8128
179	1.7442	1.7667	1.7329	1.7780	1.7215	1.7896	1.7100	1.8013	1.6984	1.8131
180	1.7449	1.7673	1.7337	1.7786	1.7224	1.7901	1.7109	1.8017	1.6994	1.8135
181	1.7457	1.7679	1.7345	1.7791	1.7232	1.7906	1.7118	1.8021	1.7004	1.8138
182	1.7464	1.7685	1.7353	1.7797	1.7241	1.7910	1.7128	1.8025	1.7014	1.8141
183	1.7471	1.7691	1.7360	1.7802	1.7249	1.7915	1.7137	1.8029	1.7023	1.8145
184	1.7478	1.7697	1.7368	1.7807	1.7257	1.7920	1.7146	1.8033	1.7033	1.8148
185	1.7485	1.7702	1.7376	1.7813	1.7266	1.7924	1.7155	1.8037	1.7042	1.8151
186	1.7492	1.7708	1.7384	1.7818	1.7274	1.7929	1.7163	1.8041	1.7052	1.8155
187	1.7499	1.7714	1.7391	1.7823	1.7282	1.7933	1.7172	1.8045	1.7061	1.8158
188	1.7506	1.7720	1.7398	1.7828	1.7290	1.7938	1.7181	1.8049	1.7070	1.8161
189	1.7513	1.7725	1.7406	1.7833	1.7298	1.7942	1.7189	1.8053	1.7080	1.8165
190	1.7520	1.7731	1.7413	1.7838	1.7306	1.7947	1.7198	1.8057	1.7089	1.8168
191	1.7526	1.7737	1.7420	1.7843	1.7314	1.7951	1.7206	1.8061	1.7098	1.8171
192	1.7533	1.7742	1.7428	1.7848	1.7322	1.7956	1.7215	1.8064	1.7107	1.8174
193	1.7540	1.7748	1.7435	1.7853	1.7329	1.7960	1.7223	1.8068	1.7116	1.8178
194	1.7546	1.7753	1.7442	1.7858	1.7337	1.7965	1.7231	1.8072	1.7124	1.8181
195	1.7553	1.7759	1.7449	1.7863	1.7345	1.7969	1.7239	1.8076	1.7133	1.8184
196	1.7559	1.7764	1.7456	1.7868	1.7352	1.7973	1.7247	1.8079	1.7142	1.8187
197	1.7566	1.7769	1.7463	1.7873	1.7360	1.7977	1.7255	1.8083	1.7150	1.8190
198	1.7572	1.7775	1.7470	1.7878	1.7367	1.7982	1.7263	1.8087	1.7159	1.8193
199	1.7578	1.7780	1.7477	1.7882	1.7374	1.7986	1.7271	1.8091	1.7167	1.8196
200	1.7584	1.7785	1.7483	1.7887	1.7382	1.7990	1.7279	1.8094	1.7176	1.8199

Lampiran 10. Tabel Uji F

Rumus F tabel :

$$df1 = k - 1$$

$$df1 = 5 - 1 = 4 \text{ (N1)}$$

$$df2 = n - k$$

$$df2 = 140 - 5 = 135 \text{ (N2)}$$

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.77
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.82	1.80	1.77
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
98	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
101	3.94	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
102	3.93	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
103	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
104	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
105	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.81	1.79	1.76
106	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
107	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
108	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
109	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
110	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
111	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
112	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
113	3.93	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.87	1.84	1.81	1.78	1.76
114	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
115	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
116	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
117	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
118	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
119	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
121	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
122	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
123	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
124	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
125	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
126	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
127	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
128	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
129	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
130	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
131	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
132	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
133	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
134	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
135	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.77	1.74

Lampiran 11. Tabel Uji f

Rumus : $df = n - k - 1$

$df = 140 - 4 - 1 = 135$

$135 = 1.656$

Titik Persentase Distribusi t (df = 121 –160)

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
121	0.67652	1.28859	1.65754	1.97976	2.35756	2.61707	3.15895
122	0.67651	1.28853	1.65744	1.97960	2.35730	2.61673	3.15838
123	0.67649	1.28847	1.65734	1.97944	2.35705	2.61639	3.15781
124	0.67647	1.28842	1.65723	1.97928	2.35680	2.61606	3.15726
125	0.67646	1.28836	1.65714	1.97912	2.35655	2.61573	3.15671
126	0.67644	1.28831	1.65704	1.97897	2.35631	2.61541	3.15617
127	0.67643	1.28825	1.65694	1.97882	2.35607	2.61510	3.15565
128	0.67641	1.28820	1.65685	1.97867	2.35583	2.61478	3.15512
129	0.67640	1.28815	1.65675	1.97852	2.35560	2.61448	3.15461
130	0.67638	1.28810	1.65666	1.97838	2.35537	2.61418	3.15411
131	0.67637	1.28805	1.65657	1.97824	2.35515	2.61388	3.15361
132	0.67635	1.28800	1.65648	1.97810	2.35493	2.61359	3.15312
133	0.67634	1.28795	1.65639	1.97796	2.35471	2.61330	3.15264
134	0.67633	1.28790	1.65630	1.97783	2.35450	2.61302	3.15217
135	0.67631	1.28785	1.65622	1.97769	2.35429	2.61274	3.15170
136	0.67630	1.28781	1.65613	1.97756	2.35408	2.61246	3.15124
137	0.67628	1.28776	1.65605	1.97743	2.35387	2.61219	3.15079
138	0.67627	1.28772	1.65597	1.97730	2.35367	2.61193	3.15034
139	0.67626	1.28767	1.65589	1.97718	2.35347	2.61166	3.14990
140	0.67625	1.28763	1.65581	1.97705	2.35328	2.61140	3.14947
141	0.67623	1.28758	1.65573	1.97693	2.35309	2.61115	3.14904
142	0.67622	1.28754	1.65566	1.97681	2.35289	2.61090	3.14862
143	0.67621	1.28750	1.65558	1.97669	2.35271	2.61065	3.14820
144	0.67620	1.28746	1.65550	1.97658	2.35252	2.61040	3.14779
145	0.67619	1.28742	1.65543	1.97646	2.35234	2.61016	3.14739
146	0.67617	1.28738	1.65536	1.97635	2.35216	2.60992	3.14699
147	0.67616	1.28734	1.65529	1.97623	2.35198	2.60969	3.14660
148	0.67615	1.28730	1.65521	1.97612	2.35181	2.60946	3.14621
149	0.67614	1.28726	1.65514	1.97601	2.35163	2.60923	3.14583
150	0.67613	1.28722	1.65508	1.97591	2.35146	2.60900	3.14545
151	0.67612	1.28718	1.65501	1.97580	2.35130	2.60878	3.14508
152	0.67611	1.28715	1.65494	1.97569	2.35113	2.60856	3.14471
153	0.67610	1.28711	1.65487	1.97559	2.35097	2.60834	3.14435
154	0.67609	1.28707	1.65481	1.97549	2.35081	2.60813	3.14400
155	0.67608	1.28704	1.65474	1.97539	2.35065	2.60792	3.14364
156	0.67607	1.28700	1.65468	1.97529	2.35049	2.60771	3.14330
157	0.67606	1.28697	1.65462	1.97519	2.35033	2.60751	3.14295
158	0.67605	1.28693	1.65455	1.97509	2.35018	2.60730	3.14261
159	0.67604	1.28690	1.65449	1.97500	2.35003	2.60710	3.14228
160	0.67603	1.28687	1.65443	1.97490	2.34988	2.60691	3.14195